



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan

Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bengkayang Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 12, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Bengkayang Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran

2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bengkayang Tahun 2019.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
19. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak jangka kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang bermuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka, menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
28. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
29. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
30. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu Strategis Dearah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
31. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
33. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
34. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*outout*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
36. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arahan kebijakan pemanfaatan rungan wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedlaam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
38. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD yang menuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja perangkat Kabupaten Bengkayang;
 - b. Pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkayang;
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disampaikan Bupati Bengkayang kepada DPRD Kabupaten Bengkayang untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, memuat :

- a. pendahuluan ;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perubahan RKPD pada saat tahun pelaksanaan RKPD berlangsung.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR.....63.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JUNI 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 yang telah ditetapkan selanjutnya dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya karena keterbatasan informasi dan referensi yang dimiliki. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi penyempurnaan dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan yang selanjutnya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang, Juli 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-8
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-11
1.5 Maksud dan Tujuan	I-14
BAB.II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-36
BAB.III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018.....	III-2
3.1.2. Isu Strategis 2018	III-3
3.1.3. Analisis Lingkungan (SWOT)	III-6
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2018-2019.....	III-10

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-15
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19
BAB.IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan	IV-23
BAB.V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB.VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Berdasarkan Urusan	VI-1
	6.1.1 Urusan Konkuren	
	6.1.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.2	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	
BAB.VII	PENUTUP	

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan tersebut, maka dokumen RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 haruslah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan nasional yang termuat di dalam agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan. Selain itu, RKPD Kabupaten Bengkayang juga merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk tahun 2019.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan mengevaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
- c) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

Pendekatan Teknokratis;

yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD, yang implementasinya tercermin dari:

- a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
- d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
- e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
- f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;
- g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
- i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk *review* kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan Demokratis dan Partisipatif;

Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:

- a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal;
- e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
- f) Pelibatan media;
- g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
- h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan Politis;

Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa:

- a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019;

- b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2019;
- c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

Pendekatan Top Down;

Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:

- a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Kalimantan Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
- b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Bengkayang;
- c) Konsisten dengan RTRW Daerah;
- d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
- e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

Pendekatan Bottom Up;

Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Bengkayang;
- b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
- c) Mempertimbangkan hasil Forum OPD.

Selain itu dalam rangka penyusunan RKPD dilandasi 4 prinsip dasar perencanaan pembangunan yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) *gender mainstream*; 4) *good governance*.

Dokumen RKPD merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Adapun tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan Rancangan Awal

1. Memperhatikan hasil analisis kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasar sebagai acuan dalam pengalokasian dana pada setiap rencana kerja.

2. Memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan pada RKP tingkat pemerintahan atasnya.
 3. Memperhatikan penjabaran rencana kerja OPD
 4. Memperhatikan prakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun rencana tersebut.
- b. Penyusunan Rancangan
1. Rancangan RKPD merupakan integrasi antara rancangan awal dan rancangan Renja OPD, yang selanjutnya menjadi input utama pada musrenbang Tahunan Daerah.
 2. Rancangan Awal RKPD memuat rangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.
 3. Dalam penetapan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan isu-isu masalah strategis atas pengaruh internal dan eksternal.
- c. Musrenbang Tahunan Daerah
1. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, Forum OPD dan musrenbang kabupaten/kota, dan Forum OPD dan musrenbang tingkat provinsi.
 2. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan, rencana kerja pembangunan, mengalokasikan anggaran pada setiap rencana kerja, lokasi kegiatan dan OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
 3. Musrenbang Tahunan Daerah merupakan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.
- d. Penyusunan Rancangan Akhir

Rancangan awal yang telah dikaji dan memperhatikan masukan dari kesepakatan Musrenbang Tahunan Daerah akan menghasilkan Rancangan Akhir RKPD 2019 Kabupaten Bengkayang untuk disampaikan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya diproses untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

e. Penetapan

RKPD yang telah disempurnakan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan digunakan sebagai:

1. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD dan bahan dalam penyusunan RKA OPD Tahun 2019.
2. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafont Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

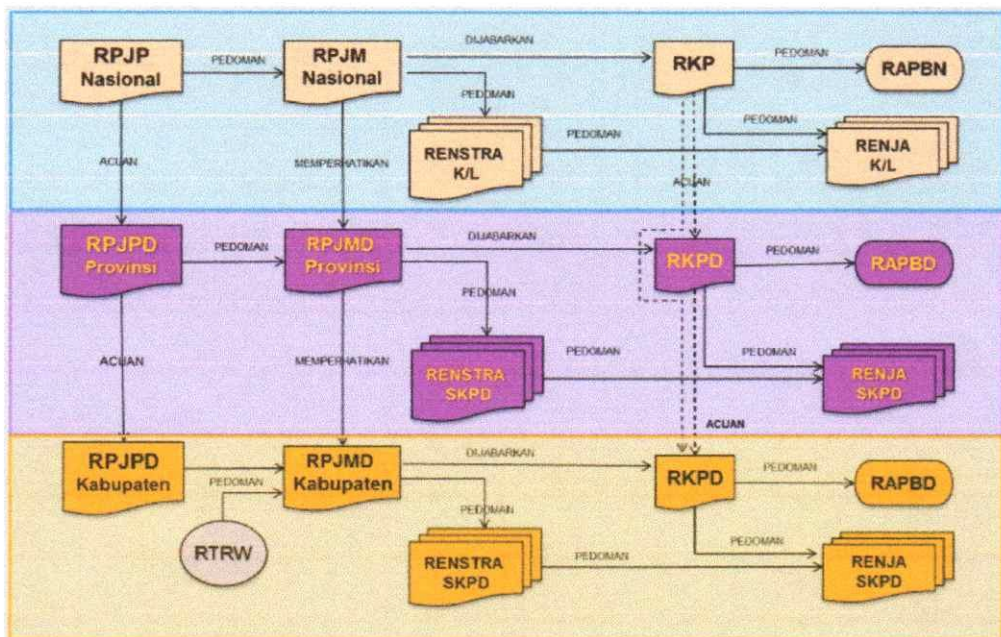
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum bagi perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 ini beberapa dokumen perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Bengkayang, RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034, RPJMD Kabupaten Bengkayang 2016 - 2021, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Kabupaten Bengkayang, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, RKP Nasional, Renstra OPD Kabupaten Bengkayang dan Renja OPD Kabupaten Bengkayang.

RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA – OPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan OPD



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2018 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen

RKPD dengan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.5 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2019 di daerah.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan

sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Mengemukakan tentang kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2019

4.2 Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang sasaran dan target pembangunan Kabupaten Bengkayang secara umum maupun khusus, dari beberapa prioritas bidang pembangunan yang ingin dicapai.

4.3 Prioritas dan Program Pembangunan

Mencantumkan beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang di tahun 2019 yang dijabarkan dalam program kegiatan prioritas pembangunan untuk masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kondisi

obyektif dan kebijakan pembangunan berdasarkan regulasi yang ada.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII. PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2019:

- a. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran dan masukan dari masyarakat baik melalui musrenbang maupun komunikasi publik lainnya;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- d. Memberikan arah sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019;

- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. Menciptakan kepastian dan mensinergiskan perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar tingkat Pemerintahan;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
- e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat secara geografis. Kabupaten Bengkayang terletak di 0° 33' 00" Lintang Utara sampai 1° 30' 00" Lintang Utara dan 108° 39' 00" Bujur Timur sampai 110° 10' 00" Bujur Timur.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Sambas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota Singkawang
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Utara dari Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 Km² atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jagoi Babang Merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 Km² atau sekitar 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan kecamatan dengan cakupan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km² atau hanya sekitar 0,86% dari total wilayah Kabupaten Bengkayang.

Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan kecamatan Suti Semarang.
2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkal
3. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sunagi Betung
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Rincian 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang disajikan pada Tabel Berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Desa, Dusun, dan Luas Wilayah Untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	Dusun	
1	Sungai Raya		5	19	75,85
2	Capkala		6	11	46,35
3	Samalantan		7	28	420,50

4	Monterado		11	28	291,00
5	Bengkayang	2	4	9	167,04
6	Teriak		18	28	231,51
7	Sungai Betung		4	12	205,95
8	Ledo		12	32	481,75
9	Suti Semarang		8	13	280,84
10	Lumar		5	14	275,21
11	Sanggau Ledo		5	17	392,50
12	Seluas		6	24	506,50
13	Jagoi Babang		6	14	655,00
14	Siding		8	21	563,30
15	Tujuh Belas		4	12	221,00
16	Sungai Raya Kepulauan		5	18	394,00
17	Lembah Bawang		8	16	188,00
JUMLAH		2	122	316	5.396,30

Sumber: BPS Bengkayang, 2017

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki dua kondisi bentang alam, yaitu:

1. Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan, dengan panjang garis pantai 68,5 Km. Dengan luas wilayah laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km²;
2. Daratan dan Perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi babang, dan Siding. Dengan luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km²

Kabupaten Bengkayang di sebelah Tenggara yang berbatasan dengan pantai, yaitu Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala berada pada ketinggian < 100 m di atas permukaan laut (dpl) memiliki dan memiliki bentuk wilayah yang relatif datar dengan kemiringan 0-2 %, sedangkan di wilayah kecamatan lainnya merupakan daerah berombak sampai bergelombang yang terdapat di wilayah tengah dengan kemiringan 2-14 %. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang terletak di atas ketinggian 100 m dpl, dilihat dari sebaran lerengnya sebagian besar wilayah ini masuk pada kelas lereng 15-40 % yang bertopografi agak curam hingga curam dan hanya sebagian kecil

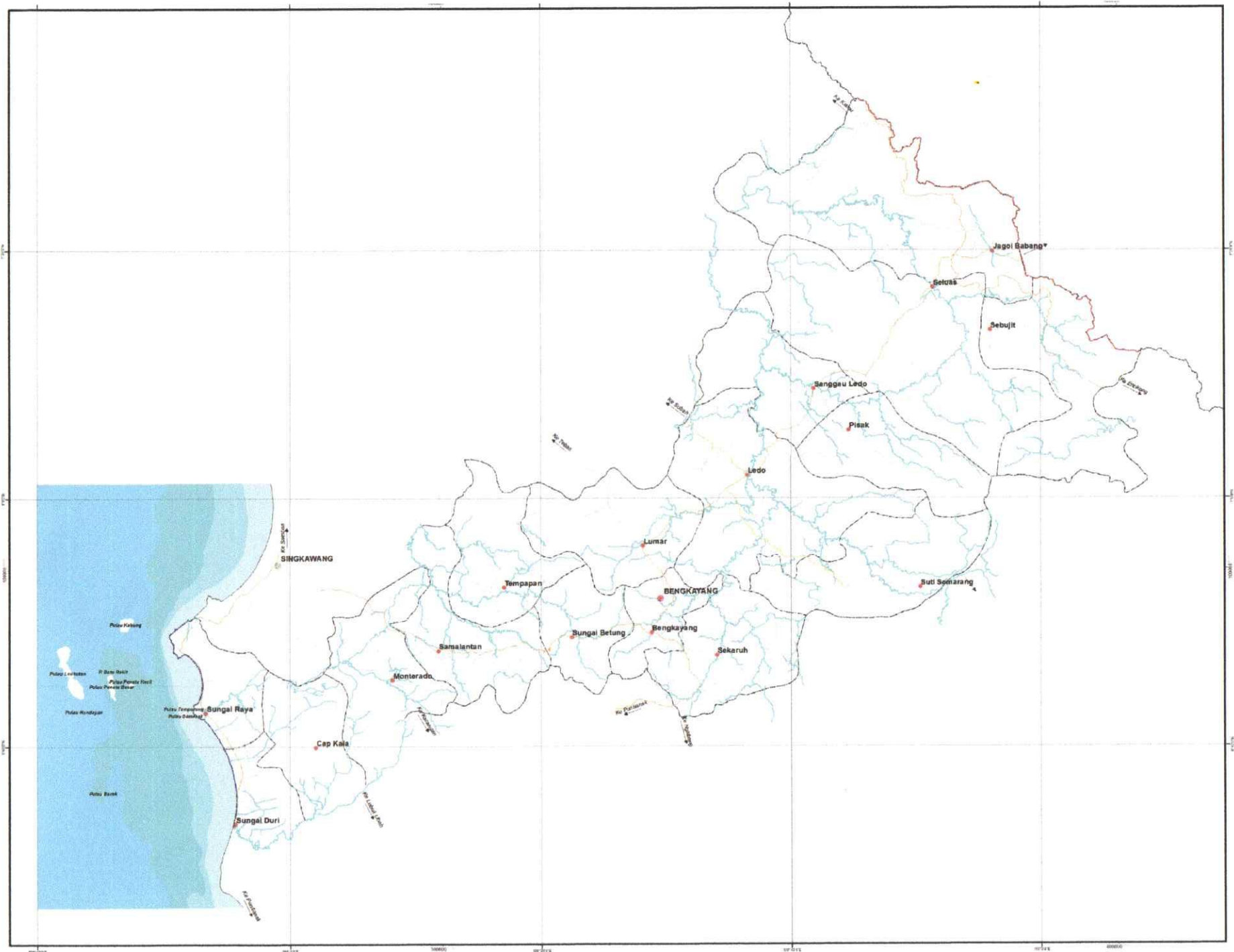
yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 % yang bertopografi sangat curam. Kelas lereng Kabupaten Bengkayang cukup beragam. Lebih jelasnya mengenai kondisi topografi Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2

Luas Kabupaten Bengkayang menurut Kecamatan dan Kelas Lereng

No	Kecamatan	Luas per Kelas Lereng				Jumlah Total (Ha)
		0 - 2 % (Ha)	2 - 14 % (Ha)	15 - 40 % (Ha)	>40 % (Ha)	
1	Sungai Raya	6.689	165	639	92	7.585
2	Capkala	4.087	101	391	56	4.635
3	Sei Raya Kepulauan	34.744	859	3.320	477	39.400
4	Samalantan	4.387	11.979	18.964	6.720	42.050
5	Monterado	3.036	8.290	13.123	4.651	29.100
6	Lembah Bawang	1.962	5.356	8.478	3.004	18.800
7	Bengkayang	0	0	14.457	2.247	16.704
8	Teriak	0	0	20.037	3.114	23.151
9	Sungai Betung	0	0	17.825	2.770	20.595
10	Ledo	0	4.285	32.492	11.398	48.175
11	Suti Semarang	0	2.498	18.942	6.644	28.084
12	Lumar	0	2.448	18.561	6.512	27.521
13	Sanggau Ledo	14.811	22.824	838	777	39.250
14	Tujuh Belas	8.339	12.851	472	438	22.100
15	Seluas	23.150	20.000	0	7.500	50.650
16	Jagoi Babang	27.941	26.133	672	10.753	65.500
17	Siding	24.029	22.476	578	9.247	56.330
Jumlah/Total		153.175	140.265	169.789	76.400	539.630

Sumber : Kabupaten Bengkayang dalam Angka 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



**RKPD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2018**

PETA ADMINISTRASI



Lokasi

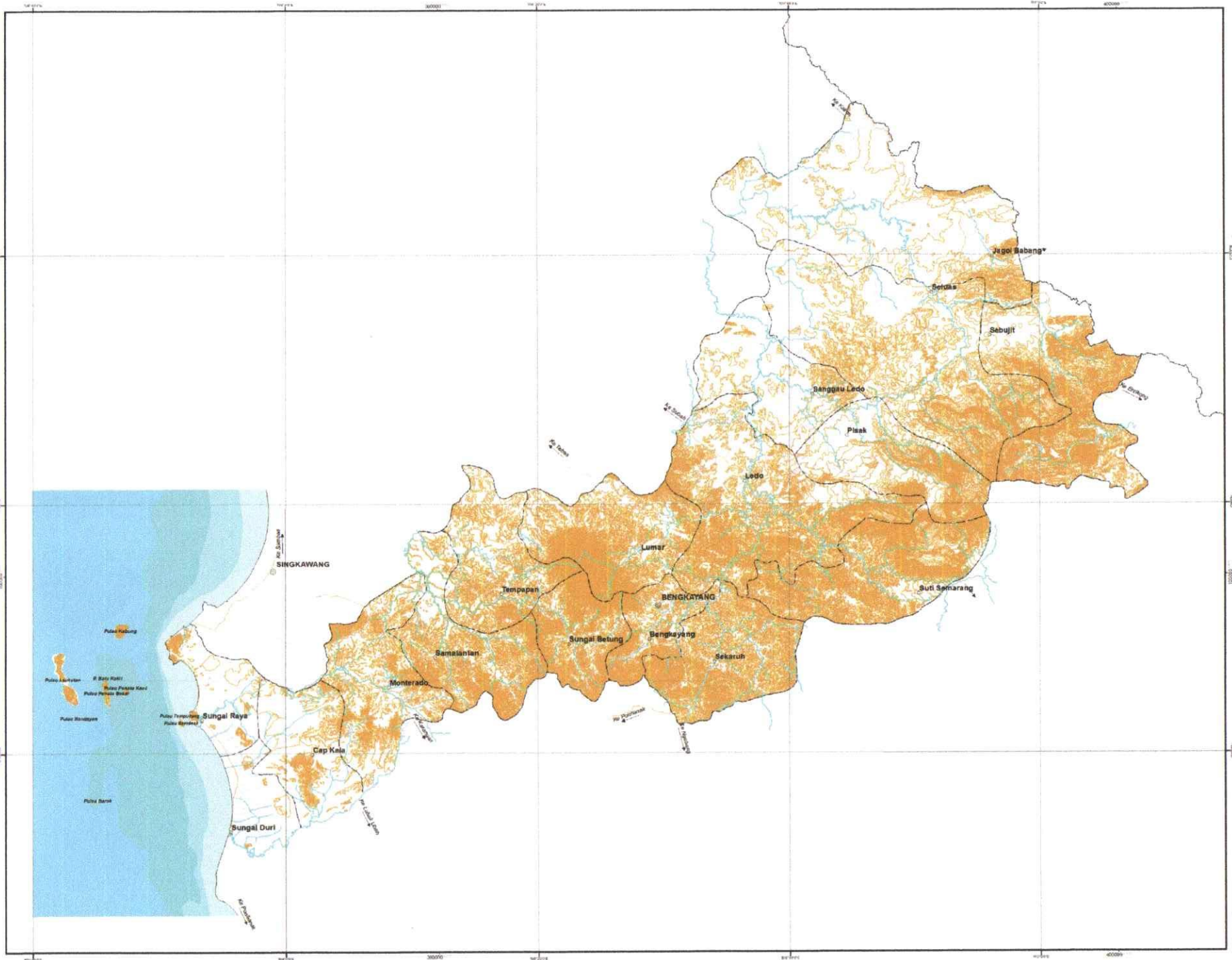


Keterangan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- - - Batas Negara
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

Sumber Peta
- RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah 2014-2034

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



**RKPD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2018**

PETA TOPOGRAFI



Lokasi



Keterangan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Interval 25 M

Sumber Peta
- RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah 2014-2034

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2017**

Untuk sistem jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Bengkayang terbagi menjadi 2 (dua) katagori yaitu :

1. Sistem jaringan sumber daya air propinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten, sistem jaringan ini meliputi :
 - a. WS (wilayah sungai) lintas kabupaten meliputi WS Sambas (DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau,) WS Mempawah (DAS Lemukutan, DAS Raya, DAS Duri, DAS Karimunting, DAS Mempawah);
 - b. Daerah Irigasi permukaan (DI) meliputi DI Sinar Tebudak terletak di Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas dengan luas kurang lebih 1.552 Ha dan DI Madi terletak di Kecamatan Lumar dengan luas kurang lebih 1.120 Ha; dan
 - c. Daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Sungai Keran terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dengan luas kurang lebih 2.890 Ha.
2. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, sistem jaringan sumber daya air ini meliputi :
 - a. Jaringan sungai yang mendukung WS dan DAS meliputi Sungai Kumba, Sungai Sambas Kecil, Sungai Tanggi, Sungai Ledo, Sungai Sebalu, Sungai Teriak, Sungai Barabas, Sungai Bengkayang Kecil, Sungai Selakau, Sungai Bantana;
 - b. Daerah irigasi permukaan, dengan jumlah 72 (Tujuh Puluh Dua) irigasi permukaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang dengan luas total mencapai 11.042 Ha.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama yang melintasi wilayah kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 Ha, das Sungai Raya dengan luas 50.00 Ha, dan DAS Sungai Duri dengan Luas 24.375 Ha.

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang didominasi jenis tanah podzolik merah kuning, yaitu seluas 405.481 hektar atau 75,19 % dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang dan yang paling sedikit adalah jenis tanah organik (Organosol), yaitu seluas 10.289 hektar. Luas dan sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2.3

Luas sebaran jenis tanah wilayah Kabupaten Bengkayang

No	Jenis tanah	Luas (Ha)	%
1	Litosol	109.908	20,36
2	Organosol	10.289	1,91
3	Podzol	15.612	2,89
4	Podzolik beku	224.914	41,67
5	Podzolik beku endapan	35.777	6,63
6	Podzolik endapan	129.538	24
7	Uluvial	13.685	2,54
Jumlah		539.788	100

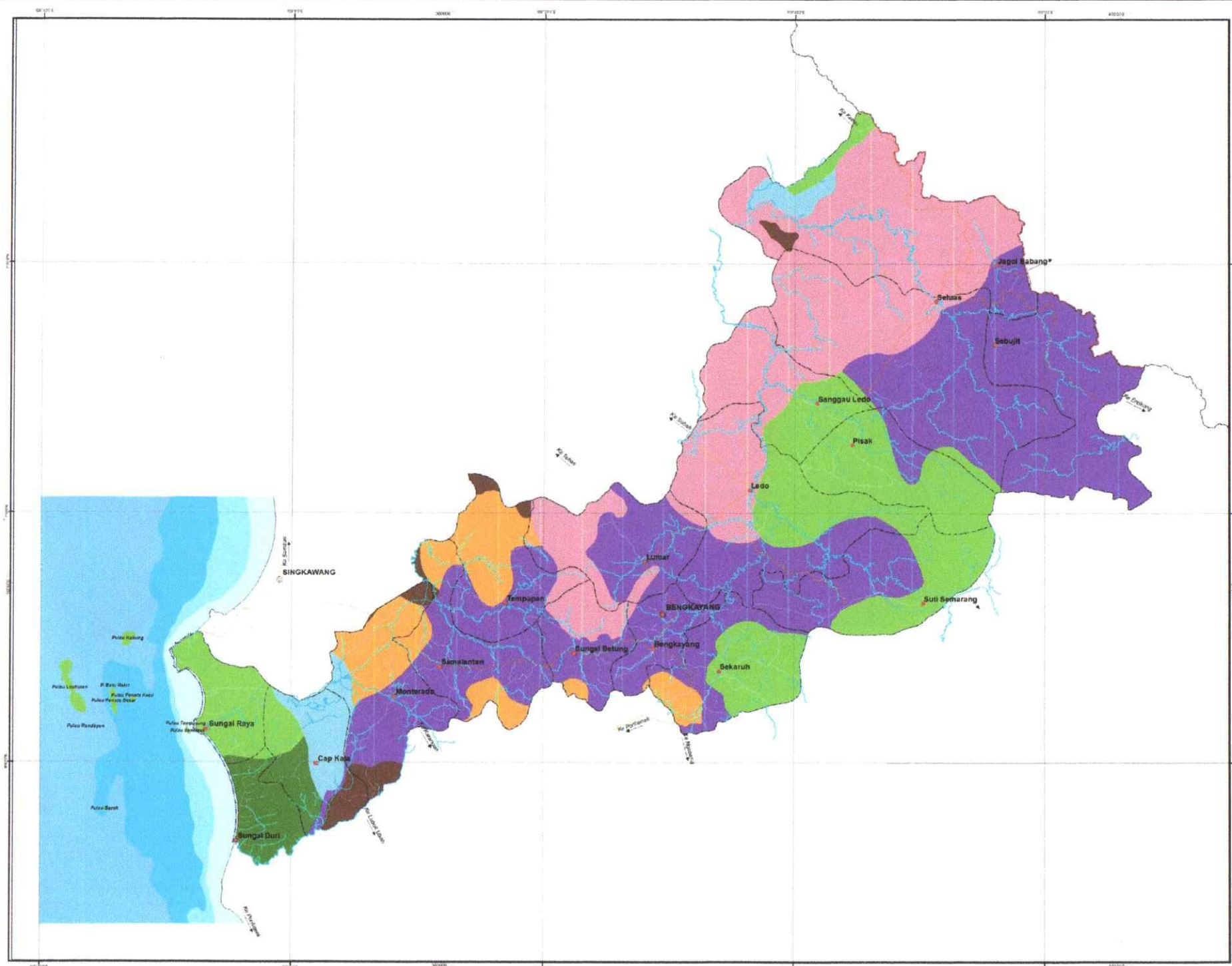
Sumber: RTRW Kabupaten Bengkayang, 2013

Kabupaten Bengkayang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata perbulan berkisar antara 22,9°C sampai 31,05°C, kelembaban nisbi rata-raa perbulan sekitar 86%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. Curah hujan yang cukup tinggi pada blan September sampai bulan Januari dan curah hujan yang rendah antara bulan Juni sampai bulan Agustus.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Adapun kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga

tersebut adalah Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding, dengan panjang garis perbatasan 76,564 Km.

Selain memiliki wilayah pesisir, Kabupaten Bengkayang juga memiliki wilayah kepulauan, yakni sebanyak 12 buah pulau yang secara administrasi terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Secara detailnya data mengenai kepulauan tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

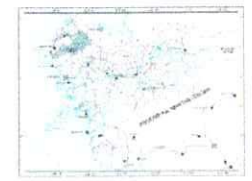


**RKPD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2018**

PETA JENIS TANAH



Lokasi



Keterangan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Latosol
- Organosol
- Podsol
- Podsolik Beku
- Podsolik Beku End
- Podsolik Endapan
- Alluvial

Sumber Peta
- RTRW Kabupaten Bengkayang 2014-2034

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2017**

Tabel 2.4

Nama-nama Pulau dan Luas Menurut Desa di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang

No.	Lokasi	Nama Pulau	Luas	Jarak	Keterangan
1.	Desa Sungai Raya	Penatah Besar	259	28,00	Berpenghuni
		Penatah Kecil	81	22,00	Berpenghuni
		Seluas	38	33,00	Tidak Berpenghuni
		Semesak	58	0,80	Tidak Berpenghuni
		Kera	22	0,80	Tidak Berpenghuni
		Baru	48	42,00	Berpenghuni
		Batu Rakit	13	31,00	Tidak Berpenghuni
		Tempurung	30	0,80	Tidak Berpenghuni
		Kabung	341	20,00	Berpenghuni
2	Desa Karimunting	Batu Payung	21	1,00	Tidak Berpenghuni
		Lemukutan	1.235	38,00	Berpenghuni
3	Desa P. Lemukutan	Randayan	27	38,00	Berpenghuni

Sumber: BPS Kab. Bengkayang, 2016

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis Kabupaten Bengkayang di atas, maka potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkayang sangat besar terutama yang berkaitan pada pengembangan sektor agroforestry (pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan) dan sektor pariwisata.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 242.788 Jiwa yang tersebar pada 17 Kecamatan. Jumlah tersebut terbagi atas 126.011 jiwa penduduk Laki-laki dan 116.777 Jiwa penduduk perempuan, dengan rasio perbandingan penduduk berjenis kelamin Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu dengan angka rasio sebesar 108. Adapun secara lengkap informasi mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Rasio
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	9.496	9.441	18.937	101
2	Capkala	4.422	4.016	8.438	110
3	Sungai Kepulauan	11.379	10.980	22.359	104
4	Samalantan	11.302	10.323	21.625	109
5	Monterado	13.823	12.795	26.618	108
6	Lembah Bawang	3.290	2.862	6.152	115
7	Bengkayang	15.705	15.170	30.875	104
8	Teriak	7.300	6.740	14.040	108
9	Sungai Betung	5.222	4.633	9.855	113
10	Ledo	5.518	5.082	10.600	109
11	Suti Semarang	2.604	2.370	4.974	110
12	Lumar	3.296	3.051	6.347	108
13	Sanggau Ledo	6.326	5.987	12.313	106
14	Tujuh Belas	6.336	5.808	12.144	109
15	Seluas	11.220	9.955	21.175	113
16	Jagoi Babang	5.492	4.498	9.990	122
17	Siding	3.280	3.066	6.346	107
Jumlah		126.011	112.501	232.873	108

Sumber: BPS Bengkayang, 2017

Kecamatan Bengkayang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu sebanyak 30.875 Jiwa, sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Suti Semarang yaitu hanya sebanyak 4.974 Jiwa. Meskipun Kecamatan Bengkayang memiliki jumlah penduduk terbanyak tetapi yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu mencapai 247 Jiwa per Km². Hal ini menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Raya memiliki luasan yang relatif kecil, sehingga dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar telah berpengaruh yang signifikan pada kepadatan penduduk.

Terdapat 4 Kecamatan yang memiliki peluang menjadi daerah yang padat penduduknya jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang merupakan hasil dari sensus penduduk periode 2000-2010, yaitu Kecamatan Bengkayang, Samalantan, Seluas, dan Jagoi Babang. Empat Kecamatan tersebut memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan 13 kecamatan lainnya, yaitu mencapai 3%. Kecamatan Bengkayang adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 4,56%, hal ini wajar mengingat kecamatan tersebut merupakan ibu kota dan pusat perekonomian Kabupaten Bengkayang. Deskripsi secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan 2000-2010 (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
1	2	3	4	5
1	Sungai Raya	0,69	75,85	246
2	Capkala	1,93	46,35	175
3	Sungai Raya Kepulauan	1,25	394,00	55
4	Samalantan	3,00	420,50	49
5	Monterado	1,56	291,00	89
6	Lembah Bawang	2,99	188,00	31
7	Bengkayang	4,56	167,04	169
8	Teriak	2,13	231,51	58
9	Sungai Betung	1,181	205,95	46
10	Ledo	-0,57	481,75	22
11	Suti Semarang	1,53	280,84	17
12	Lumar	1,75	275,21	22
13	Sanggau Ledo	1,73	392,50	30
14	Tujuh Belas	1,47	221,00	53
15	Seluas	3,79	506,50	39
16	Jagoi Babang	3,31	655,00	14
17	Siding	0,39	563,30	11
Jumlah		2,01	5.396,30	43

Sumber: BPS Bengkayang, 2017

3. Potensi Daerah

a. Potensi Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Bengkayang sangat bervariasi dan tersebar pada seluruh kecamatan. Sektor pertanian tidak saja merupakan memiliki potensi yang paling besar tetapi juga merupakan sektor yang menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai mata pencarian utama. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat esensi dalam peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan. Adapun hal yang sangat berperan adalah ketersediaan lahan yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pertanian, terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki jenis tanah yang tergolong sangat subur, diantaranya adalah yang tersebar pada kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, dan Kecamatan Tujuh Belas.

Komoditas unggulan Kabupaten Bengkayang didominasi oleh beberapa tanaman semusim jenis seperti Jagung, Padi, Ubi Kayu, dan beberapa jenis tanaman hortikultura (sayur-sayuran) yang tersebar pada hampir semua kecamatan. Berkaitan dengan pemasaran produk sektor pertanian, meskipun masih pada tahap pasar tradisional namun permintaan pada pasar yang terdapat di wilayah perbatasan (Negara Malaysia) sangat tinggi dan hal ini merupakan peluang besar dalam pengelolaan pemasaran produk pertanian di masa yang akan datang. Khusus untuk komoditas Jagung, Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas merupakan dua daerah yang memproduksi paling besar komoditas tersebut, bahkan untuk regional Kalimantan Kabupaten Bengkayang merupakan daerah terbesar menghasilkan komoditas jagung, yang arahnya menjadi bahan baku dalam memproduksi pakan ternak.

b. Potensi Peternakan

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Bengkayang sangat besar mengingat lokasi yang tersedia cukup besar. Ketersediaan dan penyediaan habitat untuk penanaman pakan ternak juga memiliki potensi yang cukup besar serta kesesuaian iklim yang tidak bermasalah untuk syarat hidup dari beberapa jenis ternak yang akan dikembangkan. Hal-hal negatif berkaitan dengan serangan penyakit ternak yang berpengaruh pada produksi dan pemasaran juga belum terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini tentu saja merupakan keunggulan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang untuk berpeluang dalam mengembangkan sektor peternakan baik pada bentuk usahatani maupun dalam bentuk investasi.

c. Potensi Perkebunan

Sebagian besar dari PDRB bidang pertanian secara umum di Kabupaten Bengkayang adalah berasal dari perkebunan. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas yang belum dimanfaatkan peluang pengembangan untuk sektor perkebunan masih sangat terbuka lebar. Sampai saat ini perkebunan yang menjadi primadona di Kabupaten Bengkayang adalah komoditas Kelapa Sawit baik dalam bentuk usaha rakyat maupun perkebunan skala besar yang dikelola oleh investor melalui Hak Guna Usaha (HGU).

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan yang berpeluang besar dalam pengembangan melalui ekstensifikasi maupun pembudidayaan yang intensif adalah lada, kakao, dan karet. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan yang mampu berperan dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan kondisi tersebut peranan kelembagaan baik Pemerintah maupun non Pemerintah sangat penting dalam usaha pendampingan untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan usahatani yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang melalui sektor perkebunan.

d. Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan Kabupaten Bengkayang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masih tertutupi oleh kawasan hutan, baik yang masih primer maupun yang sekunder. Namun demikian potensi tersebut tentunya tidak mengarah pada pemanfaatan hasil hutan kayu mengingat adanya pertimbangan kelestarian hutan dan alam. Potensi hutan tidak hanya dilihat dari hasil yang berasal dari kayu saja tetapi banyak hasil hutan nonkayu dan atau hasil yang secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.

Fungsi hutan sebagai kawasan penyangga tentunya perlu dilestarikan yang manfaatnya tidak saja menjaga kondisi alam tetapi juga memberikan manfaat secara tidak langsung yang sangat besar, yaitu menciptakan sumber air bersih yang berlimpah dan terciptanya potensi wisata alam yang sangat menjanjikan jika dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal. Manfaat lain yang diperoleh dari potensi hutan yang besar adalah tersedianya beberapa hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan dikelola untuk diproduksi pada skala besar dan industri, antara lain hasil rotan, kulit kayu, tanaman obat-obatan, dan spesies lain yang cukup banyak kegunaannya. Tentunya hal ini akan tercipta jika pengelolaan yang baik selalu diimbangi dengan kegiatan kajian dan penelitian yang fokus agar terciptanya pemanfaatan potensi hutan yang lestari dan berkelanjutan. Lebih jelasnya mengenai status Kawasan Hutan dan sebarannya dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Status Kawasan Hutan
di Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2016

No	Kawasan	Meliputi Kecamatan	Luas
1	Hutan lindung (HL)		34.828
	- Hutan Lindung Gunung Bawang	Kecamatan Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkulu, Lumar	10.247
	- Hutan Lindung Padan Puloh	Kecamatan Bengkulu, Sungai Betung, Terika	6.589
	- Hutan Lindung Penrinssen Sinjang	Kecamatan Seluas, Siding	17.098
	- Hutan Lindung Lainnya	Kecamatan Lumar, Suti Semarang, Samalantan	228
2	Cagar alam (CA)		41.543
	- Cagar Alam Gunung Nyiut	Kecamatan Ledo, Tujuh Belas	111
		Kecamatan Monterado	514
		Kecamatan Monetarado	8
3			39.440
	- Taman Nasional Gunung Nyiut	Kecamatan Ledo, Seluas, Tujuh Belas, Suti Semarang, Siding	
4	Hutan Produksi		125.947
	- Hutan produksi terbatas (HPT)	Kecamatan Sungai Betung, Bengkulu, Lumar, Seluas, Jagoi Babang dan Siding	46.724
	- Hutan produksi (HP)	Kecamatan Monterado, Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkulu, Teriak, Lumar, Ledo, Suti Semarang dan Siding	63.554
	- Hutan Produksi Yang Dapat di Konfersi	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sanggau Ledo, Seluas dan Jagoi Babang	15.669
	-		241.578

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Tahun 2014-2024

e. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkayang cukup besar terutama di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang. Potensi perikanan laut baik berupa tangkapan maupun tambak cukup menjanjikan sepanjang tahun dari dua wilayah tersebut. Namun demikian di kecamatan lainnya juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan mengingat semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkayang dilewati oleh (Daerah Aliran Sungai) DAS besar dan kecil yang merupakan indikasi peluang pengembangan sektor perikanan darat (ikan air tawar) dengan cara tambak ikan.

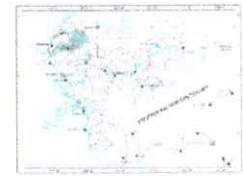
f. Potensi Perindustrian

Potensi agroforestry yang sangat menjanjikan tentunya memberikan peluang juga pada pengembangan sektor industri. Hal ini wajar mengingat ketersediaan bahan baku yang memiliki potensi dalam pengembangannya dan biaya produksi yang relatif kecil sebagai akibat dari efisiensi pembiayaan dari faktor transportasi tentunya menjadi pertimbangan yang positif untuk pengembangan pada sektor industri, terutama yang menggunakan bahan baku dari komoditas pertanian secara umum.

Fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai aktor utama dari pelaku sektor industri tentunya menjadi faktor utama yang perlu dipersiapkan, karena lambannya kegiatan industri di Kabupaten Bengkayang disebabkan oleh faktor industri yang berasal dari tenaga kerja, yaitu pengetahuan manajemen dan tingkat keahlian pada suatu produk industri. Secara ekonomi makro menjelaskan bahwa perkembangan sektor industri akan mempercepat perkembangan ekonomi suatu daerah jika dibandingkan eksploitasi sumberdaya alam, karena nilai



Lokasi

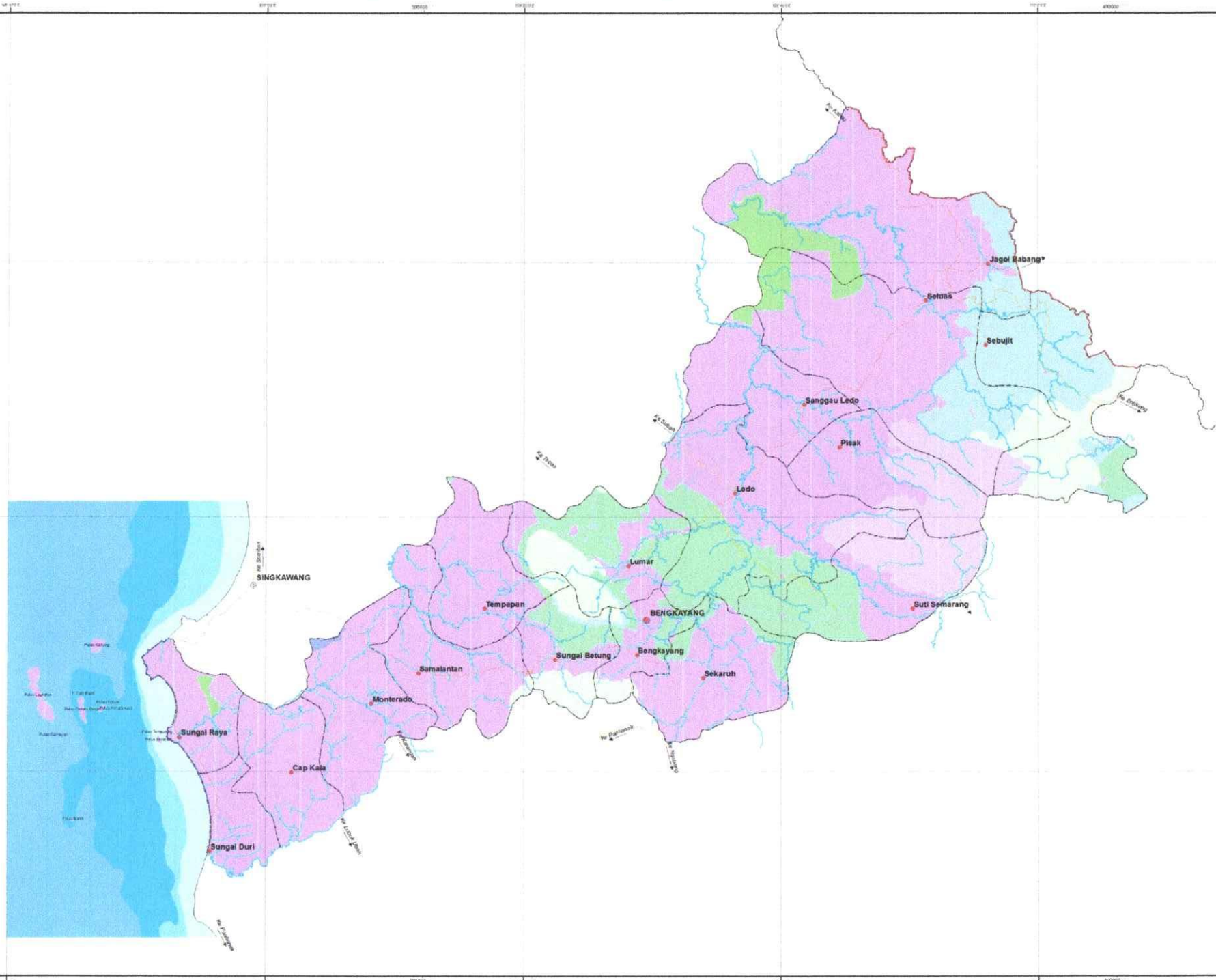


Keterangan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Sungai
- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Area Penggunaan Lainnya
- Tubuh Air
- Cagar Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Taman Nasional

Sumber Peta
- RTRW Kabupaten Bengkayang 2014-2034

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2017



tambah yang diperoleh dari industri yang merupakan kegiatan *off farm* relatif lebih tinggi dibandingkan kegiatan produksi lapangan dari segala sektor yang merupakan kegiatan *on farm*.

g. Potensi Pertambangan

Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Bengkayang sebagian besar masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Namun demikian hal ini menjadi indikator bahwa pertambangan merupakan sektor yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Hampir seluruh Kabupaten Bengkayang memiliki potensi bahan tambang emas yang tersebar di berbagai daerah, namun hanya sedikit perusahaan dan investor yang aktif dalam usaha pertambangan tersebut. Bahan tambang lainnya yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah Kaolin dan Mangan, disamping beberapa jenis bahan tambang lainnya yang tidak terlalu berpotensi sesuai data geologi dan BPS Kabupaten Bengkayang.

h. Potensi Pariwisata

Sebagai wilayah yang cukup besar memiliki kawasan hutan dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan terutama untuk wisata alam (Ecotourism). Kawasan gunung, air terjun, pantai, dan hutan primer yang menjadi pusat untuk wisata dan penelitian merupakan aset besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang. Namun demikian investasi yang diperlukan akan sangat besar untuk menjadikan potensi tersebut berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan bersifat ekonomis bagi daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang terpadu, manajemen pengelolaan yang optimal, penyediaan fasilitas (terutama sarana transportasi) serta investasi yang cukup besar untuk menjadikan potensi tersebut dapat

termanfaatkan dengan baik dengan tetap memperhatikan asas kelestarian dan sustainability.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan dan kemajuan pada perekonomian masyarakat. Pembangunan di Kabupaten Bengkayang pada Tahap Kedua RPJPD menuntut perhatian dan akselerasi yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dan merancang kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten Bengkayang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini merupakan efek dari kondisi fundamental makro yang mendukung, antara lain stabilitas politik dan demokrasi, dukungan dari dunia usaha, dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik sampai pada saat ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung pada peningkatan PDRB dan perkapita yang pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator kemajuan ekonomi adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar merupakan komoditas olahan. Lebih jelasnya untuk melihat Makro Ekonomi Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Makro Perekonomian Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2016

No.	Parameter	Satuan	2014	2015	2016
1.	PDRB ADHB	Juta Rupiah	5.565.536,8	6.153.043,14	6.730.080,5
2.	PDRB ADHK	Juta Rupiah	4.471.874,3	4.649.241,72	4.889.159,8
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,02*	3,96**	5,15**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2017

Keterangan : *)Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Semakin besar besar produk olahan dari suatu daerah maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal. Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan proporsional pada setiap sektor pembangunan masih terjadi peningkatan pada sektor skunder dan tersier yang belum signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai kurun waktu 2016, hal ini menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup Baik namun demikian persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian perlu ada perbaikan ke depan untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat

Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

Tabel 2.9

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
Sektor Primer	36,17	35,36	34,81
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	33,15	31,80	31,61
2. Pertambangan & Penggalian	3,02	3,15	3,20
Sektor Sekunder	20,56	21,09	21,03
3. Industri Pengolahan	9,87	9,94	9,89
4. Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,06
6. Bangunan/Konstruksi	10,60	11,22	11,07
Sektor Tersier	43,29	43,55	44,16
7. Perdagangan Besar dan Eceran	16,32	16,23	16,24
8. Transportasi dan Pergudangan	1,95	2,07	2,13
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,05	2,15	2,18
10. Informasi & Komunikasi	4,29	4,37	4,39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,77	2,80
12. Real Estate	3,64	3,64	3,60
13. Jasa Perusahaan	0,37	0,37	0,37
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,45	6,74	7,05
15. Jasa Pendidikan	2,86	2,85	2,81
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,81	1,76
17. Jasa Lainnya	0,81	0,82	0,81

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2017

b. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita merupakan salah satu parameter standar hidup layak sekaligus salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditinjau dari besar kecilnya pengeluaran masyarakat. Kabupaten Bengkayang memiliki rata-rata pengeluaran Perkapita dalam sebulan yang memiliki trend positif sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Namun pada tahun 2016 trend tersebut terhenti dengan terjadinya penurunan

angka pengeluaran perkapita yang relatif tinggi sebesar Rp 127.587, dimana tahun 2015 pengeluaran rata-rata sebesar Rp 953.906, namun ditahun 2016 turun hingga diangka Rp 826.319.

Tabel 2.10

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan di Kabupaten
Bengkayang pada Tahun 2014-2016

Kelompok Barang	2014 (Rp)		2015 (Rp)		2016 (Rp)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	461.018	60,11	563.454	59,09	503.883	60,98
Non Makanan	305.901	39,89	390.452	40,91	322.436	39,02
TOTAL	766.919	100	953.906	100	826.319	100

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2017

Dengan melihat data yang ada, dapat tergambar terjadinya penurunan pada pengeluaran perkapita Kabupaten Bengkayang baik pada kelompok barang makanan dan non makanan. menurunnya tingkat pengeluaran masyarakat tentunya erat hubungannya dengan tingkat pendapatan masyarakat didalam suatu kurun waktu tertentu. Oleh karenanya berdasarkan data tersebut dapat mengindikasikan juga bahwa telah terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat secara umum sehingga berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian, salah satunya kondisi riil yang terjadi hingga saat ini, bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk menyikapi ketidakstabilan/rendahnya harga komoditas pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi unggulan masyarakat dan mengambil langkah sebagai upaya mendongkrak pendapatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan tentunya akan

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan berefek pada kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar tingkat nasional. Fenomena ini diduga terjadi akibat kekuatan ekonomi rumah tangga sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang tergantung pada agroforestry yang memang memiliki potensi sumberdaya alamnya masih mampu mengimbangi perubahan-perubahan harga barang dan jasa non makanan yang terus meningkat.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Kemiskinan

kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses pada barang dan jasa, lokasi geografis, kesetaraan gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami terbatas pada keterbatasan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tidak mampu terjawab oleh kebijakan atau program pembangunan yang bersifat sektoral dan atau parsial, tetapi diperlukan pengambilan keputusan yang bersifat holistik, simultan, dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya meski dengan keterbatasan sumberdaya. Kajian dan perencanaan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi isu sentral dan permasalahan yang mendasar meskipun pada akhirnya tidak juga dapat menghindar dari beberapa pendekatan sektoral sebagai implikasi dari kondisi yang memang pada awalnya terdapat kesenjangan atau ketidakmerataan pada kondisi sosial.

Permasalahan kemiskinan erat korelasinya dengan penciptaan lapangan kerja, untuk itu dalam mengentaskan kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia, pemberdayaan potensi daerah dan lingkungan. Tentunya implementasi akan disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin secara parsial yang berimplikasi pada perbedaan program pembangunan.

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani komitmen dunia sebagai amat Millenium Development Goals (MDGs) untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Adapun delapan (8) buah sasaran pembangunan millenium tersebut adalah: 1) pengentasan kesmiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Hal ini sejalan dengan arahan RPJM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yang menitikberatkan pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai urusan bersama yang menjadi sangat prioritas.

Tingkat pengangguran Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 sebesar 3,74% dan pada tahun 2016 sebesar 2,40%, dengan demikian angka pengangguran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha dan peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan dan inflasi di Kabupaten Bengkayang.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, sekaligus mengakomodir salah satu sasaran yang tercatat dalam komitmen MGDs. Nilai IPM menjadi indikator penting mengingatkan di dalamnya mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan hidup layak. Angka ini mendeskripsikan pembangunan manusia Kabupaten Bengkayang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (kemampuan intelektual). Peningkatan pada IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); mengutamakan kemampuan intelektual (bidang pendidikan); dan mengarah pada kemampuan bersaing dalam hal ekonomi (bidang ekonomi). Berikut adalah gambaran IPM Kabupaten Bengkayang selama 3 Tahun terakhir.

Tabel 2.11

Gambaran IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2016

Variabel/Komponen	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (Thn)	72,89	72,99	73,01
Angka Harapan Lama Sekolah (Thn)	11,11	11,14	11,6
Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	5,97	5,98	6,08
Pengeluaran Perkapita (ribu Rp)	8.363	8.489	8.588
IPM	64,40	64,65	65,45

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2017

Indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan yang sebelumnya terdapat 3 Variabel, semenjak tahun 2014 menjadi 4 Variabel. Pada Tahun 2016 Angka IPM Kabupaten Bengkayang 65,45, artinya mengalami peningkatan 0,80 point dari Tahun 2015 yaitu 64,65. Jika dilihat dari perbandingan dari 14 Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Bengkayang berada peringkat ke 4 dari 14 Kabupaten/Kota, hanya berada di bawah Kota Pontinak, Kota Singkawang, kemudian Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan data, dari keempat komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkayang, setiap komponen dari tahun ketahun memberikan kontribusi yang positif terhadap kenaikan angka IPM Kabupaten Bengkayang. Hal ini memberikan gambaran bahwa disetiap tahun terdapat perbaikan Kualitas di bidang kesehatan, Pendidikan dan ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkayang, walaupun secara angka IPM Kabupaten Bengkayang relatif lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 yang mencapai angka 65,88.

Tentunya dengan melihat kondisi yang ada, dari empat komponen pembentuk IPM angka melek huruf, lama sekolah dan pengeluaran perkapita merupakan komponen yang berpeluang dapat dioptimalkan mengingat angka tersebut masih relatif rendah dan peluang untuk ditingkatkan masih sangat besar terutama pada komponen Pengeluaran Perkapita. Oleh karena itu, dengan gambaran yang ada Pemerintah Daerah juga harus tetap fokus untuk terus meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan dasar sebagai upaya mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan investasi jangka panjang dengan harapan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang ke depannya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional yang secara otomatis hal tersebut juga merupakan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan hal ini menjadi kewajiban Pemerintah mengingat pendidikan merupakan salah satu pntu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan, konsekuensi dari komitmen tersebut, maka setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa mengenal latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya 9 Tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Terjadinya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, faktor sanitasi, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan harusnya menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Bengkayang ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) sebagaimana tercantum dalam MDGs. Jika disederhanakan maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan ketika dalam kandungan maupun ketika baru lahir, kelengkapan imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalinan pertama. Meskipun pelayanan kesehatan masih terbatas, namun secara konsisten Pemerintah Kabupaten Bengkayang selalu mengadakan program pembangunan untuk meningkatkan bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan gratis untuk rakyat diwujudkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk, akte, pengurusan pajak, dan izin-izin usaha. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan terpadu.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satunya melalui pengembangan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional lainnya.

Standar pelayanan yang telah diterapkan serta dukungan sistem kerja berbasis elektronik telah memperlancar pelaksanaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sampai pada tahun 2015 tetap berjalan. Diharapkan pada tahun 2016 sebagian besar Keluarga di Kabupaten Bengkayang telah memiliki e-KTP dan KK mengingat proses pembuatan hal yang berkaitan dengan identitas kependudukan telah di gratiskan oleh Pemerintah.

4. Investasi

Iklm investasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban disamping potensi daerah dan informasi yang dipublikasi dengan baik. Kasus kejahatan dan kriminalitas yang

terjadi di Kabupaten Bengkayang terus meningkat dari tahun ke tahun namun demikian tidak pada tahap yang berpengaruh pada peluang iklim investasi karena kasus yang terjadi sebagian besar hanya kasus kecil. Sedangkan kasus gerakan massa atau demonstrasi, pemogokan kerja, kasus politik, dan kasus ekonomi dapat dikatakan tidak berpengaruh pada perekonomian daerah. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Bengkayang adalah dengan terlibat aktif dan dukungan dari banyak institusi dalam menjaga keamanan dan keteriban termasuk kemananan berinvestasi, di antaranya keterlibatan dan dukungan dari TNI AD, TNI AU, dan Kepolisian.

Sampai tahun 2014 investasi di Kabupaten Bengkayang masih didominasi oleh sektor primer, yaitu perkebunan skala besar dan pertambangan. Kedua jenis investasi tersebut terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini wajar mengingat potensi Kabupaten Bengkayang sangat besar untuk jenis investasi tersebut. Namun demikian perlu adanya kajian dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan jenis investasi yang masuk ke Kabupaten Bengkayang mengingat kedua investasi tersebut sangat rawan dengan permasalahan lingkungan hidup dan memiliki nilai tambah yang kecil jika dibandingkan investasi pada sektor sekunder atau tersier. Untuk itu fasilitasi dari pemerintah daerah dalam bentuk penelitian, pengolahan data dan informasi, dan publikasi yang berkualitas sangat diperlukan agar mampu mengundang investor dengan memberikan peluang dan potensi investasi pada sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur dan peluang lapangan kerja serta peluang peningkatan taraf hidup masyarakat Bengkayang akan terbuka lebar.

Investasi erat kaitannya dengan pemasaran produk hasil produksi, baik skala regional, nasional, maupun internasional. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara lain (Malaysia), Kabupaten Bengkayang tentunya memiliki peluang investasi bagi banyak investor jika dan

hanya jika ada kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perdagangan di wilayah perbatasan. Namun perlu menjadi perhatian juga, bahwa keberadaan wilayah perbatasan tidak hanya sebagai keunggulan komparatif tetapi sekaligus sebagai ancaman yang cukup potensi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang jika tidak dikelola dengan baik dan penegakan hukum (*Law enforcement*) yang kurang tegas.

5. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata memegang peranan yang penting, karena implikasi yang dimunculkan dari pembangunan sektor tersebut tidak hanya sebagai penggerak perekonomian tetapi juga akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pada masyarakat. Namun demikian keberhasilan dari pembangunan pariwisata tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang terpadu mengingat keterbatasan sektor lain yang jika tidak diperhatikan akan menghambat keberhasilan pada pembangunan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak terutama pihak swasta untuk melakukan investasi pada pembangunan sektor tersebut. Sedangkan pihak pemerintah harus mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar pihak investor berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang aksesnya masih sangat terbatas pada potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Kabupaten Bengkayang yang geomorfologinya terdiri dari wilayah pegunungan, dataran, serta pesisir memiliki banyak potensi tempa wisata alam seperti pantai, gunung, taman nasional, dan air terjun. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk pengembangan pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah sekaligus memberikan efek positif pada pendapatan masyarakat terutama yang berada di sekitar objek wisata. Pengembangan pariwisata alam tersebut dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata,

pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju objek wisata.

6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2015 penduduk usia 15 Tahun ke atas angka Angkatan Kerja mencapai 126.452 yang bekerja sebanyak 122.452 orang dan Pengangguran Terbuka sebanyak 3.979 orang. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 77,67 dan Tingkat Pengangguran Terbuka 3.15. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut 90.426 bekerja disektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan, 11.015 bekerja disektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi. Hal ini wajar mengingat sektor yang dominan berkembang di Kabupaten Bengkayang adalah sektor primer yang bergerak pada bidang agrikultur dan pertambangan, sedangkan sektor sekunder dan tersier masih sangat kecil. Selanjutnya dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 15 Tahun ke atas yang bekerja adalah berstatus bekerja tidak dibayar, berusaha sendiri, buruh/karyawan, pegawai, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 adalah sebanyak 83 orang, yang terdiri dari 83 laki-laki dan 98 perempuan. Hal ini jauh menurun dari tahun 2014 adalah sebanyak 570 orang, yang terdiri dari 244 laki-laki dan 326 perempuan. Jumlah pencari kerja terbanyak dari jumlah tersebut adalah berasal dari Kecamatan Bengkayang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pencari kerja tersebut didominasi oleh lulusan Sarjana.

7. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bengkayang sangat besar baik dikembangkan secara intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi. Potensi tersebut tersebar pada hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Lahan yang masih sangat luas dan belum dikelola secara optimal dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman yang produktif merupakan sumberdaya yang cukup sebagai modal dasar dalam mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utama dalam keluarga.

Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Bengkayang cukup bervariasi yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, hortikultura, ubi kayu, dan kacang tanah); perkebunan (karet, sawit, lada, dan kakao); kehutanan (hasil hutan non kayu: rotan dan kayu gaharu buaya); dan perikanan (laut dan darat). Komoditas tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Bengkayang. Dengan pengembangan yang intensif disertai dengan dukungan inovasi secara teknologi maka diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tidak hanya pada sektor primer tetapi menciptakan produksi pada sektor sekunder berupa industri pangan yang tentunya akan meningkatkan nilai tambah yang diperoleh masyarakat (petani/nelayan).

Pada tahun 2015 produksi tanaman pangan Kabupaten Bengkayang beberapa komoditas mengalami penurunan dan peningkatan yang meliputi produksi padi sebesar 80.392 Ton mengalami penurunan dari tahun 2014 dengan jumlah produksi padi sebesar 124. 157 Ton, produksi jagung sebesar 77. 482 Ton mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 103. 855 Ton, ubi kayu sebesar 40. 731 Ton mengalami peningkatan yang produksi sebelumnya 38. 292 Ton, dan kacang tanah 245, 20 Ton menurun dari tahun 2014 dengan produksi 274, 82 Ton. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (tanaman sayuran) didominasi oleh tanaman ketimun yang

mencapai 12.683 Ton dan tanaman kacang panjang dengan angka produksi 10.198 Ton.

Produksi tanaman perkebunan terbesar Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2015 adalah tanaman sawit yaitu sebesar 74.618 Ton, yang diikuti oleh tanaman karet yang mencapai 23.073 Ton. Sedangkan tanaman kelapa dalam/coconut dan lada masing-masing mencapai angka produksi sebesar 2.613 Ton dan 1.293 Ton. Tanaman sawit sebagian besar merupakan hasil dari perusahaan swasta sedangkan tanaman karet, kelapa dalam dan lada hampir semuanya berasal dari usaha tani masyarakat.

Sektor perikanan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 menghasilkan 5 jenis komoditas baik dari perikanan laut maupun darat, yaitu hasil tangkapan laut, tangkapan perairan umum, budidaya kolam, keramba dan tambak udang atau bandeng. Adapun produksi untuk masing-masing komoditas meliputi tangkapan laut sebesar 1.357,9 Ton, tangkapan perairan umum sebesar 398,38 Ton, hasil budidaya kolam sebesar 1.111,87 Ton, hasil dari keramba sebesar 68,90 Ton dan hasil budidaya udang atau bandeng sebesar 962,32 Ton.

Potensi pertanian secara umum yang tersebut di atas menjelaskan bahwa sumberdaya alam Kabupaten Bengkayang sangat besar. Pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada peningkatan sektor primer menjadi produksi sektor sekunder tentunya akan memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu iklim investasi dan diversifikasi produk pertanian yang disertai dengan kajian dan ilmu teknologi merupakan hal yang esensi dalam membangun sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang.

8. Industri

Industri merupakan sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkayang, karena disamping

Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumberdaya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Bengkayang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat didukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan.

4. Ketersediaan Lembaga Keuangan

Ketersediaan bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Untuk kepentingan tersebut, Kabupaten Bengkayang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah dan swasta (Bank Danamon, BRI, BNI' 46, Bank KALBAR, dan Bank Mandiri) meskipun belum tersedia di semua kecamatan. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang memiliki hubungan kerjasama dengan Bank Kalbar yang berfungsi dalam memperlancar lalu lintas keuangan daerah.

Kelembagaan keuangan selain bank yang berpotensi dalam membantu perekonomian masyarakat dalam hal perkreditan adalah terdapatnya beberapa Credit Union (CU) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Keberadaan kelembagaan CU sangat penting dan terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada sektor primer di Kabupaten Bengkayang, mengingat nasabah kelembagaan tersebut didominasi oleh masyarakat pelaku sektor agrikultural. Hal ini

terlihat dari kelancaran proses simpan pinjam dan tingginya lalu lintas keuangan kelembagaan tersebut serta perkembangan jumlah nasabah yang terdaftar.

5. Ketersediaan Sumber Air

Sumber air bersih yang melimpah di Kabupaten Bengkayang tersebar merata di seluruh Kecamatan merupakan salah satu modal dasar dalam memperkokoh perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kondisi geomorfologi dan kawasan hutan yang sangat luas telah menyediakan sumber air yang cukup besar bagi Kabupaten Bengkayang. Ketersediaan sumber air ini sangat penting baik kebutuhan rumah tangga, kegiatan perekonomian sektor primer, maupun pada sektor industri. Pemanfaatan sumber air yang tepat tidak hanya memberi peluang dalam mendukung efisiensi kegiatan perekonomian tetapi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan.

Ketersediaan sumber air yang melimpah dan sepanjang tahun sangat membantu dalam proses produksi pertanian masyarakat, sehingga peluang untuk terjadinya gagal panen sangat kecil. Kabupaten Bengkayang yang dulunya menggunakan layanan air bersih dari Kabupaten Lain (Kabupaten Sambas), sekarang telah memiliki PDAM sendiri dalam bentuk BUMD. Beberapa usaha kecil juga telah memanfaatkan potensi sumber air tersebut sebagai usaha penyediaan air minum. Pada tahun 2012 pemanfaatan sumber air sudah mengarah pada sumber tenaga listrik portable yaitu PLMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) yang merupakan solusi keterbatasan jaringan listrik pada beberapa daerah terpencil di Kabupaten Bengkayang.

Potensi ketersediaan air di Kabupaten Bengkayang sangat besar dan memiliki peranan yang besar dalam kegiatan perekonomian, dan hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam memperkokoh pembangunan perekonomian Kabupaten di masa yang akan datang. Hal yang perlu diingat bahwa ketersediaan air tersebut perlu dijaga kelestariannya, mengingat modal dasar tersebut bisa saja menjadi langka apabila

pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan alam sebagai penyedia sumberdaya tersebut. Jika terjadi pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol untuk pertambangan dan perkebunan skala besar, maka kawasan hutan yang menjadi penyangga sumber air akan rusak, akibatnya sumber air akan hilang bahkan dapat berakibat yang lebih buruk yaitu terjadinya bencana alam.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang cukup mendukung perbaikan ekonomi secara nasional tentunya berpotensi pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik secara regional. Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang secara umum masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan, yaitu perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tren penurunan tingkat kemiskinan dan tren penurunan tingkat pengangguran.

Prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang berbeda nyata dari tahun sebelumnya, namun tetap diusahakan agar mengalami peningkatan yang signifikan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tersebut tidak semata-mata sekedar pada angka PDRB nya saja namun diharapkan memiliki pengaruh positif pada seluruh aspek penting perekonomian di Kabupaten Bengkayang, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan di dalam masyarakat serta kesenjangan pembangunan wilayah kecamatan;
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya mengurangi angka pengangguran;
- d. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal/pedalaman dan

secara sektoral adalah upaya pencapaian dari sasaran IPM dan SDGs.

Memperhatikan peluang dan sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018, maka untuk mewujudkan hal tersebut maka kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Bengkayang diarahkan pada:

- 1) mendorong peningkatan dan perluasan sektor andalan pertanian dalam arti luas yaitu: pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata;
- 2) peningkatan infrastruktur terutama jalan, jembatan, irigasi, gedung-gedung dan sarana prasarana perdagangan dan pariwisata;
- 3) memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai pilar perekonomian daerah;
- 4) meningkatkan upaya promosi investasi; dan
- 5) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah perbatasan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2009 mengalami peningkatan walaupun cenderung turun ditahun 2014, akan tetapi pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Bengkayang mulai meningkat dan berada pada angka 5,15. Walaupun hal tersebut masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada pada angka 5,22.

Melihat kondisi tersebut maka dapat dilihat juga bahwa PDRB Kabupaten Bengkayang atas harga berlaku memiliki trend yang positif dan hal ini mengindikasikan terjadi penguatan stabilitas perekonomian regional.

Sektor pertanian secara umum masih memiliki kontribusi terbesar pada PDRB yaitu sekitar 31,61% dari total PDRB tahun 2016, walaupun secara trend mengalami penurunan, akan tetapi

hal itu akan menunjukkan nilai positif jika kontribusi bergeser pada peningkatan nilai tambah pada sektor sekunder dan tersier.

3.1.2 Isu Strategis 2018

Di tahun 2017 dan 2018 perekonomian global diperkirakan meningkat namun masih pada taraf relatif melemah. Beberapa isu strategis utama tahun 2018 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Kondisi perekonomian global 2018 diperkirakan sedikit meningkat, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%. Sektor konsumsi dan investasi di proyeksi masih menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Beberapa faktor yang diharapkan mampu mendorong tercapainya asumsi tersebut yaitu :
 - ✓ Perkiraan perbaikan ekonomi domestik serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang diharapkan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga.
 - ✓ Kinerja konsumsi pemerintah yang semakin baik sejalan dengan kebijakan anggaran belanja yang lebih efisien dengan menerapkan money follow program prioritas.
 - ✓ Kinerja Pembentukan modal tetap bruto (PMBT) didukung oleh perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang juga memanfaatkan skema kerjasama pemerintah-swasta.
2. Kebijakan Nasional yang mengarah pada percepatan pemenuhan ketersediaan Infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Dimana Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman,

pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

3. Isu berskala regional Kalimantan Barat antara lain:
 - a) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian secara umum;
 - b) perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
 - c) industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja;
 - d) percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jaringan listrik;
 - e) peningkatan investasi daerah; dan
 - f) peningkatan kualitas SDM.

Dari isu berskala global dan regional yang telah diuraikan diatas, diantaranya memberikan dampak pada daerah, khususnya di Kabupaten Bengkayang, sehingga timbul isu-isu di daerah. Adapun Isu Strategis Daerah di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Terkait Infrastruktur Kabupaten Bengkayang;
 - Keterbatasan infrastruktur baik dalam hal kualitas dan kuantitas berpengaruh pada kurang optimalnya implementasi program kegiatan yang direncanakan, baik pada pelaksanaan maupun outcome yang dihasilkan.
 - Fungsi koordinasi merupakan hal yang esensi pada perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien demi terciptanya pembangunan yang terpadu.
- b. Terkait dengan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
 - Keterbatasan sumberdaya berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bengkayang, mengingat masih terdapat beberapa daerah yang kekurangan sarana dan

prasarana serta tenaga fungsional bidang kesehatan dan pendidikan

c. Terkait dengan Kategori Wilayah

- Kabupaten Bengkayang memiliki beberapa daerah yang termasuk dalam kategori khusus, diantaranya termasuk dalam wilayah perbatasan, daerah tertinggal, pesisir, terpencil dan kepulauan terluar.
- Manajemen perencanaan tentunya sangat diperlukan untuk mengakomodir kondisi tersebut mengingat kondisi penganggaran Kabupaten Bengkayang yang sangat terbatas.

d. Pendapatan Per kapita dan Perekonomian Masyarakat

- Sebagian besar masyarakat kabupaten Bengkayang masih mengandalkan sektor primer berupa pertanian , perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebagai penghasil utama.
- Sebagian besar pemanfaatan sumber daya sektor primer tersebut masih bersifat pemanfaatan bahan baku yang memiliki nilai tambah yang kecil.
- Resesi perekonomian global sangat berpengaruh pada fluktuasi harga produk yang berasal dari sektor primer pada akhirnya berpengaruh sangat besar pada pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkayang secara makro.

e. Potensi dan Frekwensi Bencana Alam

- Terjadinya perubahan iklim dan komposisi penutupan lahan di Kabupaten Bengkayang telah mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Kabupaten Bengkayang
- Dalam beberapa tahun terakhir frekwensi kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan.

f. Pembiayaan Pembangunan

- Sumber pendapatan APBD Kabupaten Bengkayang terus mengalami peningkatan.
- Namun demikian trend peningkatan pada Belanja Tak Langsung lebih tinggi daripada peningkatan APBD, sehingga alokasi penganggaran untuk belanja langsung justru mengalami penurunan.
- Pendapatan APBD yang bersumber dari PAD masih sangat kecil kontribusinya dibandingkan yang bersumber dari dana perimbangan, meskipun setiap tahun PAD Kabupaten Bengkayang meningkat tetapi belum signifikan dibandingkan pembiayaan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

3.1.3 Analisis Lingkungan (SWOT)

Untuk mempertajam arah kebijakan perekonomian dan ketepatan dalam menentukan suatu prioritas pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan yang selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan pendekatan Kekuatan, Kelamahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) yang secara detailnya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*)
 - a. Letak geografis yang strategis
 - b. Memiliki geomorfologi yang cukup lengkap dari pegunungan, bukit, dataran, dan pesisir
 - c. Memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain (Malaysia), sekaligus daerah perbatasan darat yang paling dekat jaraknya dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat jika dibandingkan daerah perbatasan Kabupaten Lainnya.
 - d. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan skala besar yang cukup banyak (perkebunan kelapa sawit)

- e. Memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- f. Memiliki potensi ekowisata yang sangat besar dan masih alami
- g. Memiliki kawasan taman nasional dan hutan lindung yang relatif luas.
- h. Memiliki sumber energi alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan sumber kebutuhan dasar akan sumber air.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Produktivitas hasil sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang belum optimal
- b. Potensi ekowisata yang masih belum dimanfaatkan secara optimal
- c. Kondisi infrastruktur jalan/jembatan masih masih terbatas pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkayang berimplikasi kurang optimalnya kegiatan perekonomian daerah dan kurang berakibat juga pada terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- d. Kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas secara pendidikan formal dan masih banyak angkatan kerja yang belum memiliki ketrampilan dan keahlian untuk profesionalisme kerja
- e. Sebagian besar usaha perekonomian rakyat masih pada eksplotasi alam dan penyediaan bahan baku (on farm), dan yang bergerak pada bidang industri hilir masih sangat minim. Pada akhirnya perekonomian masyarakat masih memiliki nilai tambah yang kecil.
- f. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih relatif rendah.

- g. Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sebagian besar masih belum mengarah pada pemanfaatan yang berkelanjutan (sustainability).
 - h. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembenahan pada sanitasi lingkungan masih kurang.
 - i. Terdapat beberapa kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor.
 - j. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peluang masuknya investasi.
3. Peluang (*Opportunity*)
- a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan
 - b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakarya/perumahan rakyat dan energi
 - c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal
 - d. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah
 - e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas perbantuan dan bantuan dari lembaga lain.
 - f. Adanya kebijakan nasional yang memprioritaskan pembangunan daerah yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara lain dengan mengarahkan perbatasan sebagai beranda depan negara

g. Adanya kegiatan perdagangan tradisional antara dua negara yang berbatasan di daerah perbatasan, dengan pengelolaan yang efektif hal ini tentu menjadi peluang besar bagi perekonomian daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang terutama masyarakat yang tinggal di perbatasan.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan ancaman sekaligus tantang untuk terus kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing
- b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang masih terasa dampaknya sampai saat ini berdampak pada perekonomian secara nasional dan daerah. Hal ini perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian domestik dan penguatan ketahanan pangan masyarakat
- c. Aktivitas perekonomian masyarakat dan kelembagaan ekonomi lainnya yang terus menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup perlu ditangani dengan tegas agar tidak menjadi penyebab kerugian di masa depan dan menjadi halangan dalam menciptakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
- d. Masih terdapat beberapa daerah yang tertinggal dan terisolasi karena terbatasnya sarana infrastruktur merupakan kondisi yang berpeluang menimbulkan konflik horizontal. Untuk itu peningkatan aksesibilitas beberapa daerah merupakan program yang memiliki prioritas tinggi di Kabupaten Bengkayang.
- e. Daerah perbatasan merupakan kekuatan sekaligus ancaman bagi Kabupaten Bengkayang, mengingat aktivitas perekonomian masyarakat yang terjadi di kawasan perbatasan sangat memungkinkan terjadinya beberapa aktivitas yang bersifat ilegal yang secara regional akan sangat merugikan Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan hal tersebut tata kelola yang efektif diperlukan bagi pengelolaan dan pembangunan di kawasan perbatasan.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2018-2019

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2018-2019 diperkirakan sebagai berikut:

1. Semakin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal akan berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan produksi dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah.
2. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan tentunya berdampak pada kurang optimalnya pengembangan investasi baik pada industri maupun pariwisata.
3. Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan dan keahlian angkatan kerja merupakan salah satu variabel penghambat dalam meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor sekunder dan tersier.
4. Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran.
5. Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
6. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
7. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Bengkayang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang

Sektor Ekonomi	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
Sektor Primer	36,17	35,36	34,81
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	33,15	31,80	31,61
2. Pertambangan & Penggalian	3,02	3,15	3,20
Sektor Sekunder	20,56	21,09	21,03
3. Industri Pengolahan	9,87	9,94	9,89
4. Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,06
6. Bangunan/Konstruksi	10,60	11,22	11,07
Sektor Tersier	43,29	43,55	44,16
7. Perdagangan Besar dan Eceran	16,32	16,23	16,24
8. Transportasi dan Pergudangan	1,95	2,07	2,13
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,05	2,15	2,18
10. Informasi & Komunikasi	4,29	4,37	4,39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,77	2,80
12. Real Estate	3,64	3,64	3,60
13. Jasa Perusahaan	0,37	0,37	0,37
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,45	6,74	7,05
15. Jasa Pendidikan	2,86	2,85	2,81
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,81	1,76
17. Jasa Lainnya	0,81	0,82	0,81

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

1. mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

2. mengoptimalkan kinerja BUMD dalam memberikan pelayanan publik sehingga berpengaruh positif pada pendapatan daerah secara langsung maupun tidak langsung;
3. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
4. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang:

Tabel 3.2

Realisasi, Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2016 s/d Tahun 2019

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Target 2018	Proyeksi 2019
		2016	2017		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.051.895.262.951,43	1.048.539.070.914	999.438.259.000	1.012.963.443.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	42.677.133.440,01	27.822.753.280,40	52.614.675.000	56.000.000.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.943.291.892,93	15.378.189.950,75	15.007.500.000	16.500.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.088.782.791,84	3.574.384.024,35	3.712.150.000	4.500.000.000
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.879.512.292,00	3.048.472.685,00	3.800.000.000	4.000.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	27.765.546.463,24	5.821.706.620,30	30.095.025.000	31.000.000.000
1.2	Dana Perimbangan	803.484.699.292,00	889.752.921.023	788.375.737.000	789.615.596.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ bukan Pajak	32.773.038.773,00	25.897.765.259	23.760.141.000	25.000.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	577.263.911.000,00	578.240.869.000	581.274.511.000	581.274.511.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	193.447.749.519,00	285.614.286.764	183.341.085.000	183.341.085.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	206.733.430.214,42	130.963.396.611	158.447.847.000	167.347.847.000
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.185.876.442,00	34.224.635.611	21.100.000.000	30.000.000.000
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.095.452.000,00	96.738.761.000	92.347.847.000	92.347.847.000
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	6.738.720.000,00	0	0	0
1.3.4	Pendapatan Lainnya	86.713.381.772,42	0	0	0

1.3.6	Hibah	0	0	45.000.000.000	45.000.000.000
-------	-------	---	---	----------------	----------------

Ket : * Data belum tersedia sehingga masih menggunakan angka proyeksi

Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah 2 tahun sebelumnya, maka dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yang sederhana dalam memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2019. Proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kabupaten Bengkayang diasumsikan akan mengalami perubahan, hal ini melihat perkembangan ataupun realisasi yang terjadi dan juga berdasarkan aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Untuk pendapatan dari sisi pajak daerah mengalami kenaikan 9,95% dan dari sisi retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 21,22%, Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan tetap naik sebesar 3,01%.

Sumber yang akan diproyeksi meningkat dengan menggunakan pendekatan trend 3 tahun sebelumnya, yaitu dana perimbangan yang berasal dari dana DBH. Dana DAU dan DAK diproyeksikan tetap dan dana DBH meningkat sebesar 5,22%.

Ditahun 2019, untuk bantuan keuangan dari Provinsi tetap tidak dimunculkan didalam proyeksi, karena alokasi dana ini sifatnya fluktuatif sehingga diambil langkah untuk mengantisipasi kesalahan dalam melakukan proyeksi dana tersebut akan dimunculkan dan disesuaikan dalam struktur APBD 2019 setelah ada surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta untuk keperluan operasional (Rutin Kantor)
2. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membiayai urusan pemeritahan dengan mengutamakan bidang infrastruktur dan kesehatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
5. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
6. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
7. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan

salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon, dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bengkayang:

Tabel 3.3

Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2019

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Plafon 2018	Proyeksi 2019
		2016	2017*		
1	2	3	4	5	7
2	BELANJA	1.103.426.346.664,76	1.046.954.509.336	1.175.088.259.000	1.022.963.443.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	505.441.156.057,00	50.013.500.000	602.233.235.000	561.003.829.914
2.1.1	Belanja Pegawai	5.054.411.560,57	12.800.000.000	406.922.191.804	371.098.464.818
2.1.2	Belanja Bunga	0	4.073.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi	0	2.900.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	16.058.451.425,00	30.240.500.000	9.445.400.000	10.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.633.170.833,00	879.755.111.000	27.312.299.000	20.000.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	0	28.022.484.000	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	121.026.988.523,00	578.240.869.000	155.453.344.196	155.805.365.096
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.438.166.662,00	273.491.758.000	2.000.000.000	3.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	597.985.190.607,76	117.185.898.336	572.855.024.000	461.959.613.086
2.2.1	Belanja Pegawai	60.088.892.743,49	20.447.137.336	48.794.941.940	42.374.241.051
2.2.2	Belanja Barang	198.387.130.542,68	96.738.761.000	191.370.114.285	169.000.000.000
2.2.3	Belanja Modal	339.509.167.321,59	0	332.689.967.775	250.585.372.035

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja ditahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 didalam struktur APBD diperoleh tambahan penerimaan daerah dari sisi pembiayaan berupa pinjaman daerah, sehingga secara porsi belanja pada APBD 2018

terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2019.

Walaupun didalam struktur APBD 2018 ditargetkan adanya penerimaan daerah dari sisi pinjaman, akan tetapi didalam rancangan perencanaan inidan proyeksi belanja serta pembiayaan ditahun 2019, unsur tersebut belum secara langsung diakomodir, mengingat belum ada kepastian didalam realisasinya.

Pada belanja tidak langsung, beberapa item belanja diproyeksikan meningkat di tahun 2019. Berdasarkan trend realisasi belanja pegawai tahun 2016 dan 2017 serta proyeksi atas informasi yang diperoleh pada tahun 2018, maka ditahun 2019 diproyeksikan akan terjadi peningkatan pada belanja pegawai. Adapun alokasi belanja tidak langsung pada sektor belanja bantuan sosial, ditahun 2019 diproyeksikan menurun. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengefisiensikan anggaran yang terbatas dan difokuskan untuk mendorong program-program pembangunan yang menjadi target kinerja dari RPJMD Kabupaten. Pada belanja tidak langsung di item hibah, tetap diproyeksikan sedikit meningkat dan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes diproyeksikan juga sedikit mengalami peningkatan dan akan disesuaikan ketika telah terdapat informasi keuangan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp. **1.022.963.443.000**. Sedangkan total dari belanja langsung Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

No.	Uraian Belanja Langsung	Angka Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	42.374.241.051

2	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000.000
3	Belanja Modal	250.585.372.035
Total		461.959.613.086

Sumber: Analisis Bappeda 2018

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran SILPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil berdasarkan ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Ddaerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan maningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas. Untuk itu strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau SILPA tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja;
3. Apabila SILPA tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang;

Tabel 3.5

Realisasi, Rencana, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2019

No.	Uraian Pendanaan	Realisasi		Rencana 2018	Proyeksi 2019
		2016	2017*		
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN	98.937.477.036,45	56.740.169.384	175.650.000.000	10.000.000.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	98.369.108.936,45	43.550.000.000	220.000.000.000	10.000.000.000
3.1.1	Penggunaan SILPA	98.369.108.936,45	43.550.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah		54.198.483.875	200.000.000.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.731.631.900,00	10.000.000.000	44.350.000.000,00	0
3.2.2	Penyertaan Modal	875.000.000,00	44.198.483.875	7.500.000.000,00	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	856.631.900,00	54.198.483.875	36.850.000.000,00	0
	Pengeluaran Pembiayaan	96.637.477.036,45	(10.648.483.875)	44.350.000.000,00	0
	Pembiayaan Netto	51.531.083.713,33	0	175.650.000.000	10.000.000.000
	SILPA Tahun Berkenaan	45.106.393.323,12	56.740.169.384	0	0

Ket : * Data belum tersedia sehingga masih menggunakan angka proyeksi

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah perlu adanya keselarasan baik antara dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini mulai dari dokumen Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Oleh karenanya dalam penyusunan RKPD selalu mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah daerah.

Pada tahun 2019, Kabupaten Bengkayang akan memasuki tahun ketiga dari periode RPJPD yang telah ditetapkan. Didalam Periode Ke-3 RPJPD Kabupaten Bengkayang 2005-2025 rencana pembangunan diarahkan pada pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan kepada penciptaan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan professional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan RPJPD pada periode ini ditekankan pada 6 (enam) aspek, yaitu :

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
2. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan kabupaten Bengkayang
3. Penerapan teknologi tepat guna diberbagai sector-sektor produksi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
4. Pembangunan prasarana dan sarana yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi daerah khususnya dikawasan perbatasan
5. Pembangunan prilaku hidup sehat yang dewasa dan mandiri

6. Penataan dan pembenahan manajemen pengelolaan potensi objek-objek wisata.

Melihat arah kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJPD Periode ke-3 tersebut, maka sebagai langkah selanjutnya perlu dilakukan sinkronisasi juga terhadap Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang telah menetapkan sasaran Pembangunan, indikator serta target yang harus dilakukan dan dicapai Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019.

Indikator dan Target yang telah ditetapkan didasarkan atas sasaran pembangunan yang akan dicapai pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun pelaksanaan dengan memperhatikan capaian dari target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya sehingga evaluasi dari setiap dokumen dokumen perencanaan yang telah disusun perlu dilakukan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 adalah ***“Pembangunan Berorientasi pada Pemerataan Pelayanan Sosial Dasar”***.

Tema yang telah ditetapkan merupakan sebuah gambaran umum arah pembangunan yang harus dilaksanakan dan telah menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang dan hal tersebut akan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

MISI, TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
MISI I : Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi				
Membangun Perekonomian Kabupaten Bengkayang yang Kuat	Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkayang	Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah (juta)	16.500
		Penerimaan retribusi Daerah	Rupiah (Juta)	4.500
	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat PDRB Harga Konstan	Rupiah (Milyar)	5.500
		Tingkat PDRB Harga Pasar	Rupiah (Milyar)	7.500
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lapangan Pekerjaan Baru	Jumlah	500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
Mengoptimalkan Sektor Perekonomian masyarakat	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran/kapita	Rupiah	930.000
	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan Daerah	Produksi Karet/Tahun	Ton	23.000
		Produksi Lada/Tahun	Ton	1.470
		Produksi Sawit/Tahun	Ton	127.000
		Produksi Ikan Tangkap/Tahun	Ton	2.200
		Produksi Ikan Darat/Tahun	Ton	3.700
	Berkembangnya Sektor Pariwisata Daerah	Jumlah Destinasi Wisata	Jumlah	5
		Wisatawan Domestik	Orang	360.000
		Wisatawan Mancanegara	Orang	1.750

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
Meningkatnya Nilai Tambah Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Berkembangnya Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM	Unit	200
		Koperasi Aktif	%	75,00
	Meningkatnya perekonomian pada sektor sekunder dan tersier	Kontribusi Sektor Sekunder pada PDRB	%	15,00
		Kontribusi Sektor Tersier pada PDRB	%	57,00
Menyediakan Infrastruktur dan Sarpras Pendukung Perekonomian Masyarakat dan Regional	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Bertambahnya ruas jalan dalam kondisi baik	KM	60
	Terwujudnya sistem transportasi publik yang representatif bagi aktivitas perekonomian masyarakat	Bertambahnya jumlah terminal Tipe C	Unit	1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Ketersediaan Fasilitas Uji KIR angkutan umum	Ada/tidak	ada
		Jumlah laka lantas	kasus	<75
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pemukiman	Luas kawasan pemukiman kumuh	Ha	90,00
	Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	Desa yang memiliki akses listrik	%	77,41
		Rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	45,00
MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi				
Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya standar pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Penduduk melek huruf	%	94,00
		Guru yang berkualifikasi S-1/D-IV	%	92,00
		Rasio guru terhadap 1000 murid SD/ sederajat	Skala	17,00
		Rasio guru terhadap 1000 murid SMP/ sederajat	Skala	13,75
		Rasio guru terhadap 1000 murid SMA/ sederajat	Skala	11,75
		Bangunan Sekolah SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	>50,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
<i>Mewujudkan toleransi dan pembinaan antar umat beragama</i>	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Konflik horizontal akibat SARA	Kasus	Tidak ada
	Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	Tingkat pemahaman dan pengamalan masing-masing agama dan kepercayaan	Nilai	baik
		Tingkat toleransi antar umat beragama dan kepercayaan	Nilai	baik
<i>Mewujudkan kualitas hidup sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing</i>	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan Kemiskinan	Jumlah beasiswa utusan daerah	Jumlah	150
		Tingkat pemberdayaan melalui pembinaan dan diklat	Skala	baik
		Angka kemiskinan	Jiwa	10.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase PMKS yang terlayani	%	50,00
	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala (%)	65,35
		Partisipasi wanita dibidang birokrasi	%	>30,00
		Partisipasi wanita dibidang politik	%	>15,00
	Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	<5
MISI 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat				
Mewujudkan kehidupan masyarakat aman dan kondusif	Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	jumlah	<50
		Konflik yang terjadi	kasus	Tidak ada

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan produk hukum	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	Frekwensi program sosialisasi Perda	%	>50,00
	Meningkatnya penegakkan perda	Cakupan Penegakkan Perda	%	>75,00
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	Rasio jumlah anggota Linmas per 1000 penduduk	Skala	3,00
		Jumlah aktivitas demo	jumlah	<5
MISI 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang				
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Status RSUD	Tipe	C
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Unit	3
		Angka Kematian Bayi	Rasio	<25,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Angka Kematian Ibu	Rasio	<5,00
		Balita Penderita Gizi buruk	Rasio	<1,00
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka harapan Hidup	Tahun	75,00
		Jumlah Kasus DBD	Kasus	<10
		Jumlah kasus Penyakit Menular	Kasus	0
		Peserta KB Aktif	%	90,00
Menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan merata di seluruh wilayah	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	Jumlah Posyandu	Unit	380
		Jumlah Pustu	Unit	90
		Jumlah Puskesmas	Unit	17
		Jumlah RSU	Unit	2
		Jumlah Dokter	Orang	>25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Jumlah Bidan	Orang	>200
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat	Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Rumah Tangga yang memiliki jamban keluarga	%	>75
		Rumah Tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat	%	>75
MISI 5 : Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan				
Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Berkembangnya organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	jumlah	>5
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masy	Jumlah kegiatan kepemudaan	jumlah	>10

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
	Meningkatnya peran generasi muda pada prog. budaya & olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	jumlah	>5
		Jumlah kelembagaan seni dan budaya yang terbentuk	jumlah	100
		Jumlah kelembagaan seni budaya yang terlibat dalam even daerah dan nasional	jumlah	>20
<i>Meningkatkan kesadaran masyarakat pada fungsi dan peran organisasi politik</i>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Tingkat partisipasi pada pemilu legislatif	%	>90,00
		Tingkat partisipasi pada pemilu kepala daerah	%	67,57

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
MISI 6 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani				
Meningkatkan Kinerja perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya dokumen RPJPD	Ada/tidak	ada
		Tersedianya dokumen RTRW	Ada/tidak	ada
		Tersedianya dokumen RPJMD	Ada/tidak	ada
		Tersedianya dokumen RKPD setiap tahun	Ada/tidak	ada
	Terwujudnya konsistensi antara dok. perencanaan dan penganggaran	Program RPJMD yang tertuang pada RKPD	%	>85,00
		Program dan kegiatan RKPD yang tertuang pada APBD	%	>85,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan	%	>50,00
<i>Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintahan</i>	Meningkatnya kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	Jumlah SKPD yang telah memiliki dan mengamalkan SOP	SKPD	5
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kategori	baik
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat capaian Kinerja daerah	Kategori	CC
		Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Kategori survey	cukup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah temuan	Kasus	0
		Nilai temuan	Rupiah	0
		SKPD yang berindikasi penyimpangan administrasi/material	%	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	7,00
		Opini hasil pemeriksaan BPK	Kategori/nilai	WTP
Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Rasio bangunan yang memiliki IMB	%	>50,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Rasio bangunan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	%	>50,00
		Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	<10,00
<i>Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur</i>	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	Persentase pegawai berpendidikan Doktoral (S3)	%	0,04
		Persentase pegawai berpendidikan Master (S2)	%	2,30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Jumlah Pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya Eleson IV: Eselon III: Eselon II:	%	 55,00 85,00 100,00
MISI 7 :Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan & berwawasan lingkungan				
Meningkatkan pengelolaan potensi SDA secara efektif	Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	Produksi padi/tahun	Ton	99.338
		Produksi jagung/tahun	Ton	94.182
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA	Rekomendasi KLHS dalam penyusunan RTRW	Ada/tidak	ada

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Rekomendasi KLHAS dalam penyusunan RPJMD	Ada/tidak	ada
		Dokumen AMDAL pada proses perijinan untuk investasi sektor agroforestry dan pertambangan	Ada/tidak	ada
	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha	100
		Luasan ruang terbuka hijau yang diadakan	Ha	2
	Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	Kasus bencana banjir	Kasus	<5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
		Kasus bencana	Kasus	<5
		Kebakaran hutan dan lahan	Jumlah	>10
MISI 8 : Menjadikan wilayah perbatasan Bengkayang Kabupaten sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI				
<i>Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan</i>	terwujudnya program pembinaan/diklat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan	Jumlah program pembinaan	irekwenensi	baik
	Meningkatnya program stimulus ekonomi kemasyarakatan	Program APBD	Ada/tidak	ada
		Program APBN	Ada/tidak	ada

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2019
Menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI	Meningkatnya aksesibilitas wilayah perbatasan	Persentase desa perbatasan yang telah memiliki akses jalan ke ibu kota kecamatan	%	>50
	Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	Terdapat program pembangunan bidang kesehatan	Ada/tidak	ada
		Terdapat program pembangunan bidang pendidikan	Ada/tidak	ada
		Terdapat program pembangunan infrastruktur kelistrikan	Ada/tidak	ada
		Terdapat program pembangunan infrastruktur air bersih	Ada/tidak	ada

Dari tujuan dan sasaran serta indikator dan target yang telah tertuang didalam tabel diatas, maka selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan ditahun 2019.

4.2 Prioritas Pembangunan

Berdasarkan kondisi pembangunan beberapa tahun sebelumnya dan mempertimbangkan informasi terkait kondisi Kabupaten Bengkayang saat ini dengan perangkat pendekatan analisis (faktor eksternal dan internal), terdapat beberapa pokok permasalahan yang masih menjadi perhatian utama yakni :

1. Masih Kurangnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar, Terutama Pada Wilayah Perbatasan Dan Wilayah Kecamatan Sebagai Wilayah Tertinggal.
2. Masih Lemahnya Pengembangan Sektor Ekonomi Berdasarkan Potensi Ekonomi Kewilayahan.
3. Kurangnya Penataan Wilayah Serta Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Tingginya Persentase Kemiskinan;
5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Bertolak dari masalah pokok tersebut diatas, maka pemerintah daerah telah menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Kelembagaan, Sektor Unggulan Dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian
2. Meningkatkan Kualitas Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Penataan Wilayah Dan Fungsi Lingkungan Hidup

4. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Serta Iklim Yang Sehat Bagi Pertumbuhan Investasi Dan Organisasi. Serta,

5. Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Birokrasi

Prioritas pembangunan daerah selanjutnya dilakukan sinkronisasi ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah digambarkan sebelumnya pada tabel 4.1. dan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2019

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Meningkatnya standar pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,5
			Penduduk melek huruf	%	94
			Guru yang berkualifikasi S-1/D-IV	%	92
			Rasio guru terhadap 1000 murid SD/ sederajat	Skala	17
			Rasio guru terhadap 1000 murid SMP/ sederajat	Skala	13,75
			Rasio guru terhadap 1000 murid SMA/ sederajat	Skala	11,75
			Bangunan Sekolah SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	>50,00
			Bangunan Sekolah SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	45
		Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan	Desa/ kelurahan yang telah memiliki PAUD	%	88,71
		Meningkatnya kelestarian aset seni dan budaya	Jumlah acara tradisi adat budaya yang dilestarikan	Jumlah	12
			Jumlah aset budaya yang dilestarikan	Unit	8
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Status Rumah sakit Umum daerah	Tipe	C
			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Unit	3
			Angka Kematian Bayi/ 1.000 kelahiran	Rasio	<5,00
			Angka Kematian Ibu/ 100.000 kelahiran	Rasio	<50,00
			Balita Penderita Gizi buruk	Rasio	<1,00

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka harapan Hidup	Tahun	75
			Jumlah Kasus DBD	Kasus	<10
			Jumlah kasus Penyakit Menular	Kasus	0
			Peserta KB Aktif	%	90
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	Jumlah Posyandu	Unit	380
			Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	90
			Jumlah Puskesmas	Unit	17
			Jumlah Rumah Sakit Umum	Unit	2
			Jumlah Dokter	Orang	>25
			Jumlah Bidan	Orang	>200
		Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Rumah Tangga yang memiliki jamban keluarga	%	>75
			Rumah Tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat	%	>75
		Meningkatnya pemberdayaan masy. & program penanggulangan kemiskinan	Jumlah beasiswa utusan daerah	Jumlah	150
			Tingkat pemberdayaan melalui pembinaan dan diklat	Skala	baik
			Angka kemiskinan	Jiwa	10.000
		Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase PMKS yang terlayani	%	35
		Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala (%)	65,35
			Partisipasi wanita dibidang birokrasi	%	>30,00
			Partisipasi wanita dibidang politik	%	15
		Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	<5
		Berkembangnya organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	jumlah	>5

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masy.	Jumlah kegiatan kepemudaan	jumlah	>10
		Meningkatnya peran generasi muda pada program budaya dan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	jumlah	>5
			Meningkatnya Jumlah kelembagaan seni dan budaya yang terbentuk	jumlah	5
			Jumlah kelembagaan seni budaya yang terlibat dalam even daerah dan nasional	jumlah	>20
2	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan melalui peningkatan Infrastruktur Dasar	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan Merata	Bertambahnya Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	KM	60
		Terwujudnya Sistem Transportasi Publik yang representatif	Bertambahnya Jumlah terminal Tipe C	Unit	1
			Ketersediaan Fasilitas Uji KIR angkutan umum	Ada/tidak	ada
			Jumlah laka lantas	kasus	<80
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Permukiman	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang terentaskan	Ha	20
		Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	Desa yang memiliki akses listrik	%	77,41 (Penambahan 1 Desa)
			Rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	40
		Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah Perbatasan	Persentase Desa perbatasan yang telah memiliki akses jalan ke Ibu Kota Kecamatan	%	>50

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	Terdapat program pembangunan infrastruktur kelistrikan	Ada/tidak	ada
			Terdapat program pembangunan infrastruktur air bersih	Ada/tidak	ada
3	Peningkatan Nilai Tambah Melalui penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Produktifitas Sektor Agroforestry	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat PDRB harga konstan	Rupiah (Milyar)	5.500
			Tingkat PDRB harga pasar	Rupiah (Milyar)	7.500
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran/kapita	Rupiah	930.000
		Meningkatnya produksi sektor unggulan daerah	Produksi Karet/Tahun	Ton	23.000
			Produksi Lada/Tahun	Ton	1.470
			Produksi Sawit/Tahun	Ton	127.000
			Produksi Ikan Darat/Tahun	Ton	3.700
		Berkembangnya sektor pariwisata daerah	Bertambahnya Jumlah Destinasi Wisata	Jumlah	1
			Wisatawan Domestik	Orang	360.000
			Wisatawan Mancanegara	Orang	1.750
		Berkembangnya Koperasi dan UMKM	Bertambahnya Jumlah Pelaku UMKM	Unit	200
			Koperasi Aktif	%	75
		Meningkatnya perekonomian pada sektor sekunder dan tersier	Kontribusi Sektor Sekunder pada PDRB	%	15
			Kontribusi Sektor Tersier pada PDRB	%	57

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	Produksi padi/ tahun	Ton	99.338
			Produksi jagung/ tahun	Ton	94.182
4	Stabilitas Daerah, Mitigasi Bencana, pelestarian Lingkungan dan kesuksesan pemilu	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Rasio bangunan yang memiliki IMB	%	>50,00
			Rasio bangunan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	%	>50,00
			Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	<10,00
		Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha	100
			Luasan ruang terbuka hijau yang diadakan	Ha	2
		Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	Kasus bencana banjir	Kasus	<5
			Kasus bencana Kebakaran hutan dan lahan	Kasus	<5
			Jumlah titik api saat musim kemarau	Jumlah	<10
		Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan dengan pemanfaatan SDA	Dokumen AMDAL pada proses perijinan untuk investasi sektor agroforestry dan pertambangan	Ada/tidak	Ada
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lapangan Pekerjaan Baru	Jumlah	500
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Konflik horizontal akibat SARA	Kasus	Tidak ada		

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	Tingkat pemahaman dan pengamalan masing-masing agama dan kepercayaan	Nilai	baik
			Tingkat toleransi antar umat beragama dan kepercayaan	Nilai	baik
		Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	jumlah	<50
			Konflik yang terjadi	kasus	Tidak ada
5.	Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	Frekwensi program sosialisasi Perda	%	>50,00
		Meningkatnya penegakkan perda	Cakupan Penegakkan Perda	%	>75,00
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	Rasio jumlah anggota Linmas per 1000 penduduk	Skala	3
			Jumlah aktivitas demo	jumlah	<5
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya dokumen RKPD setiap tahun	Ada/tidak	Ada
		Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase program RPJMD yang tertuang pada RKPD	%	>85,00
			Persentase program dan kegiatan RKPD yang tertuang pada APBD	%	>85,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan	%	>50,00
		Meningkatnya kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	Jumlah SKPD yang telah memiliki dan mengamalkan SOP	SKPD	5
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kategori		baik		

NO.	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat capaian Kinerja daerah	Kategori	CC
			Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Kategori survey	cukup
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah temuan	Kasus	0
			Nilai temuan	Rupiah	0
			SKPD yang berindikasi penyimpangan administrasi/material	%	0
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	7
			Opini hasil pemeriksaan BPK	Kategori/nilai	WTP
		Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	Persentase pegawai berpendidikan Doktoral (S3)	%	0,04
			Persentase pegawai berpendidikan Master (S2)	%	2,3
		Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Jumlah Pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya	%	55 85 100
			Eleson IV:		
			Eselon III:		
			Eselon II:		

Dari Prioritas Pembangunan dan sasaran serta target dan indikator yang tergambar pada tabel 4.2, maka selanjutnya digambarkan Program Prioritas yang akan mendukung dalam pencapaian target terhadap indikator yang telah ditetapkan sehingga OPD akan memperoleh gambaran untuk menuangkan kembali program yang ada dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut. Secara lebih rinci tergambar pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran Daerah dan Program
Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	OPD
1.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan Merata	Bertambahnya Ruas Jalan kabupaten dalam Kondisi Baik	KM	60	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
					Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
					Program Perencanaan Bidang Kebinamargaan	Dinas PUPR
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas PUPR
	Terwujudnya Sistem Transportasi Publik yang representatif	Jumlah terminal Tipe C	Unit	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
		Ketersediaan Fasilitas Uji KIR angkutan umum	Ada/tidak	ada	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
		Jumlah laka lantas	kasus	<80	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Dinas Perhubungan
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang terentaskan	Ha	10	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim LH
					Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum Perumahan	Dinas Perkim LH
					Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim LH
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman	Dinas Perkim LH

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Perkim LH
					Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	
	Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	Desa yang memiliki akses listrik	%	77,41 (Penambahan 1 Desa)	Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan	Dinas PUPR
Program Pengembangan Jaringan Listrik					Dinas PUPR	
Rumah tangga yang memiliki akses air bersih		%	40	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dinas PUPR	
				Program Lingkungan Sehat Perumahan		
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkim LH	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah Perbatasan	Persentase Desa perbatasan yang telah memiliki akses jalan ke Ibu Kota Kecamatan	%	>50	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
Program Pembangunan Daerah Tertinggal					Dinas Sosial	
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan					Dinas PUPR	
	Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	Terdapat program pemb. infrastruktur kelistrikan	Ada/tidak	ada	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas PUPR
Terdapat program pembangunan infrastruktur air bersih					Ada/tidak	ada
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Limbah	Dinas PUPR
					Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas PUPR

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET	
	Meningkatnya produksi sektor unggulan daerah	Produksi Karet/Tahun	Ton	23.000	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas P3	
		Produksi Lada/Tahun	Ton	1.470	2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas P3	
		Produksi Sawit/Tahun	Ton	127.000			
		Produksi Ikan Darat/Tahun		Ton	3.700	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas P3
						Program Pengembangan UPTD / Program Peningkatan Kinerja Balai Benih Ikan (BBI)	Dinas P3
	Berkembangnya sektor pariwisata daerah	Bertambahnya Jumlah Destinasi Wisata	Jumlah	1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
					Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
		Wisatawan Domestik	Orang	360.000	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		Wisatawan Mancanegara	Orang	1.750	2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pora dan Pariwisata
	Berkembangnya Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM	Unit	200	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Dinas Perindag
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM					Dinas Koperasi, UMKM dan Transmigrasi	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					Dinas Perindag	
Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Kelompok					Dinas Perindag	
Koperasi Aktif		%	75,00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM dan Transmigrasi	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	Produksi padi/tahun	Ton	99.338	1. Prog Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 2. Prog Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Prog Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 4. Prog Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 5. Prog Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas PUPR
		Produksi jagung/tahun	Ton	94.182		
	Meningkatnya standar pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,50	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru terhadap 1000 murid SD/ sederajat	Skala	17,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rasio guru terhadap 1000 murid SMP/ sederajat	Skala	13,75		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
		Penduduk melek huruf	%	94,00	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Guru yang berkualifikasi S-1/D-IV	%	92,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bangunan Sekolah SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	50,00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bangunan Sekolah SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	45,00		
	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan	Desa/ Kelurahan yang telah memiliki PAUD	%	88,71	Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tersedianya fasilitas pendukung teknologi informasi	Bertambahnya Kecamatan yang memiliki akses internet	Jumlah	-	Program Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya kelestarian aset seni dan budaya	Jumlah acara tradisi adat budaya yang dilestarikan	Jumlah	12	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah aset budaya yang dilestarikan	Unit	8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Status RSUD	Tipe	C	1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Unit	3			
	AKB	Rasio	<5,00	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan dan KB	
	Angka Kematian Ibu	Rasio	<50,00	2. Program Kemitraan Peingkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan KB	
	Balita Penderita Gizi buruk	Rasio	<1,00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan KB	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka harapan Hidup	Tahun	75,00	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Obat dan Perbekalan 3. Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 4. Program Imunisasi	Dinas Kesehatan dan KB
		Jumlah Kasus DBD	Kasus	<10	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan dan KB
		Jumlah kasus Penyakit Menular	Kasus	0	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan dan KB
		Peserta KB Aktif	%	90,00	1. Program Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan KB

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
					2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Dinas Kesehatan dan KB
					3. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan sarana kerja	Dinas Kesehatan dan KB
	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	Bertambahnya Jumlah Posyandu	Unit	10	1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan dan KB
		Jumlah Pustu	Unit	80		
		Jumlah Puskesmas	Unit	17	2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/RS Paru/RS Mata	Dinas Kesehatan dan KB
		Jumlah Rumah Sakit Umum	Unit	2	3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ RS Paru/ RS Mata	Dinas Kesehatan dan KB
		Jumlah Dokter	Orang	>25		
		Jumlah Bidan	Orang	>200	4. Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan KB

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Rumah Tangga yang memiliki jamban keluarga	%	>75	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan dan KB
		Rumah Tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat	%	>75	2. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas PUPR
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan	Jumlah beasiswa utusan daerah	Jumlah	150	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Disdikbud Dinas Kesehatan dan KB Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Pora dan Pariwisata
		Tingkat pemberdayaan melalui pembinaan dan diklat	Skala	baik		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase PMKS yang terlayani	%	50,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala (%)	65,35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Partisipasi wanita dibidang birokrasi		%	>30,00			
Partisipasi wanita dibidang politik		%	10,36			
	Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	<5	Program Perlindungan Anak	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Rasio bangunan yang memiliki IMB	%	>50,00	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Rasio bangunan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	%	>50,00	Program Perencanaan tata Ruang	Bappeda Dinas PUPR
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPMPT
		Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	<10,00	Program Penegakan Perda dan Perkada	SATPOLPP
	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha	100	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas PerkimLH

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
		Luasan ruang terbuka hijau yang diadakan	Ha	2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas PerkimLH
	Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	Kasus bencana banjir	Kasus	<5	Program Pengendalian Banjir	Dinas PUPR
Program Tanggap darurat					BPBD	
Program Penanganan Pasca Bencana					BPBD	
Kasus bencana Kebakaran hutan dan lahan		Kasus	<5	1. Program Tanggap darurat 2. Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD	
Jumlah titik api saat musim kemarau		Jumlah	<10	3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	SAT POLPP	
	Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA	Dokumen AMDAL pada proses perijinan untuk investasi sektor agroforestry dan pertambangan	Ada/tidak	Ada	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lapangan Pekerjaan Baru	Jumlah	500	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Konflik horizontal akibat SARA	Kasus	Tidak ada	1. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Kesbangpol SatPolPP
	Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	Tingkat pemahaman & pengamalan masing agama dan kepercayaan	Nilai	baik	2. Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial	SETDA
		Tingkat toleransi antar umat beragama dan kepercayaan	Nilai	baik		
	Terkendalnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	jumlah	<50	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	SatPolPP
		Konflik yang terjadi	kasus	Tidak ada	2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	Frekwensi program sosialisasi Perda	%	>50,00	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDA
	Meningkatnya penegakkan PERDA	Cakupan Penegakkan Perda	%	>75,00	Program Penegakan Perda dan Perkada	SATPOL PP
	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	Rasio jumlah anggota Linmas per 1000 penduduk	Skala	3,00	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	SATPOL PP
		Jumlah aktivitas demo	jumlah	<5		
	Berkembangnya organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	jumlah	>5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan kepemudaan	jumlah	>10	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya peran generasi muda pada program budaya dan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	jumlah	>5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					Dinas Pora dan Pariwisata	
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pelajar					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Bertambahnya Jumlah kelembagaan seni dan budaya yang terbentuk	jumlah	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah kelembagaan seni budaya yang terlibat dalam even daerah dan nasional	jumlah	>20	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya dokumen RKPD setiap tahun	Ada/tidak	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase program RPJMD yang tertuang pada RKPD	%	>85,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		% program dan kegiatan RKPD yang tertuang pada APBD	%	>85,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	% usulan masy. melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan	%	>50,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Meningkatnya kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	Jumlah SKPD yang telah memiliki dan mengamalkan SOP	SKPD	5	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	SETDA (ORTAL)

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kategori	baik	Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	SETDA (ORTAL)
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat capaian Kinerja daerah	Kategori	CC	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN SELURUH OPD
		Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Kategori survey	cukup	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	SETDA (ORTAL)
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah temuan	Kasus	0	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Inspektorat
		Nilai temuan	Rupiah	0		
		SKPD yang berindikasi penyimpangan administrasi/ materi	%	0		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
					Program Peningkatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD
		Opini hasil pemeriksaan BPK	Kategori/ nilai	WTP	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan barang Milik Daerah	BPKAD
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	Persentase pegawai berpendidikan Doktoral (S3)	%	0,04	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKDD
		Persentase pegawai berpendidikan Master (S2)	%	2,30		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	TARGET
	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Jumlah Pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya Eleson IV: Eselon III: Eselon II:	%	55,00 85,00 100,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKDD

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen rencana yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Didalam mencapai sasaran pembangunan tersebut tentunya berimplikasi terhadap penyediaan pendanaan yang harus dialokasikan bagi program dan kegiatan yang telah ditentukan sebagai upaya menjawab sasaran yang pembangunan diinginkan.

Didalam bab ini, akan dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kondisi ditahun berjalan dan rencana kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021.

Adapun rencana kerja beserta dengan pendanaan disetiap urusan pemerintahan daerah dan Organisasi perangkat Daerah akan digambarkan didalam tabel pada lampiran dokumen RKPD ini.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan

Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, akan ditampilkan indikator sasaran yang menjadi target dalam setiap urusan pemerintahan daerah pada berbagai aspek dengan tujuan memberikan gambaran dan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan Pemerintah daerah melalui proses pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator sasaran ini merupakan indikator kinerja utama yang harus dicapai bersama oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. Namun sebelum digambarkan indikator dan target yang diharapkan untuk dicapai, didalam bab ini juga akan digambarkan capaian atas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan setiap urusan pemerintahan hingga tahun 2017.

6.1.1 URUSAN KONKUREN

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan ditahun 2017 didorong melalui 7 program yang dilaksanakan dengan 51 kegiatan,

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan

urusan pendidikan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bengkayang mencapai 28,03%. Diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak 4.383 siswa dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun sebanyak 15.637 orang.
- ✚ Penduduk berusia diatas 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 97,12%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 197.102 orang dengan Jumlah penduduk usia 15th ke atas sebanyak 202.950 orang.
- ✚ Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 88,48%, diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 29.973 siswa dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 33.876 orang.
- ✚ Angka Partisipasi Murni (APM) tuntut tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 49,25%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 7.052 dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn sebanyak 14.033 orang.
- ✚ Angka putus sekolah (APS) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 0,08% untuk tingkat SD/MI, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI sebanyak 31 siswa dengan Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 36.757 siswa.
- ✚ Angka putus sekolah (APS) untuk tingkat SMP/MTs sebesar 0,00, diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs sebanyak 0 (nol) siswa dengan Jumlah siswa pada

tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 12.882 siswa.

- ✚ Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI adalah sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 3.853 siswa dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.853 siswa.
- ✚ Angka Kelulusan (AL) tingkat SMP/MTs sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 5.298 siswa dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.298 siswa.
- ✚ Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 90,07%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.772 siswa dengan Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.298 siswa.
- ✚ Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang mencapai 77,89%, diperoleh dengan membandingkan Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.984 guru dengan jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, sebanyak 3.831 guru.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan pada tahun 2017 antara lain :

- (a) Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas terutama untuk program pendidikan menengah;
- (b) Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru;

- (c) Masih rendahnya kualitas prasarana jalan, terutama ke daerah terpencil, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pembangunan gedung sekolah;
- (d) Kurangnya data serta biaya yang tersedia untuk kegiatan pelatihan non formal;
- (e) Kurangnya pelatihan dan keterampilan yang dimiliki oleh fasilitator dan pendidik pendidikan non formal;
- (f) Masih rendahnya tingkat pendokumentasian laporan pelaksanaan kegiatan;
- (g) Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan dan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, telah dan akan ditempuh langkah langkah sebagai solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

- (a) Mengusulkan kepada instansi terkait untuk melakukan penambahan pegawai dengan menyesuaikan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (b) Mengusulkan kepada instansi terkait untuk menambah alokasi anggaran pada kegiatan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru;
- (c) Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk pendistribusian bahan bangunan kegiatan pembangunan sekolah;
- (d) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh akses yang lebih mudah sehingga kebutuhan akan data yang valid dapat terpenuhi serta mengusulkan penambahan alokasi anggaran kegiatan pendidikan non formal;
- (e) Lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas pendidik;
- (f) Meningkatkan pemahaman pelaksana kegiatan tentang tanggungjawab pembuatan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan;

- (g) Meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundangan dan petunjuk kegiatan kepada seluruh aparatur.

b. Urusan Kesehatan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan diharapkan dapat dicapai melalui 19 program yang dilaksanakan dengan 54 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Kesehatan.

Tingkat pencapaian SPM atau hasil-hasil yang dicapai pada Tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian sebesar 51,29%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama . Pada tahun 2017, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di Kabupaten Bengkayang sebanyak 637 orang dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 1.242 orang.
- ✚ Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2017 dengan capaian sebesar 76,58%,

diperoleh dengan membandingkan antara jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2017, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di Kabupaten Bengkayang sebanyak 4.541 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 5.930 orang.

✚ Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* tahun 2017 dengan capaian sebesar 60,48%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* dengan jumlah seluruh desa/kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* di Kabupaten Bengkayang sebanyak 75 desa/kelurahan dari jumlah seluruh desa / kelurahan sebanyak 124 desa/kelurahan.

✚ Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama. Pada tahun 2015, jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di Kabupaten Bengkayang sebanyak 15 Balita dari jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 15 Balita.

✚ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2017 dengan capaian

sebesar 50,10%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama. Pada tahun 2017, jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Bengkayang sebanyak 251 orang dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama sebanyak 501 orang.

- ✚ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2016 dengan capaian sebesar 100%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2017, jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Bengkayang sebanyak 12 orang dari jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama sebanyak 12 orang.
- ✚ Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2016 dengan capaian sebesar 82,98%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 (satu) dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 di Kabupaten Bengkayang sebanyak 50.904 orang dari jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang sebanyak 69.959 orang.
- ✚ Cakupan kunjungan bayi tahun 2017 dengan capaian sebesar 103,17%, diperoleh dengan

membandingkan antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada Kurun waktu yang sama. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di Kabupaten Bengkayang sebanyak 4.915 bayi dari jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 4.764 bayi.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

(a) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, antara lain:

- (1) Belum tersedianya sarana, infrastruktur kesehatan secara cukup dan merata hingga ke daerah sulit dan terpencil.
- (2) Rendahnya capaian kinerja UPT terhadap target/indikator program yang telah ditetapkan.

(b) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD, antara lain:

- (1) Belum selesainya pembangunan gedung RS;
- (2) Tidak lengkapnya daftar obat yang disediakan oleh penyedia bahan farmasi;
- (3) Pendanaan yang telah direncanakan selalu dipangkas;
- (4) Masih rendahnya tingkat SDM yang ada;
- (5) Kurangnya dokter spesialis;
- (6) Status kepemilikan tanah masih bermasalah;
- (7) Masih rendahnya status kelas RS; dan
- (8) Belum adanya ijin pelayanan RS.
- (9) RS belum terakreditasi

(10) Masih minim/terbatasnya alat-alat kesehatan yang ada

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Membuat usulan, proposal ke instansi terkait untuk menyediakan dana pembangunan guna pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) Perlu dibuat/ ditetapkan standar kinerja individu (SKI) pada petugas kinerja Dinas Kesehatan yang dikorelasikan dengan reward yang diterima;
- (3) Masih terus diusulkan penganggaran untuk pembangunan RSUD sampai terealisasi walaupun secara bertahap;
- (4) Untuk penyediaan obat perlu disusun pokok prioritas keadaan urgensinya, dilakukan survey kepada berbagai distributor, dan selalu dikoordinasikan dengan komite medik sebagai calon user;
- (5) Diusahakan untuk segera berubah menjadi BLUD sehingga lebih fleksibel;
- (6) Direncanakan pengembangan SDM RSUD Bengkayang melalui bimtek dan diklat fungsional terpilih;
- (7) Untuk dokter spesialis akan diusulkan terus menerus khususnya untuk spesialis dasar, menyediakan dan meningkatkan fasilitas baik di RS maupun di luar RS, dan memfasilitasi dokter-dokter resident spesialis yang ditugaskan ke RSUD Bengkayang;
- (8) Mencatat dan memonitor perkembangan upaya persertifikatan tanah RSUD seluas 12,9 Ha.
- (9) Persiapan peningkatan kelas dan tipe D ke tipe C segera dilaksanakan; dan
- (10) Ijin operasional masih menunggu persyaratan terpenuhi antara lain: sertifikat tanah dan IMB.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat dicapai melalui 10 program yang dilaksanakan dengan 15 kegiatan,

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- ✚ Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2017 dengan capaian sebesar 33,03%, diperoleh dengan membandingkan antara panjang jalan kota/kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 423 km dengan panjang seluruh jalan kabupaten Bengkayang sepanjang 1.281 km.
- ✚ Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2017 dengan capaian sebesar 75%, diperoleh dengan membandingkan antara luas irigasi kota/kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 8.891 ha dengan panjang seluruh jalan kabupaten Bengkayang sepanjang 11.855 ha.
- ✚ Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2017 dengan capaian sebesar 51,10%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga ber sanitasi sebanyak 35.568 dengan jumlah total rumah tangga sebanyak 69.601 jumlah rumah tangga ber sanitasi di

lingkungan Kabupaten Bengkayang pada masing-masing kecamatan.

- ✚ Kawasan Kumuh tahun 2017 dengan capaian sebesar 2,3%, diperoleh dengan membandingkan antara luas kawasan kumuh seluas 134,90 km² dengan luas wilayah Kabupaten Bengkayang seluas 5.396 km².
- ✚ Prosentase ruang terbuka hijau dihitung dari luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB dikalikan 100%. Sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Bengkayang telah memiliki RTH sebanyak 0,01%, yaitu luas RTH sebanyak 0,02 ha dibandingkan dengan luas wilayah kota 24.227 ha.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 adalah:

- (a) Alokasi anggaran yang cukup terbatas dibandingkan dengan kebutuhan.
- (b) Luasnya jangkauan lokasi yang ada di Kabupaten Bengkayang
- (c) Masih terjadi kelambatan penyelesaian fisik di lapangan karena kondisi alam.
- (d) Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan proyek dimana bahan / material harus didatangkan dari luar.
- (e) Adanya perubahan-perubahan desain yang sangat mendasar, akibat tidak adanya sosialisasi dan adanya salah persepsi masyarakat.
- (f) Adanya mutu pekerjaan pada kegiatan proyek yang kurang memadai.
- (g) Kurangnya Tenaga Teknis di lapangan, sehingga kurang mampu menterjemahkan dan mengaplikasikan pekerjaan yang diharapkan.

Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Mengupayakan alokasi anggaran APBD lebih besar, serta mengusulkan dana tambahan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (b) Mengoptimalkan SDM dan peralatan yang ada sehingga berfungsi optimal dalam menjalankan tugas pokok ke-PU-an.
- (c) Memberi pengertian kepada pelaksana agar membuat perhitungan waktu yang matang dalam pelaksanaan di lapangan.
- (d) Perencanaan Teknis sebaiknya dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan fisik, sehingga besarnya dana benar - benar dapat mengakomodir target fisik yang diharapkan.
- (e) Pelaksanaan proyek pada akhir tahun anggaran tidak mencapai 100% perlu tindakan teguran maupun pembinaan.
- (f) Khusus untuk peningkatan jembatan kerangka baja sebaiknya dipisahkan antara pemesanan kerangka baja dengan pelaksanaan Abutment.
- (g) Pelaksanaan di lapangan yang belum optimal, pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan dengan jalan mengadakan pembinaan kepada kontraktor, sehingga secara bertahap kontraktor memahami betul isi dokumen kontrak dan melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknik.
- (h) Untuk pengendalian mutu pekerjaan dan waktu pelaksanaan, konsultan diharapkan berperan aktif secara professional dan mandiri.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Perumahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perumahan diharapkan dapat dicapai melalui 3 program yang dilaksanakan dengan 12 kegiatan,

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Perumahan

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

- ✚ Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 41,80%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 mencapai 29.094 rumah tangga. Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Bengkayang tahun 2016 sebanyak 69.601 rumah tangga.
- ✚ Lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 8,76% diperoleh dari perhitungan luas lingkungan pemukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Bengkayang dikalikan 100%. Luas lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 seluas 473,10 km², sedangkan luas Kota Kabupaten Bengkayang seluas 5.396 km².
- ✚ Rumah layak huni di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 mencapai 77,60%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 dikalikan 100%. Jumlah rumah layak huni sebanyak 54.007 rumah, dan jumlah rumah seluruhnya di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 sebanyak 69.601 rumah.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perumahan

pada tahun 2017 adalah:

- (a) Masih terbatasnya SDM baik jumlah maupun kualitas dibidang perumahan.
- (b) Minimnya anggaran dalam rangka mendukung urusan perumahan.
- (c) Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan urusan perumahan, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
- (d) Terhadap kualitas SDM, diupayakan mengikuti diklat dibidang terkait baik yang dilaksanakan sendiri maupun mengirim ke perguruan tinggi.
- (e) Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka mendukung urusan perumahan dengan memperhatikan kemampuan APBD Kabupaten dan melakukan skala prioritas sesuai rencana pembangunan.

e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 10 kegiatan,

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 adalah:

- (a) Pembangunan dan penggunaan tanah banyak yang melanggar ketentuan peruntukan tanah;

- (b) Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang.
- (c) Masih kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang tersedia baik menyangkut kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (d) Terbatasnya anggaran urusan penataan ruang, misalnya revisi rencana tata ruang tata wilayah (RT/RW) yang memerlukan foto citra satelit yang memerlukan biaya yang besar sehingga tidak bisa dilaksanakan.
- (e) Belum adanya standarisasi sarana kerja sehingga mengakibatkan kurang berfungsinya beberapa sarana penting yang sangat mendukung tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 tersebut di atas, telah diambil tindakan antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan sosialisasi tentang tata ruang.
- (b) Melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung baru, mengawasi pembukaan lahan atau ijin lokasi.
- (c) Terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur yang handal, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap keberhasilan pemerintahan.
- (d) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (e) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi mengingat Bappeda merupakan lembaga lintas sektoral yang pelaksanaan kegiatannya pada umumnya melibatkan pihak ketiga (stakeholder).

f. Urusan Wajib Sosial

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Sosial diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 11 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun 2017 dalam memberikan dan menjalankan fungsi / urusan Sosial secara ringkas ditunjukkan pada capaian kinerja yang diuraikan berikut ini:

- ✚ Terdapat 3 (tiga) sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017.
- ✚ Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bengkayang yang ditangani pada tahun 2017 adalah sebanyak 58 orang dari 2.258 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau sebesar 2,56%.
- ✚ Dan PMKS yang mendapat bantuan sosial sebanyak 1,80%, angka ini didapat dari perhitungan jumlah PMKS yang diberikan bantuan tahun 2017 sebanyak 362 orang dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2017 sebanyak 20,096 orang.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Wajib Tenaga Kerja Adalah Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.

2) Program Dan Kegiatan

Untuk Mewujudkan Keberhasilan Dalam Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Diharapkan Dapat Dicapai Melalui 3 Program Yang Dilaksanakan Dengan 9 Kegiatan

3) TINGKAT Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Ketenagakerjaan

Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- 📌 Pada tahun 2017 tingkat partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang mencapai 56,67%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah tenaga kerja/buruh yang aktif sebagai peserta Jamsostek tahun 2017 sebanyak 8.500 orang dibagi dengan jumlah tenaga kerja/buruh tahun 2017 sebanyak 15.000 orang dan dikali dengan 100%.
- 📌 Sedangkan pencari kerja yang ditempatkan mencapai 32,25%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak 92 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja tahun 2017 sebanyak 261 orang dan dikali dengan 100%.

b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diharapkan dapat dicapai melalui 5 program yang dilaksanakan dengan 11 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 4,50%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 2.232 orang dibagi dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 49.605 orang dan dikalikan 100%.
- ✚ Sedangkan angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas mencapai 48,83%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf sebanyak 32.697 orang, dibagi dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun sebanyak 66.966 orang.
- ✚ Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 50,56%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 25.081 orang dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 49.605 orang.

c. Urusan Pangan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pangan adalah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Pangan diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 5 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pangan

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Pangan adalah sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki regulasi ketahanan pangan.
- ✚ Rata-rata ketersediaan pangan utama selama tahun 2017 sebanyak 124.157 kg, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2017 sebanyak 283.775 jiwa, sehingga ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 mencapai 124.157 kg per 1000 penduduk atau Kg per kapita per tahun.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Urusan Pangan adalah :

- (a) Pelaksanaan kegiatan desa mandiri pangan belum dapat berjalan sesuai harapan disebabkan tersendatnya pengembalian pinjaman modal;
- (b) Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) belum dapat berjalan sesuai harapan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang penganekaragaman konsumsi pangan;
- (c) Pelaksanaan kegiatan LDPM belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan sebagian kelompok

- tidak aktif melaksanakan jual beli padi/GKG dan penyampaian laporan bulanan tidak tepat waktu;
- (d) Secara umum kegiatan LPDM sudah berjalan dengan baik, namun ada 1 gapoktan yang kurang aktif/vacuum dalam beraktifitas dikarenakan kekosongan salah satu pengurus, juga penyampaian laporan tidak tepat waktu;
 - (e) Pelaksanaan kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) menyangkut data dari dinas/instansi terkait agak terlambat. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antar petugas dinas/instansi tersebut;
 - (f) Minimnya pengetahuan tentang aplikasi pemetaan yang disebabkan belum adanya pelatihan pemetaan SPKG.

Atas permasalahan tersebut di atas, langkah-langkah yang diambil sebagai solusi yaitu :

- (a) Perlu adanya pembinaan secara rutin kepada pengurus kelompok penerima manfaat;
- (b) Dilakukan pelatihan tentang cara membuat laporan yang baik;
- (c) Diadakan peremajaan kepengurusan LDPM agar aktifitas gapoktan bisa berjalan kembali;
- (d) Meningkatkan koordinasi antara atasan dan bawahan yang lebih intensif.

d. Urusan Pertanahan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan wajib Pertanahan diharapkan dapat dicapai melalui 2 program yang dilaksanakan dengan 6 kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pertanahan

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Luas lahan bersertifikat di Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 19,53%, yaitu tanah telah bersertifikat seluas 139.027 dibandingkan dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat seluas 711.840.
- ✚ Terdapat 2 (satu) kasus sengketa tanah Negara selama tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang dan telah tertangani dengan baik, namun masih terdapat 3 kasus yang belum terselesaikan.
- ✚ Terdapat pengajuan izin lokasi di Kabupaten Bengkayang sebanyak 1 izin lokasi, semuanya terselesaikan dalam tahun 2017.

4) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kinerja, kurangnya SDM, baik secara kualitas dan kuantitas.

(b) Solusi

Perlunya dilakukan penambahan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, perlunya dilakukan analisis kepegawaian untuk menempatkan personil sesuai dengan bidang tugasnya, serta meningkatkan koordinasi.

e. Urusan Lingkungan Hidup

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diharapkan dapat dicapai melalui 7 program yang dilaksanakan dengan 15 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Lingkungan Hidup

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- ✚ Penanganan sampah di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 62,21%, dimana volume sampah yang ditangani (m^3) sebanyak 33.258 m^3 dibandingkan dengan volume produksi sampah (m^3) sebanyak 53.457 m^3 .
- ✚ Indikator Kinerja Kunci Kebersihan Kabupaten Bengkayang dengan capaian kinerja sebesar 50,00% berdasarkan jumlah pasar tradisional dalam kategori yang tergolong baik (sesuai kriteria Adipura) sebanyak 3 pasar dibandingkan dengan pasar tradisional yang ada sebanyak 6 pasar.
- ✚ Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 36,69 m^3 per 1000 penduduk. Perhitungan tersebut berasal dari jumlah daya tampung TPS sebanyak 11.160 m^3 yang dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Bengkayang sebanyak 281.163 jiwa.
- ✚ Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 100%, dimana terdapat 8 kasus lingkungan hidup, tertangani dengan baik sebanyak 8 kasus.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- (a) Belum tersedianya Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Kualitas Lingkungan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (b) Pendelegasian tugas yang sering merangkap dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di seksi pengelolaan kualitas lingkungan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil kinerja seksi tersebut.
- (c) Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terkelola sepenuhnya serta semakin besar DAK yang diterima malah membuat kecil anggaran pengelolaan lingkungan mengingat kegiatan DAK yang ada harus bersifat belanja modal dan kontraktual.
- (d) Belum terwujudnya Laboratorium Lingkungan sebagai salah satu Laboratorium terakreditasi mengingat sarana dan prasarana pendukungnya masih kurang berikut SDM nya.
- (e) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dirasakan masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- (f) Sesuai dengan TUPOKSI yang ada salah satunya adalah pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL/maupun SPLH, maka kendala utama dalam hal pengawasan adalah keterbatasan anggaran mengingat luasnya Wilayah (SDM) yang masih terbatas. Untuk mengurangi/mengatasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan urusan ini antara lain ditempuh melalui cara:
 - (a) Menambah jumlah pegawai yang ada yang mampu bekerja dengan TUPOKSI Seksi PKL.
 - (b) Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengagasan mewujudkan Produk Hukum yang berkaitan dengan TUPOKSI Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan.

- (c) Membuat Program kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI Seksi PKL secara bertahap agar tujuan program 5 (lima) Tahunan bisa terwujud.
- (d) Mengikutsertakan staf yang ada melaksanakan DIKLAT/Bimtek pengelolaan Laboratorium, Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan lain-lain yang berkaitan dengan Tupoksi.
- (e) Secara kontinyu melengkapi kekurangan sarana dan prasarana laboratorium dengan tujuan akreditasi LAB.
- (f) Mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar memberikan Dana Penunjang sebesar minimal 10% untuk menunjang kegiatan DAK diluar dana pendamping 10% yang wajib dikeluarkan SKPD.
- (g) Terus mengajukan/kegiatan pengawasan/monitoring/evaluasi setiap tahun anggaran baru, dengan tujuan agar kontinuitas terwujud.

f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Admistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat dicapai melalui 5 program yang dilaksanakan dengan 20 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 penduduk yang telah memiliki KTP di Kabupaten Bengkayang berjumlah 146.856 jiwa atau sebesar 75,37% dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang yang wajib KTP sebanyak 194.843 jiwa.
 - ✚ Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 sebanyak 67.317 orang dari jumlah penduduk sebesar 283.775 jiwa, atau 23,72 perseribu.
- Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2009 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK.

Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- (a) Terselenggaranya sosialisasi tentang pelaksanaan pencatatan sipil bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
- (b) Terlaksananya Perekaman dan penerbitan E-KTP.
- (c) Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi petugas registrasi pendaftaran penduduk di kecamatan dan desa se Kabupaten Bengkayang.
- (d) Terintegrasinya database SIAK dan database e- KTP

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- (a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil uang menangani pekerjaan khusus pengolahan data penduduk dan akta catatan sipil.
- (b) Kurang maksimalnya dukungan dari pihak stackholder yang berkompeten dalam hal menyebarkan informasi tentang pemutakhiran data penduduk.

(c) Minimnya dana yang tersedia baik untuk pelaksanaannya tugas, peningkatan tugas, peningkatan peralatan maupun peningkatan pengetahuan personil.

Solusi yang telah dilaksanakan antara lain :

- (a) Memberdayakan semua pegawai semaksimal mungkin baik PNS maupun non PNS dan merekrutmen pegawai untuk memenuhi kekurangan tenaga yang dibutuhkan.
- (b) Mengadakan/melaksanakan sosialisasi bagi stackholder yang menangani kependudukan.
- (c) Mengajukan usulan untuk mengikuti pelatihan, studi banding dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia termasuk biaya operasional dan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran kerja.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat dicapai melalui 5 program yang dilaksanakan dengan 13 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 jumlah PKK yang aktif di Kabupaten Bengkayang sebesar 100%, dimana jumlah PKK yang aktif sebanyak 1.063 buah, dan jumlah PKK di Kabupaten Bengkayang sebanyak 1.063 buah.
- ✚ Sedangkan jumlah posyandu yang aktif tahun 2017 sebesar 100%, dimana jumlah Posyandu yang aktif di Kabupaten Bengkayang sebanyak 338 Posyandu, dan jumlah Posyandu di Kabupaten Bengkayang sebanyak 338 Posyandu..

h. Urusan Wajib Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat dicapai melalui 2 program yang dilaksanakan dengan 10 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat pencapaian SPM tahun 2014 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Persentase Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 68,93% dimana jumlah peserta program KB aktif pada tahun 2017

mencapai 27.224 dibagi dengan jumlah pasangan usia subur pada tahun 2016 sebanyak 39.495 pasangan.

- ✚ Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 27,42%, dimana jumlah jumlah petugas/penyuluh KB pada tahun 2016 sebanyak 34 orang dibagi dengan jumlah desa/kelurahan pada tahun 2017 sebanyak 124 Desa.

i. Urusan Perhubungan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 9 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Perhubungan

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Perbandingan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebesar 1,99%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah angkutan darat sebanyak 24.716 unit, dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 1.243.176 orang.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang adalah:

- (a) Infrastruktur perhubungan yang belum memadai;
- (b) Masih banyak daerah yang belum terjangkau pelayanan jaringan telekomunikasi yang baik;
- (c) Sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Solusi untuk permasalahan yang tersebut di atas adalah:

- (a) Pembangunan infrastruktur perhubungan yang memenuhi standar;
- (b) Pembangunan menara-menara telekomunikasi;
- (c) Penambahan pegawai dengan merekrut tenaga sesuai dengan kompetensi di bidang perhubungan dan transportasi;
- (d) Penambahan pegawai dengan merekrut tenaga sesuai dengan kompetensi di bidang perhubungan dan transportasi;
- (e) Peningkatan SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada kegiatan bimbingan teknis.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib komunikasi dan informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diharapkan dapat dicapai melalui 2 program yang dilaksanakan dengan 4 kegiatan

k. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat dicapai melalui 3 program yang dilaksanakan dengan 5 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- ✚ Koperasi aktif di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sebanyak 111 koperasi dari 190 koperasi yang ada atau mencapai 64,12%.
- ✚ Sedangkan jumlah usaha mikro dan kecil yang aktif pada tahun 2017 berjumlah 3900 usaha dari jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Bengkayang sebanyak 3.900 usaha atau mencapai 100%.

1. Urusan Penanaman Modal

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib penanaman modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal diharapkan dapat dicapai melalui 2 program yang dilaksanakan dengan 8 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Penanaman Modal

Adapun uraian dalam sub tingkat pencapaian standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

Realisasi PMDN pada Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 144,50% dibandingkan

dengan realisasi PMDN tahun 2017, dimana dalam tahun 2017 terdapat penambahan Rp272.927.403.493juta dibandingkan investasi sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp188.877.336.500.

m. Urusan Pemuda dan Olah Raga

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 11 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

✚ Tidak terdapat/terdapat gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Bengkayang sampai dengan pada tahun 2017.

✚ Sedangkan jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 adalah sebanyak 222 buah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang yang berjumlah sebanyak 283.775, maka jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Bengkayang tahun 2017 mencapai 0,78 lapangan olah raga per 1000 penduduk. Lapangan olah raga tersebut terdiri dari :

- 1) 79 unit lapangan sepakbola;
- 2) 2 unit lapangan basket;
- 3) 124 unit lapangan volley;
- 4) 17 unit lapangan bulu tangkis.

n. Urusan Statistik

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 3 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Statistik

Tingkat pencapaian Hasil-hasil yang Dicapai tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Statistik di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki buku Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2017, dan sekaligus dalam buku tersebut terdapat PDRB Kabupaten Bengkayang.

o. Urusan Persandian

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Persandian diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 7 kegiatan

p. Urusan Kebudayaan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib budaya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan budaya diharapkan dapat dicapai melalui 2 program yang dilaksanakan dengan 4 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Kebudayaan

Tingkat pencapaian Hasil-hasil yang Dicapai tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Festival seni budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) kali.
- ✚ Sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah belum dimiliki Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2017.
- ✚ Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 100%, angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 12 buah dibagi dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebanyak 12 buah dikali 100%.

q. Urusan Kearsipan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib kearsipan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

antara jumlah produksi ikan daerah sebesar 2.868,2 ton dengan target daerah 7.000,0 ton.

- ✚ Jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 52,52% perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah konsumsi ikan dengan target produksi ikan daerah. Pada tahun 2017 jumlah konsumsi ikan masyarakat sebanyak 35 kg sementara yang ditargetkan adalah sebanyak 48kg.

b. Urusan Pariwisata

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 11 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pariwisata

Pencapaian SPM atau hasil-hasil untuk Urusan Pariwisata di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sebanyak 399.190 orang.
- ✚ PDRB sektor pariwisata sebesar 147.045 juta, terdapat PDRB dari sector pariwisata.

c. Urusan Pilihan Pertanian

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pilihan pertanian adalah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pertanian diharapkan dapat dicapai melalui 7 program yang dilaksanakan dengan 13 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pertanian

Pencapaian SPM atau hasil-hasil untuk Urusan Pertanian di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Produktivitas padi/bahan pangan utama per hektar sebesar 3,66 ton/ha pada tahun 2017 dihitung dengan membandingkan antara jumlah produksi padi per tahun sebesar 124.157 ton pada tahun 2017 dengan luas lahan yang digunakan sebesar 33.959 ha pada tahun 2017.
- ✚ Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2017 berdasarkan harga konstan sebesar 3,61% dihitung dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebesar Rp2.127.366,90 juta dibandingkan dari keseluruhan PDRB tahun 2017 sebesar Rp6.730.080,00juta.

d. Urusan Pilihan Perindustrian

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan Perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 10 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Industri

Pencapaian SPM atau hasil-hasil untuk Urusan Industri di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sebesar Rp665.891,40 juta dari total PDRB Kabupaten Bengkayang sebesar Rp6.730.080,00 juta atau mencapai 6,23%.
- ✚ Pertumbuhan industri di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sebesar 32,55% yang berasal dari penambahan jumlah industri dari tahun 2016 ke 2017 yang sebanyak 221 industri dibanding dengan total jumlah industri sampai dengan tahun 2016 yang sebanyak 679 industri.

e. Urusan Pilihan Perdagangan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan diharapkan dapat dicapai melalui 3 program yang dilaksanakan dengan 8 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Perdagangan

Pencapaian SPM atau hasil-hasil untuk Urusan Perdagangan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Pada tahun 2017 kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebesar Rp1.092.796,10 juta dari total PDRB 1.092.796,10 juta sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 mencapai 16,21%.
- ✚ Tidak terdapat data (TDI) Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017.

f. Urusan Transmigrasi

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pilihan Transmigrasi adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Transmigrasi diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 3 kegiatan

6.1.2 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Perencanaan diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 2 kegiatan

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Fungsi perencanaan pada tahun 2016 adalah:

- (a) Masih kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang tersedia baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.
- (b) Belum semua aspirasi masyarakat tertampung dalam dokumen perencanaan (RKPD) mengingat skala prioritas pembangunan dan pembiayaan APBD yang terbatas.
- (c) Komitmen dan kepedulian OKPD untuk menyampaikan bahan-bahan perencanaan secara tepat waktu masih rendah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur yang handal, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap keberhasilan pemerintahan.
- (b) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (c) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi mengingat Bappeda merupakan lembaga lintas sektoral yang pelaksanaan kegiatannya pada umumnya melibatkan pihak ketiga (stakeholder).
- (d) Meningkatkan komitmen dan kepedulian Kepala SKPD agar dapat menyampaikan bahan-bahan perencanaan secara tepat waktu.

2. Fungsi Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan diharapkan dapat dicapai melalui 5 program yang dilaksanakan dengan 51 kegiatan

3) Permasalahan dan Solusi

Sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten belum mendapatkan predikat WTP.

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 33 kegiatan

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2017 adalah:

- (a) Masih kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang tersedia baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.
- (b) Belum semua aspirasi masyarakat tertampung dalam dokumen perencanaan (RKPD) mengingat skala prioritas pembangunan dan pembiayaan APBD yang terbatas.
- (c) Komitmen dan kepedulian kepala SKPD untuk menyampaikan bahan-bahan perencanaan secara tepat waktu masih rendah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur yang handal, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap keberhasilan pemerintahan.
- (b) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (c) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi mengingat Bappeda merupakan lembaga lintas sektoral yang pelaksanaan kegiatannya pada umumnya melibatkan pihak ketiga (stakeholder).
- (d) Meningkatkan komitmen dan kepedulian Kepala SKPD agar dapat menyampaikan bahan-bahan perencanaan secara tepat waktu.

4. Fungsi Pengawasan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Pengawasan diharapkan dapat dicapai melalui 4 program yang dilaksanakan dengan 19 kegiatan

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Fungsi Pengawasan pada tahun 2017 adalah:

- (a) Masih kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang tersedia baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.
- (b) Komitmen dan kepedulian kepala SKPD untuk menyampaikan bahan-peningkatan komitmen terhadap akuntabilitas masih rendah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur yang handal, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi terhadap keberhasilan pemerintahan.
- (b) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (c) Meningkatkan komitmen dan kepedulian Kepala SKPD agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

5. Fungsi Koordinasi, Organisasi dan Tata Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah dan Unsur Kecamatan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Koordinasi, Organisasi dan Tata Pemerintahan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Koordinasi, Organisasi dan Tata Pemerintahan diharapkan dapat dicapai melalui 28 program yang dilaksanakan dengan 227 kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah

3) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kinerja, kurangnya SDM, baik secara kualitas dan kuantitas, serta kurangnya koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Instansi vertikal

(b) Solusi

Perlunya dilakukan penambahan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, perlunya dilakukan analisis kepegawaian untuk menempatkan personil sesuai dengan bidang tugasnya, serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi langsung antar instansi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dengan instansi vertikal.

b. Sekretariat Dewan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Fungsi Koordinasi, Organisasi dan Tata Pemerintahan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Fungsi Koordinasi, Organisasi dan Tata Pemerintahan diharapkan dapat dicapai melalui 1 program yang dilaksanakan dengan 12 kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah

3) Permasalahan dan Solusi

(a) Permasalahan

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kinerja, kurangnya SDM, baik secara

kualitas dan kuantitas, serta kurangnya koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Instansi vertikal

(b) Solusi

Perlunya dilakukan penambahan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, perlunya dilakukan analisis kepegawaian untuk menempatkan personil sesuai dengan bidang tugasnya, serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi langsung antar instansi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dengan instansi vertikal.

7 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

2) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) diharapkan dapat dicapai melalui 3 program yang dilaksanakan dengan 11 kegiatan

3) Tingkat Pencapaian SPM atau Hasil-hasil yang Dicapai Sebagai Kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Mendukung Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol).

Tingkat pencapaian SPM tahun 2017 sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- ✚ Selama tahun 2017 Tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah;
- ✚ Selama tahun 2017 dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan OKP.

6.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Di tahun 2019, Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama

Tabel IV.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bengkayang

No.	URAIAN	SATUAN	KINERJA DIAWAL MASA RPJMD	CAPAIAN		PROYEKSI	
				2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,02	5,15	5,20*	>5	>5
2.	Tingkat Pengangguran	%	3,74	2,40	2,40*	<5	<5
3.	Angka Kemiskinan	%		7,46	6,50	<6	<6
4.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)		64,40	65,45	-	68,39	69,80

Tabel IV.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd	Target dan Capaian Tahunan					
			2015	Target 2016	Capaian 2016	Target 2017	Capaian 2017	Target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Tingkat Inflasi Daerah	5,29 %	<6 %		<6 %		<6 %	<6 %
	Pengeluaran per Kapita (riil)	766.919	820.000	826.319	850.000		875.000	930.000

	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,02 %	>4 %	5,15	>4 %	5,20*	>5 %	>5 %
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
	PENDIDIKAN							
	Angka rata-rata lama sekolah	5,97 %	6,00 %	6,08%	6,50 %	6,05%	7,00 %	7,50 %
	Angka Melek Huruf	91,42 %	92,00%	97,55%	92,50%	97,95%	93,00%	94,00%
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	105,50 %	105,5 %	118,45 %	105,5 %	116,44%	105,5 %	105,5 %
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	77,24 %	78,00 %	93,98%	79,00 %	95,5%	79,50 %	80,00 %
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	50,09 %	50,50 %		51,50 %		52,50 %	53,50 %
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	88,48 %	88,75 %	108,1	89,50	94,15%	90,25 %	91,25 %
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	49,25 %	49,75 %	65,7%	50,75 %	68,12%	51,50 %	52,50 %
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	45,12 %	46,00 %		48,00 %		50,00 %	53,00 %
	KESEHATAN							
	Angka harapan hidup	72.89	73.00	73,01	74.00		74.50	75.00
	Balita Penderita gizi buruk/1000 Balita	0.58	<1.0	0,8	<1.0	0,8	<1.0	<1.0
	Angka Kejadian Gizi Buruk	16	14		12		10	8
	KETENAGAKERJAN							
	Rasio penduduk yang bekerja	96,26%	96,5%		96,5%		96,75%	96,75%
	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA							
	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian							

a.	Jumlah Kelembagaan Seni dan Budaya Yang terbentuk	80	90		95		100	>100
b.	Jumlah Kelembagaan Seni dan Budaya Yang terlibat dalam even daerah dan Nasional	15	20		>20		>20	>20
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB							
	PENDIDIKAN							
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28,03 %	29,03 %	54,53%	31,03 %	56,22%	32,03 %	34,03 %
	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah	88,48	88,75	102,75	89,50	92,79	90,25	91,25
	Rasio ketersediaan sekolah/1000 penduduk usia sekolah	6,81	6,91		7,00		7,1	7,19
	Rasio guru / murid							
	• SD/ Sederajat	14,90	15,00	15,00	16,00	14,5	16,50	17,00
	• SMP/ Sederajat	12,70	13,00	16,00	13,25	15,77	13,50	13,75
	Pendidikan Menengah							
	Angka partisipasi sekolah	49,25	49,75		50,75	52,11	51,50	52,50
	Rasio ketersediaan sekolah / 1000 penduduk usia sekolah	2,23	2,23		2,23		2,23	2,23
	Rasio guru terhadap murid	7,56	7,56		7,66		7,70	7,80
	Fasilitas Pendidikan							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	36,70 %	40,00 %		45,00 %		50,00 %	>50,00 %

	Rasio pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	28,80 %	30,00 %		35,00 %		40,00 %	45,00 %
	Rasio pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	37,30 %	40,00 %		45,00 %		50,00 %	>50,00 %
	Angka Putus Sekolah :							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23 %	0,20 %	0,03%	0,18 %	0,08%	0,16 %	0,14 %
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33 %	0,30 %	0,02%	0,28 %	1,91%	0,26 %	0,24 %
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,29 %	1,25 %		1,23 %		1,21 %	1,15 %
	Angka Lulus Siswa Sekolah :							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,58 %	99,60 %		99,70 %	100,00 %	99,80 %	99,90 %
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %	100,00 %
	Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,89 %	78,84%	81,5	79,81	79,31	80,78	81,75%
	Rasio guru/murid SD/sedrajat per kelas rata-rata (SPM)	14,90	15,00		16,00		16,50	17,00
	Rasio guru terhadap murid SMP/sedrajat (SPM)	12,7	13,00		13,25		13,50	13,75
	Rasio guru terhadap murid SMA/sedrajat per kelas rata-rata (SPM)	10,5	11,00		11,25		11,60	11,75
	KESEHATAN							
	Status RSUD	Tipe D	D	D	D	C	C	C
	Jumlah Puskesmas Terakreditasi (dari 17 Puskesmas yang ada)	0	2	2	5	5	5	5
	Rasio posyandu per satuan penduduk	328	350		360		370	380

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	70	75		78		80	90
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	2	2		2		2	2
Rasio Dokter per satuan penduduk	18	18		25		>25	>25
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (perawat & bidan)	154	160		175		200	>200
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	17	17		17		17	17
Pelayanan Kesehatan Dasar							
- Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	80%	82,5%		85%		87,5%	90%
- Persentase Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	80%	82,5%	73%	85%	71%	87,5%	90%
- Cakupan kunjungan bayi	100%	100%	77%	100%	80%	100%	100%
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	61,29%	65,25	78%	69,21	58,59%	73,17	77,13
- Cakupan pelayanan anak balita	84,10%	86,75		89,4		92,05	94,7
- Cakupan peserta KB aktif	68,93	70,00	70%	75,00	68,29%	80,00	85,00
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	1	0		0		0	0
- Prevalensi HIV	N/A	N/A		<0,45		<0,45	<0,45
- Kejadian TB Per 1000 Orang	75	<75		<75		<70	<70

	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah Masyarakat Miskin yang diakomodir dalam Program Layanan BPJS (Konversi Jamkesda ke BPJS Daerah)	N/A	0	0	2500 Orang	5000 Orang	2500 Orang	2500 Orang
	- Jumlah pukesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)							
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S							
	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan saran kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota							
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%	100%

Persentase penduduk (Rumah Tangga) yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	N/A	>50		>50	67%	>50	>75
Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	N/A	>50		>50	48%	>50	>75
Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	1	0		0		0	0
PEKERJAAN UMUM							
Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Memadai (Baik+Sedang)	49,90%	54		58,5		63,19	67,87
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	638,72 KM	50 KM		60 KM		60 KM	60 KM
PERUMAHAN							
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	28,27%	35%		38%		40%	45%
Persentase Desa yang memiliki akses Listrik	66,12%	70,16%		72,58%		76,61%	77,41%
Luas kawasan permukiman kumuh	156,44 Ha	140,00		130,00		110,00	90,00
Jumlah Ruang terbuka hijau yang terbangun	3,1	2		2		2	2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase Program RPJMD tertuang kedalam RKPD	N/A	>50%		>85%		>85%	>85%
Persentase Kegiatan RKPD tertuang kedalam APBD	N/A	>50%		>85%		>85%	>85%
Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir didalam Perencanaan Pembangunan	N/A	>30%		>50%		>50%	>50%
PERHUBUNGAN							
Jumlah Terminal tipe C	5 Unit	-	0	-	0	1	1
Rasio ijin trayek							
Jumlah uji kir angkutan umum	0	0	0	0	50%	0	50%
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis							
Ketersediaan Fasilitas Uji KIR Angkutan Umum	Tidak ada	-	-	ada	-	ada	ada
Jumlah Laka Lantas	136 Kasus	<100		<100		<75	<75
LINGKUNGAN HIDUP							
Dokumen KLHS Dalam Penyusunan Dokumen RTRW	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Dokumen KLHS Dalam Penyusunan Dokumen RPJMD	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Jumlah Sungai yang dilakukan pemantauan Kualitas Air Sungai	N/A	11		10		11	10
Luasan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	212 Ha	100		100		100	100

	Luasan Ruang Terbuka Hijau yang diadakan	3,1 Ha	2		2		2	2
	KEPENDUDUKAN							
	Kepemilikan KTP	133.017			75,37% (146.856 jiwa)		80%	85%
	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 PDDK				23,72% (67.317)		45%	65%
	Ketersediaan database kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Indeks Pemberdayaan Gender	65%	65,2		65,3		65,3	65,35
	Persentase Partisipasi Wanita didalam bidang Politik	10,36%	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	>15
	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	10 Kasus	<5	26	<5	46	<5	<5
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							
	Peserta KB Aktif	68,93%	70	70	75	68,29%	80	90
	SOSIAL							
	Cakupan Pemberian bantuan bagi Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	100% (7 Unit)	-		28,58% (2 Unit)		28,58% (2 Unit)	14,29% (1 Unit)
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	N/A	10,00 %		20,00 %		35,00 %	50,00 %
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	N/A	15%		30%		45%	60%
	KETENAGA KERJAAN							
	Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	N/A	20 orang		30		30	40

	Pelayanan Informasi Tenaga Kerja	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,74%	<5	2,4%	<5	2,4%*	<5	<5
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Persentase Koperasi aktif	60,75 %	70	62	72	72	73	75
	Usaha Mikro dan Kecil	2.270 Unit	50		75	1.630	100	200
	PENANAMAN MODAL							
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	27	27		27		28	28
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1,4 M	>1,5 M	1,8M	>1,75 M	2,7M	>2 M	>2,25 M
	KEBUDAYAAN							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11		11		11	12
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8		8		8	8
	PEMUDA DAN OLAHRAGA							
	Jumlah Organisasi Pemuda	19	>20		>20		>20	>20
	Jumlah Organisasi Olahraga	27	28		29		30	31
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	>5		>5	1	>5	>10
	Jumlah Kegiatan Olahraga	N/A	>5		>5	2	>5	>5
	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0
	Lapangan olahraga (dibangun oleh Pemda)	N/A	0	0	0	0	1	0

	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
	Angka Kriminalitas	133 Kasus	<100		<50	40	<50	<50
	Jumlah Konflik Sosial	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 1000 penduduk	2,61	2,61		2,61		3,00	3,00
	Tingkat Partisipasi Pada Pemilu Legislatif	75,89%	75,89	75,89	75,89	75,89	75,89	>90
	Tingkat Partisipasi Pada Pemilu Kepala Daerah	67,57%	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57
	Kegiatan pembinaan politik daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	N/A	>5	4	>5	4	>5	>5
	Jumlah demo	2	<3		<3		<3	<3
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	PKK aktif	95,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1,17	1	1,34	1	1,51	1,68
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,14	2,45	2,76	2,76	2,76	3,07	3,38
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
	Angka Kemiskinan	18.400	15.000	18.040	13.000		11.000	10.000
	Jumlah SKPD yang telah Memiliki SOP							
	IKM terhadap	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

	Pelayanan Publik							
	Tingkat Capaian Kinerja Daerah	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
	Opini Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
	KEARSIPAN							
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Tidak ada					ada	ada
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Pameran/expo	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Cakupan Kecamatan yang telah memiliki akses/ Jaringan Internet	17,65%	23,53%		29,41%		35,29%	41,18%
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
	Produksi padi / tahun	81.726	85.812	111.323	90.102		94.608	99.338
	Produksi jagung /tahun	77.484	81.358	124.363	85.426		89.697	94.182
	Produksi Ikan tangkap / tahun	1.734	1.820	1452,9	1.900		2.000	2.200
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	N/A	31,82	31,61	31,71		31,60	31,49
	PARIWISATA							
	Jumlah Destinasi Wisata	4	4	4	4	4	5	5
	Jumlah Kunjungan Wisata							
	• Wisatawan Domestik	269.575	280.000	296.532	300.000		350.000	360.000
	• Wisatawan Mancanegara	1.285	1.300	1.387	1.400		1.600	1.750

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan. Khusus kepada Kepala OPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2019 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta kegiatan dan lokasinya. Selain itu Kepala OPD segera menyusun kerangka regulasi yang diperlukan dan rencana anggaran untuk mendukung pencapaian program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala OPD yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang mengevaluasi program dan indikator capaian makro melalui laporan Kepala OPD, sedangkan untuk mengetahui

keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap program dimaksud.

Evaluasi RKPD Tahun 2017 pada tahun 2018 merupakan hal yang sangat penting mengingat hasil evaluasi tersebut tidak saja sebagai fungsi pengendalian perencanaan namun sekaligus sebagai informasi yang esensi dalam menyusun rencana pembangunan tahap berikutnya. Evaluasi RKPD Tahun 2018 merupakan starting point dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019 dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Evaluasi terhadap capaian RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021.

Bengkayang, Juni 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					KABKOTA	PROPINSI	APBN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			34.739.899.250,00	278.628.051.832,00	313.367.921.063,00	3.950.000.000,00	-	-
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			2.898.500.000,00	84.165.185.000,00	87.063.685.000,00	-	-	-
<i>Dinas Pendidikan</i>								
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		2.213.500.000,00		2.213.500.000,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150.000.000,00		150.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		8.000.000,00		8.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		320.000.000,00		320.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		25.000.000,00		25.000.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		300.000.000,00		300.000.000,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		300.000.000,00		300.000.000,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.000.000,00		15.000.000,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan		53.500.000,00		53.500.000,00			
	Penyediaan Makanan & Minuman		50.000.000,00		50.000.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		200.000.000,00		200.000.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		250.000.000,00		250.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		450.000.000,00		450.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas		72.000.000,00		72.000.000,00			
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		130.000.000,00		130.000.000,00			
	Pengadaan Mebeler		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya		30.000.000,00		30.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		30.000.000,00		30.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		30.000.000,00		30.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		20.000.000,00		20.000.000,00			
	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		20.000.000,00		20.000.000,00			
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		150.000.000,00		150.000.000,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		150.000.000,00		150.000.000,00			
	Bimbingan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Pendidikan							
	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>		173.000.000,00		173.000.000,00			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		6.000.000,00		6.000.000,00			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		8.000.000,00		8.000.000,00			
	Penyusunan RENJAS SKPD		8.000.000,00		8.000.000,00			
	Penyusunan LAKIP		6.000.000,00		6.000.000,00			
	Penyusunan RKA, DPA RKAP dan DPPA-SKPD		15.000.000,00		15.000.000,00			
	Penyusunan Revisi RENSTRA Dibud Tahun 2016-2021		50.000.000,00		50.000.000,00			
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		80.000.000,00		80.000.000,00			
	<i>Program Optimalisasi Pemasfasahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>		82.000.000,00		82.000.000,00			
	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran		6.000.000,00		6.000.000,00			
	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun		6.000.000,00		6.000.000,00			
	Pendataan & pengelolaan aset daerah		80.000.000,00		80.000.000,00			
	<i>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan</i>		45.000.000,00		45.000.000,00			
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Publikasi dan Pemberitaan melalui Media Massa		25.000.000,00		25.000.000,00			
	<i>Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan</i>		65.000.000,00		65.000.000,00			
	Peringatan Hari Aksara Internasional		25.000.000,00		25.000.000,00			
	Peringatan Hari Pendidikan Nasional		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Peringatan Hari Guru Nasional		20.000.000,00		20.000.000,00			
	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>			3.225.400.000,00	3.225.400.000,00			
	Pembangunan Gedung Sekolah	4 Unit		850.000.000,00	850.000.000,00			
	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa			1.705.400.000,00	1.705.400.000,00			
	Pengadaan Alat Praktek dan Alat Peraga			200.000.000,00	200.000.000,00			
	Pengadaan Mebelkur Sekolah			140.000.000,00	140.000.000,00			
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini			30.000.000,00	30.000.000,00			
	Lomba Pembuatan Alat Permainan Tingkat Kabupaten			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Lomba Kreativitas PAUD			35.000.000,00	35.000.000,00			
	Jambore PAUD			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Penyusunan Database PAUD			35.000.000,00	35.000.000,00			
	Bimbingan Guru PAUD			30.000.000,00	30.000.000,00			
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tingkat PAUD			50.000.000,00	50.000.000,00			
	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>			285.000.000,00	285.000.000,00			
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Renovasi Cagar Budaya	2 Unit		150.000.000,00	150.000.000,00			
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	1 Kegiatan		35.000.000,00	35.000.000,00			
	Sosialisasi Pelestarian Nilai Seni Budaya Lokal Daerah dan Nilai-Nilai Tradisional di sekolah	1 Kegiatan		50.000.000,00	50.000.000,00			
	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>			23.731.089.000,00	23.731.089.000,00			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD/MI			3.356.066.000,00	3.356.066.000,00			
	Perbaikan Ruang Kelas Baru Sekolah SD/MI			800.000.000,00	800.000.000,00			
	Perbaikan Ruang Kelas Baru Sekolah SMP/MTs	1 Paket		200.000.000,00	200.000.000,00			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMP/MTs			1.491.499.000,00	1.491.499.000,00			
	Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Sarana Pendidikan			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Pengadaan Meubeler Sekolah SD/MI	20 Sekolah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			
	Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	2 Sekolah		125.000.000,00	125.000.000,00			
	Pengadaan Meubeler Sekolah SMP/MTs	10 Sekolah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Paqar Sekolah SD/MI	7 Sekolah		1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			
	Pembangunan Paqar Sekolah SMP/MTs	1 Sekolah		200.000.000,00	200.000.000,00			
	Pembangunan Asrama Siswa SMP/MTs	1 Sekolah		200.000.000,00	200.000.000,00			
	Rehab sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	40 Sekolah		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00			
	Rehab sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	15 Sekolah		3.690.524.000,00	3.690.524.000,00			
	Olimpiade Sains Siswa Tingkat SD/MI			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Olimpiade Sains Siswa Tingkat SMP/MTs			45.000.000,00	45.000.000,00			
	Festival dan lomba seni tingkat SMP/MTs			30.000.000,00	30.000.000,00			
	Festival dan lomba seni tingkat SD/MI			40.000.000,00	40.000.000,00			
	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Tingkat SMP/MTs	1 Kegiatan		240.000.000,00	240.000.000,00			
	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Tingkat SD/MI	1 Kegiatan		235.000.000,00	235.000.000,00			
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SD/MI	1 Kegiatan		310.000.000,00	310.000.000,00			
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP/MTs	1 Kegiatan		283.000.000,00	283.000.000,00			
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAN) Tingkat SD/MI	1 Kegiatan						
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAN) Tingkat SMP/MTs	1 Kegiatan		50.000.000,00	50.000.000,00			
	Sharing Penyaluran Program Indonesia Pintar Jenjang SD (PIP)			35.000.000,00	35.000.000,00			
	Sharing Penyaluran Program Indonesia Pintar Jenjang SMP/MTs (PIP)			30.000.000,00	30.000.000,00			
	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	1 Kegiatan		25.000.000,00	25.000.000,00			
	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)	1 Kegiatan		25.000.000,00	25.000.000,00			
	<i>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen (Arsip Daerah)</i>			3.500.000,00	3.500.000,00			
	Pengelolaan dan Penataan Arsip di Lingkungan SKPD			3.500.000,00	3.500.000,00			
	<i>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>			335.000.000,00	335.000.000,00			
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Lomba Cerdas Cermat Permuseum			30.000.000,00	30.000.000,00			
	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal			50.000.000,00	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORAAN BAYAR (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rapat Koordinasi Tim Perencanaan Obat Kabupaten	1 Dokumen	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			2.056.120.000,00	2.056.120.000,00	-	-	-	-
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Kab. Bengkulu	100 %	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan Daerah Terpadu, Partisipasi dan Kepuasan (DTPK) (DAK)	2 Kecamatan	-	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja (DAK)	17 Puskesmas	-	598.246.000,00	598.246.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Reproduksi (DAK)	17 Puskesmas	-	294.890.000,00	294.890.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Lainya (DAK)	17 Puskesmas	-	219.184.000,00	219.184.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Pembinaan pengobatan tradisional	1 Laporan	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Laporan	-	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Obat dan Makanan			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan pengawasan oncom dari bahan berbahaya	2 Laporan	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			883.174.000,00	883.174.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Media Promosi Tingkat Kecamatan	17 Kecamatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Upaya Promosi Kesehatan (DAK)	17	-	640.174.000,00	640.174.000,00	-	-	-	-
	Survei kejuruan usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan	17 Perusahaan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan Petugas Pendataan Keluaran Sehat (KS)	17 Org	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	17 Puskesmas	-	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-	-
	Partisipasi Pembangunan Desa Sasor Aktif	122 Kepala Desa	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program Perilaku Gizi Masyarakat			1.161.184.000,00	1.161.184.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan dan Penyegaran Konektor ASI Eksklusif bagi petugas Puskesmas dan Kader Pos	Nutrisi 17 Org, Kader Poeyandu 51 org	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Peluang Gizi, Debu dan Parasit dalam penanggulangan Gizi Buruk	51 Org	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	963.184.000,00	963.184.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	34 org	-	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Lingkungan Sehat			843.713.000,00	843.713.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan/pengawasan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	51 Desa	-	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan/pengawasan sanitasi toilet berbasis masyarakat (STBM)	34 Org	-	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Lingkungan (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	622.713.000,00	622.713.000,00	-	-	-	-
	Pencapaian Wajar Tawar K4	1 Paket	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Pencapaian Limbah Rumah Sakit	2 RSUD	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat			1.547.929.000,00	1.547.929.000,00	-	-	-	-
	Pertemuan/Forum sarana rumah	50 Unit	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan alat feeding dan bahan-bahan feeding	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan pengujian dan penanggulangan penyakit menular (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	1.222.929.000,00	1.222.929.000,00	-	-	-	-
	Pertemuan tatap muka kejurat DGB	1 Laporan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria	1 Laporan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pertemuan berkelembagaan program literasi (TB)	1 Laporan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi penyakit Fluensa	1 Laporan	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi Pencegahan Kasus Zoonosis	1 Laporan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pencegahan dan Pencegahan HIV/AIDS	1 Kegiatan	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			5.636.514.750,00	5.636.514.750,00	-	-	-	-
	Penyusunan Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil	300 org	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Konsultasi dan Pembinaan Taktis BOK (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	411.277.000,00	411.277.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Habis Pakai BOK Puskesmas (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	427.049.750,00	427.049.750,00	-	-	-	-
	Berkas Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten (DAK NON FSK)	2 Kegiatan	-	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	-	-	-	-
	Dukungan Manajemen Berkas Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	500.188.000,00	500.188.000,00	-	-	-	-
	Aktivitas Puskesmas (DAK NON FSK)	5 Puskesmas	-	2.620.000.000,00	2.620.000.000,00	-	-	-	-
	Aktivitas RSUD (RSUD)	1 RSUD	-	-	-	-	-	-	-
	Kalibrasi dan Standarisasi Alat Kesehatan Puskesmas	3 Puskesmas Rawat Inap	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pembelian SDM Kesehatan pada UPT	1 dokumen	-	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	-	-
	Pembentukan BLUD Puskesmas	2 Puskesmas	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Analisa Jabatan dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	813 org	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan Manajemen Puskesmas	34 org	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana			2.980.000.000,00	2.980.000.000,00	-	-	-	-
	puskesmas/puskesmas pembantu dan lurungpuskesmas			440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSPTU)	2 Unit	-	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan Instalasi Pencucian Air Limbah (PAL)	3 Unit	-	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	-	-	-	-
	Pembelian Lindungan Puskesmas Jacoq Bawang	1 Paket	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Pembelian Lindungan Puskesmas Sidang	1 Paket	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Rehabilitasi Posdesdes, Desa Ampar Bawang Kec. Teriak	1 Unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Renovasi Gedung Pusat Ocutan Permat. Desa Lebeh Bawang Kec. Lembah Bawang	1 Unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Rumah			7.771.483.000,00	7.771.483.000,00	-	-	-	-
	Sakit Para-Paru/Rumah Sakit Jaga			3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	3 unit	-	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-	-	-
	Pencapaian Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	5 Paket	-	3.971.483.000,00	3.971.483.000,00	-	-	-	-
	Program Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Rumah			215.000.000,00	215.000.000,00	-	-	-	-
	Sakit Para-Paru/Rumah Sakit Jaga			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulans/ferozah	4 Unit	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-
	Program Kemirisan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	-
	Kemirisan peningkatan kualitas dokter dan perawat	100 %	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lainya			506.157.000,00	506.157.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Lansia Usia (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	506.157.000,00	506.157.000,00	-	-	-	-
	Program peningkatan kompetensi ibu melahirkan dan anak			5.517.526.000,00	5.517.526.000,00	-	-	-	-
	Evaluasi dan supervisi program kesehatan ibu, anak dan kesehatan keluarga	17 Puskesmas	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi Pencapaian Kapasitas Penolong Program Pelayanan Anestesi Care (ANC) Terpadu	45 org	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pertemuan Peningkatan Cakupan Personel Tenaga Kesehatan (PN) dan Kunjungan Nifas (KF) melalui kemirisan badan dan dukan bayi	45 org	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Jaminan Persewaan (Jampersel)	1630 org	-	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Ibu-termasuk KB (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	1.101.682.000,00	1.101.682.000,00	-	-	-	-
	Upaya Kesehatan Bayi (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	665.844.000,00	665.844.000,00	-	-	-	-
	Program Inisiasi			1.683.573.000,00	1.683.573.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi program Inisiasi	17 Puskesmas	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Logistik dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	17 Puskesmas	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Inisiasi (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	1.539.573.000,00	1.539.573.000,00	-	-	-	-
	Pencapaian Data Quality Assessment (DQS)	17 Puskesmas	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Inisiasi	34 Org	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program sistem informasi kesehatan			289.277.250,00	289.277.250,00	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Kesehatan	1 dokumen	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pengembangan Website Ciri Kesehatan dan Keluaran Berencana	1 website	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Pencapaian Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Kesehatan	2 Puskesmas	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (DAK NON FSK)	17 Puskesmas	-	164.277.250,00	164.277.250,00	-	-	-	-
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM)			7.308.000.000,00	7.308.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional	17 Puskesmas	-	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan jaminan kesehatan Daerah	8000	-	2.208.000.000,00	2.208.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			2.889.088.000,00	2.889.088.000,00	-	-	-	-
	Pencapaian Alat Kesehatan Medis dan non medis serta sarana dan prasarana (DAK)	8 Pkt	-	2.889.088.000,00	2.889.088.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Peningkatan Perilaku Tidak Menular			1.091.759.000,00	1.091.759.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan layanan surveilans	1 Laporan	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PEKERJAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					KABKOTA	PROVINSI	APBN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemusunan Perda tentang anggaran merokok pada kawasan sekolah	1 Perda		50.000.000,00	50.000.000,00			
	Pelatihan Penegakan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan	51 Org		70.000.000,00	70.000.000,00			
	Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK NON FISK)	17 Puskesmas		679.864.000,00	679.864.000,00			
	Upaya Kesehatan Jiwa (DAK NON FISK)	17 Puskesmas		261.895.000,00	261.895.000,00			
	Program Peningkatan Pelayanan			11.950.000.000,00	11.950.000.000,00			
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1 RSUD		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sungsai Dari	1 PKM		650.000.000,00	650.000.000,00			
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jago Babang	1 PKM		400.000.000,00	400.000.000,00			
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Non BLUD	15 PKM		900.000.000,00	900.000.000,00			
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Program Keluarga Berencana			628.000.000,00	628.000.000,00			
	Pembinaan Keluarga Berencana	20 klinik		25.000.000,00	25.000.000,00			
	Hari Keluarga Nasional	1 Laporan		45.000.000,00	45.000.000,00			
	Facilitasi Tim Manunggal KB Kesehatan	1 Laporan		40.000.000,00	40.000.000,00			
	Bulan Dhialo KB Kesehatan Bhayangkara	1 Laporan		40.000.000,00	40.000.000,00			
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi KB	1 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Kesehatan Generik PKW-KB Kesehatan	1 Laporan		45.000.000,00	45.000.000,00			
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK NON FISK)	20 klinik		48.000.000,00	48.000.000,00			
	Pembinaan Sakti Yonaras	1 Laporan		45.000.000,00	45.000.000,00			
	Pembinaan Pelayanan MOW dan MOP	1 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Pembinaan PK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	1 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Dukungan Manajemen dan KEBOKS (DAK NON FISK)	1 Laporan		250.000.000,00	250.000.000,00			
	Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam KB/RK yang mandiri			2.830.220.000,00	2.830.220.000,00			
	Penyediaan tenaga penyuluh KB	17 Org		428.400.000,00	428.400.000,00			
	Facilitasi koordinasi pengendalian penduduk	1 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Facilitasi kemitraan KB	1 Laporan		68.000.000,00	68.000.000,00			
	Pelatihan Tenaga Penyuluh KB	17 Kecamatan		75.000.000,00	75.000.000,00			
	Penyediaan Operasional Buletin Penyuluh KB (DAK NON FISK)	17 Kecamatan		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			
	Penggerakan Masyarakat (DAK NON FISK)	17 Kecamatan		1.236.920.000,00	1.236.920.000,00			
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB			80.000.000,00	80.000.000,00			
	Penyediaan Informasi data Mikro	2 Laporan		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Pengembangan Profil dan Proyekasi sasaran	1 Dokumen		30.000.000,00	30.000.000,00			
	Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB			2.192.950.000,00	2.192.950.000,00			
	Pengadaan Sarana kerja bagi PKBPL/KBAPPL/KB	1 Paket		600.000.000,00	600.000.000,00			
	Pengadaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1 Paket						
	Perbaikan Buletin Penyuluh KB	5 Unit		792.000.000,00	792.000.000,00			
	Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB	1 Unit		800.950.000,00	800.950.000,00			
	PEKERJAAN UMUM			2.624.877.900,00	2.624.877.900,00			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2.624.877.900,00	2.624.877.900,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.288.049.500,00	2.288.049.500,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.200.000,00		2.200.000,00			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		123.420.000,00		123.420.000,00			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perorotan kendaraan dinas/operasional		47.850.000,00		47.850.000,00			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		657.223.600,00		657.223.600,00			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		11.000.000,00		11.000.000,00			
	Penyediaan alat tulis kantor		101.519.000,00		101.519.000,00			
	Penyediaan barang bekalan dan penggantian		72.160.000,00		72.160.000,00			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.720.000,00		5.720.000,00			
	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		27.500.000,00		27.500.000,00			
	Penyediaan makanan dan minuman		27.500.000,00		27.500.000,00			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		127.004.900,00		127.004.900,00			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		27.500.000,00		27.500.000,00			
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/kantor		1.057.452.000,00		1.057.452.000,00			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		190.190.000,00		190.190.000,00			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		15.840.000,00		15.840.000,00			
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		42.350.000,00		42.350.000,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		110.000.000,00		110.000.000,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor							
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		22.000.000,00		22.000.000,00			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		33.000.000,00		33.000.000,00			
	Pendidikan dan pelatihan formal		33.000.000,00		33.000.000,00			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan		66.137.500,00		66.137.500,00			
	penyusunan laporan keuangan akhir tahun		8.140.000,00		8.140.000,00			
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		8.140.000,00		8.140.000,00			
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD		8.140.000,00		8.140.000,00			
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD		11.000.000,00		11.000.000,00			
	Penyusunan Analisa Jabatan		8.140.000,00		8.140.000,00			
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		8.140.000,00		8.140.000,00			
	Survey harga barang dan jasa		14.437.500,00		14.437.500,00			
	Program Peningkatan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan		47.500.000,00		47.500.000,00			
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		27.500.000,00		27.500.000,00			
	Publikasi dan pemberitaan melalui media massa		20.000.000,00		20.000.000,00			
	Program pembangunan jalan dan jembatan			8.017.891.333,00	8.017.891.333,00			
	Perencanaan Pembangunan Jalan							
	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Sumber DAU			1.160.941.333,00	1.160.941.333,00			
	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Sumber DAK			1.006.950.000,00	1.006.950.000,00			
	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan							
	Pembangunan Jalan Kabupaten Bengkayang	6 Paket		3.050.000.000,00	3.050.000.000,00			
	Pembangunan Jembatan Kabupaten Bengkayang	11 Paket		2.900.000.000,00	2.900.000.000,00			
	Program Lingkungan Sehat dan Pertahanan			1.716.750.000,00	1.716.750.000,00			
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin							
	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah domestik (PALD) terpusat skala permukiman, jeringan pengumpul dan sambungan rumah (SR) dengan jumlah layanan							
	- minimal 50 KK lokasi Ds. Suka Maju Kec. Sungai Betung			545.000.000,00	545.000.000,00			
	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah domestik (PALD) terpusat skala permukiman, jeringan pengumpul dan sambungan rumah (SR) dengan jumlah layanan							
	- minimal 50 KK lokasi Ds. Sanga Koc. Sanga Lado			545.000.000,00	545.000.000,00			
	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah domestik (PALD) terpusat skala permukiman, jeringan pengumpul dan sambungan rumah (SR) dengan jumlah layanan							
	- minimal 50 KK lokasi Ds. Seba'u Kec. Samalindan			545.000.000,00	545.000.000,00			
	- Perencanaan Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik (PALD)			81.750.000,00	81.750.000,00			
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	21 Unit						
	- Rehabilitasi Jembatan Tampe Bawah RT.009RW 005 Lk. 10x4 M	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jembatan Sungai Sembani Dusun Saporang, Desa Bukit Serayan	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jembatan 5 Unit Desa Godang Damar	5 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jembatan Pak Abik Dusun Pangkalan Darat RT.0 dan Dusun Pangkalan Pasar	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jembatan Dusun Sapan dan Dusun Sndang Kaeh Desa Kumbe 4 Unit	4 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jembatan Sungai Mhal Dusun Sebaloe, Desa sanga Uk.8x4 M	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KUMERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KABKOTA	PROVINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Rehabilitasi Jembatan Nrubuh Penghubung Desa Pisak-Desa Bengkulu uk. 12x4 M	1 Unit	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
	- Rehabilitasi Jembatan Anjot, Desa Suka Maju 1 Unit	1 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	- Rehabilitasi Jembatan Sungai Daun, Desa Suka Maju 1 Unit	1 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	- Rehabilitasi SedangBerat Jembatan	5 Unit	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan							
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	4 Unit	-	553.280.000,00	553.280.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya							
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		-	3.464.368.600,00	3.464.368.600,00	-	-	-
	- Perencanaan Jaringan Irigasi		-	464.368.600,00	464.368.600,00	-	-	-
	- Perencanaan Sumber Air Baku (Optimalisasi Program Cetak Sawah)		-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	Pembangunan Jaringan Irigasi	5 Unit	-	-	-	-	-	-
	- Pembangunan Irigasi Juku Atas Desa Bhakti Muli Kec. Bengkuluang		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
	- Pembangunan Irigasi BerabasNek Bek RT.9 Desa Tumbang Kec. Samalantan		-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	- Pembangunan Irigasi Baribamban RT.02 Padang Desa Tumbang, Kec. Samalantan		-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	- Pembangunan Irigasi Dusun Angkap RTRW 01 Berbatasan dgn RTRW 02 Da. Bangun Sari Kec. Tenak		-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-
	- Pembangunan Irigasi Desa Seles Kec. Ledo		-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun		-	-	-	-	-	-
	- Insentif Peluasan Pemakai Pintu Air (PPA)		-	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	-
	- Pemeliharaan/Pemeliharaan Bangunan Irigasi dan Saluran Primer		-	374.000.000,00	374.000.000,00	-	-	-
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi	25 Unit	-	12.166.000.000,00	12.166.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Selise (DAK)	1 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sabau (DAK)	1 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Samalantan (DAK)	1 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Aping (DAK)	1 Unit	-	1.716.000.000,00	1.716.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tumbang (DAK)	1 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Jarak (DAK)	1 Unit	-	790.000.000,00	790.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I BeningMarga Muya (DAK)	1 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sendorang (DAK)	1 Unit	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sarangan (DAK)	1 Unit	-	650.000.000,00	650.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sabanduk (DAK)	1 Unit	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Benzang (DAK)	1 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sebelung Menyala (DAK)	1 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Dan. Byur Desa Papan Tembawang Kec. Lembah Bawang	1 Unit	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Dan. Nek Bare Desa Babane Kec. Samalantan	1 Unit	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Lutang Kec. Tenak	1 Unit	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-
	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi	5 Unit	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-
	Program Penyusunan Database/Sistem Informasi Jaringan Irigasi Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	-	518.300.000,00	518.300.000,00	-	-	-
	- Penyusunan Database Irigasi Kabupaten Bengkulu		-	518.300.000,00	518.300.000,00	-	-	-
	Program Penyediaan dan Peningkatan Air Baku							
	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Sirkulasi Pembawa	5 Unit	-	14.152.552.900,00	14.152.552.900,00	-	-	-
	- Pembangunan IPA Sederhana Desa Sungkung I. Kec. Siding Kapasas 10 Iket (DAK)	1 Unit	-	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	-	-	-
	- Pembangunan IPA Sederhana Desa Pisak. Kec. Tuah Bales Kapasas 10 Iket (DAK)	1 Unit	-	2.418.838.000,00	2.418.838.000,00	-	-	-
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan ide capacity dari IKKSPAM	1 Unit	-	2.351.162.000,00	2.351.162.000,00	-	-	-
	- Samalantan (DAK)		-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan ide capacity dari IKKSPAM	1 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-
	- Desa Opla Karya Kec. Sunga Belang		-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan ide capacity dari IKKSPAM	1 Unit	-	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	-	-
	- Desa Seta Jaya Kec. Tenak		-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jaringan Air Bersih, Piporansi dan Air Bersih Di Lembang Kec. Sanggau	1 Unit	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-
	- Ledo		-	-	-	-	-	-
	- Penyusunan RISPAM Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	-	696.552.900,00	696.552.900,00	-	-	-
	- Penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen	-	486.000.000,00	486.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	6 KM	-	41.289.000.000,00	41.289.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Rusa Jalan Rangkang-Megrayang	1 paket	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	-
	- Peningkatan Jalan Jembatan Tampi Atas Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkuluang	1 paket	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Jalan Sebaku-Tamong (lanjutan DAK 2018)	1 paket	-	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Jalan Capukle-Ara (lanjutan DAK 2017)	1 paket	-	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Jalan Pakuhang-Sebau (DAK)	1 paket	-	1.389.000.000,00	1.389.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Jalan Kabupaten Bengkuluang	26 Paket	-	15.650.000.000,00	15.650.000.000,00	-	-	-
	PERUBAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.628.650.000,00	35.856.000.000,00	37.282.650.000,00	-	-
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERUMUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.628.650.000,00	35.856.000.000,00	37.282.650.000,00	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Surat	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	17 Unit	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa administrasi kependudukan	304 OB	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22 Item	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	51 Item	-	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	179.282 lembar	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan bahan busana dan peralatan pendukung-undangan	5 Eksemplar	-	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman	100 Kotak	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 OH	-	204.650.000,00	204.650.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	173 OH	-	332.000.000,00	332.000.000,00	-	-	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	180 OB	-	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional		-	218.000.000,00	218.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan perlengkapan gedung kantor	22 Unit	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Komputer dan perkengkapannya	3 Unit	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	14 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perkengkapannya	20 Unit	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	Penyediaan Pakelan Dinas beserta perkengkapannya		-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Pakelan Kerja Lapangan	46 Oru	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Pakelan KORPRI		-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Pendidikan dan pelatihan formal	6 org	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja	1 Dokumen	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan LAMP	1 Dokumen	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Informasi Pembangunan							
	Pameran Pembangunan Tingkat Nasional		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Provinsi		-	-	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	1 Kali	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perumahan							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perumahan (DAK)	1 Tahun	-	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Perumahan Rakyat							
			-	8.511.000.000,00	8.511.000.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER
					APBD		APBN	
					KABIKOTA	PROPNBI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
	Perencanaan dan Pendevidan Keada DAMKAR							
	Rapat Konsultasi Teknik (RAKONTEK) DAMKAR			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan			259.000.000,00	259.000.000,00	-	-	-
	Pelaksanaan Patroli Wawak			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Pengamanan Hari Raya (Natal, Idul Fitri, Imlek dan Tahun Baru)			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
	Pengamanan Keselamatan Lingkungan			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Pembangunan Pos Jasa Ronda/Pos Kamling							
	Pelaksanaan Terorok Pendevidan keselamatan dan kenyamanan lingkungan			84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Perda dan Perkada							
	Penerbitan berbagai bea/bantuan perizin dan reklame							
	Penerbitan Perda Keterlambatan Umum							
	Program Pemeliharaan Kelestarian dan Penguasaan Tanah Keras			3.607.500.000,00	3.607.500.000,00	-	-	-
	Bimbingan ke Kecamatan	17 kecamatan		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Rakor Kasi Tanah Kecamatan se-Kab. Bengkulu	1 kegiatan		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Penerbitan Tenaga Pendevidan Peraturan Daerah (asist Honor Barot)	1 tahun		3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-	-	-
	Pengamanan/Pengamanan Pelebat daerah/kecamatan			52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	-
	Kerjasama Pembangunan Kemampuan Analis Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan	1 kegiatan		52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	-
	Penerbitan Pelanggaran terhadap Perda (Tinjauan)			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Penyuluhan peningkatan ketertarikan dan ketertarikan desa							
	Pelaksanaan Perwidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda			52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	-
	Penyusunan Perda dan Perwidikan PNS							
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Ubacara HUT Pobo dan HUT Selammas dan HUT DAMKAR	1 kegiatan		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-
	Operasi Penyelidikan Masyarakat bersama Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri	1 kegiatan		35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
	Penerbitan Pendevidan Penyelidikan Masyarakat	1 kegiatan		125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Penguasaan Kesehatan			200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-
	Simulasi dan pelatihan pemadam kebakaran			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Operasional Pemadam Kebakaran	1 tahun		150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Perawatan Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Sosialisasi Perda di Kabupaten Bengkulu			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			862.294.000,00	789.786.000,00	1.855.000.000,00		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			588.500.000,00	588.500.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.232.000,00	30.232.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-
	Jumlah bahan cetak dan penggantian			38.850.000,00	38.850.000,00	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.150.000,00	5.150.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku & Peraturan Poudan-Undangan			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			25.750.000,00	25.750.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			206.412.000,00	206.412.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			77.250.000,00	77.250.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			172.080.000,00	172.080.000,00	-	-	-
	Pengadaan Perengkapan gedung kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Perlembagaan gedung kantor			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perlembagaan			15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor			6.180.000,00	6.180.000,00	-	-	-
	Pembangunan Gedung Aula Rapat							
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer			15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			48.925.000,00	48.925.000,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Penyusunan RKA-DPA dan DPPA			10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rana			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Penyusunan LAKIP			7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Informasi dan Penguasaan			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Penerapan Pembangunan tingkat kabupaten			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Politik Masyarakat			175.100.000,00	175.100.000,00	-	-	-
	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik			20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	-
	Pendidikan Politik kepada Masyarakat			30.900.000,00	30.900.000,00	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai			51.500.000,00	51.500.000,00	-	-	-
	Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas, SW/Toga dan Toga			51.500.000,00	51.500.000,00	-	-	-
	Facilitasi Peraturan Perundang-undangan bagi partai politik			20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			271.500.000,00	271.500.000,00	-	-	-
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
	Pemertanian Bela negara							
	Facilitasi FKUB			80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-
	Rapat koordinasi Komando			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Pendidikan, Pembinaan dan Pemertanian Ormas/LSM			60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Kepertanian			51.500.000,00	51.500.000,00	-	-	-
	Sinergis Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda							
	Program Kamtibmas Pengembangan Wawasan Kebangsaan			106.296.000,00	106.296.000,00	-	-	-
	Pengelolaan bantuan bagi ormas / LSM			36.050.000,00	36.050.000,00	-	-	-
	Facilitasi Forkopimda			70.246.000,00	70.246.000,00	-	-	-
	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebergopolitikan							
	Program Peningkatan Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan			133.900.000,00	133.900.000,00	-	-	-
	Pendidikan Penanganan Konflik bagi Tokoh Masyarakat							
	Peningkatan Pemertanian Situasi dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerusakan Sosial Politik			51.500.000,00	51.500.000,00	-	-	-
	Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda			41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	-
	Pemertanian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	-
	Program Dukung Pelaksanaan Pemilu			103.000.000,00	103.000.000,00	-	-	-
	Facilitasi Pemertanian Atribut / Balho Pilup 2018			41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	-
	Koordinasi dan Monitoring Pilkada			61.800.000,00	61.800.000,00	-	-	-
SOSIAL				1.348.720.000,00	2.427.500.000,00	3.677.225.000,00	6.958.000.000,00	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ANAK				1.348.720.000,00	2.427.500.000,00	3.677.225.000,00	6.958.000.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			790.303.000,00	790.303.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa surat menyurat			500.000,00	500.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			122.950.000,00	122.950.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa pemertanian dan perizinan kendaraan dinas/Operasional			8.758.000,00	8.758.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERUBAHAN BIAYA (Pb)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan barang pesanan dan pengadaan		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Penyediaan komponen instalasi perlengkapan bangunan kantor		3.565.000,00		3.565.000,00				
	Penyediaan bahan besam dan peraturan perundang-undangan		10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyediaan makanan dan minuman		13.500.000,00		13.500.000,00				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		150.000.000,00		150.000.000,00				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		100.000.000,00		100.000.000,00				
	Penyediaan jasa tenaga administrasi kelas perkarawati		157.200.000,00		157.200.000,00				
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		216.712.000,00		216.712.000,00				
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional		-		-				
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pengadaan Meubelair		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		41.700.000,00		41.700.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		40.000.000,00		40.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor		30.012.000,00		30.012.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		-		-				
	Rehabilitasi sadengberat kendaraan dinas/operasional		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Program Pemeliharaan Disiplin Aparatur		30.000.000,00		30.000.000,00				
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perengkapannya		15.000.000,00		15.000.000,00				
	Pengadaan Pakelan Khusus Hari-Hari Tertentu		15.000.000,00		15.000.000,00				
	Pengadaan Absensi Sidik Jari Elektronik		-		-				
	Program Pemeliharaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000,00		40.000.000,00				
	Pendidikan dan pelatihan formal		40.000.000,00		40.000.000,00				
	Program Pemeliharaan Peningkatan Sistem Pelaporan		65.265.000,00		65.265.000,00				
	Capaian Kinerja dan Kesuksesan		-		-				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Indikator Realisasi Kinerja SKPD		10.410.000,00		10.410.000,00				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD)		7.775.000,00		7.775.000,00				
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) (Revisi)		35.000.000,00		35.000.000,00				
	Penyusunan LAKP		7.775.000,00		7.775.000,00				
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD		8.825.000,00		8.825.000,00				
	Penyusunan Analisa Jabatan		5.500.000,00		5.500.000,00				
	Program Optimalisasi Pemenuhan kebutuhan Barang MIB Daerah		22.425.000,00		22.425.000,00				
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Ura (RKBU) di lingkungan SKPD		7.475.000,00		7.475.000,00				
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Ura (RKBPU) di lingkungan SKPD		7.475.000,00		7.475.000,00				
	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran di lingkungan SKPD		-		-				
	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun di lingkungan SKPD		7.475.000,00		7.475.000,00				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan		40.000.000,00		40.000.000,00				
	Pameran pembangunan dan HLT Proklamasi RI		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Publikasi dan Pemberitaan melalui media massa		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan		35.000.000,00		35.000.000,00				
	Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Peringatan Hari Pahlawan		15.000.000,00		15.000.000,00				
	Program Pelaksanaan Monev dan Pelaksanaan Tugas Pokok Lainnya		-	237.500.000,00	237.500.000,00				
	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang berwujud dan APBN		-	137.500.000,00	137.500.000,00				
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		-	100.000.000,00	100.000.000,00				
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		460.000.000,00	460.000.000,00	4.000.000.000,00				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		25.000.000,00	25.000.000,00	-				
	Bulan Bhakti Colong Royong Masyarakat (BBGRM)		40.000.000,00	40.000.000,00	-				
	Teleskop Tepal Gunung		30.000.000,00	30.000.000,00	-				
	Pelaksanaan dan Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan		90.000.000,00	90.000.000,00	-				
	Pembinaan BUMDES		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pembinaan RPJMDDes dan RKPDes		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Facilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		45.000.000,00	45.000.000,00	-				
	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pembinaan dan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Poyandus		30.000.000,00	30.000.000,00	-				
	Penyusunan Usulan Infrastruktur Desa		-	-	4.000.000.000,00				
	Program Sosial		570.000.000,00	570.000.000,00					
	Rapat Koordinasi PKH (Nasional, Provinsi, Kabupaten)		40.000.000,00	40.000.000,00	-				
	Facilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan		40.000.000,00	40.000.000,00	-				
	Facilitasi Penyakitan Beras untuk Rakyat Miskin (RASKM)		30.000.000,00	30.000.000,00	-				
	Penanganan masalah-masalah strategis yang mengancam tingkat capaian dan ketahanan luar biasa		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pembinaan Organisasi dan Kemitraan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		55.000.000,00	55.000.000,00	-				
	Verifikasi dan validasi data peserta BPJS Kesehatan Bantuan Iuran (PBI)		70.000.000,00	70.000.000,00	-				
	Pendidikan dan Pelatihan para penyandang disabilitas dan eka trauma		70.000.000,00	70.000.000,00	-				
	Peringkatn kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		40.000.000,00	40.000.000,00	-				
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi lanjut usia		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Facilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial		35.000.000,00	35.000.000,00	-				
	Facilitasi kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT)		45.000.000,00	45.000.000,00	-				
	Facilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		45.000.000,00	45.000.000,00	-				
	Program Pemberdayaan Perempuan		400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00				
	Peringatan Hari Kartini		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Peringatan Hari Ibu		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Sosialisasi Pencabutan dan Pelaporan KDRT		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pengarusutamaan Gender (PUG)		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Pembinaan pemberdayaan perempuan terhadap tindak kekerasan		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Peningkatan keterampilan ibu Rumah Tangga Miskin menuju Keluarga Sejahtera		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Facilitasi PFRG bagi Fasilitas Penggerakan Kabupaten Bantul		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Program Perlindungan Anak		500.000.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00				
	Facilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PT2A)		200.000.000,00	200.000.000,00	-				
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan		30.000.000,00	30.000.000,00	-				
	Facilitasi Regenerasi Forum Anak Daerah (FAD)		90.000.000,00	90.000.000,00	-				
	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Facilitasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		30.000.000,00	30.000.000,00	-				
	Facilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)		100.000.000,00	100.000.000,00	-				
	Pelatihan Kader Perlindungan Anak		-	-	200.000.000,00				
	Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)		260.000.000,00	260.000.000,00	5.100.000.000,00				
	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal		75.000.000,00	75.000.000,00	-				
	Persiapan Data Daerah Tertinggal		50.000.000,00	50.000.000,00	-				
	Facilitasi Program Pusat dan Daerah		135.000.000,00	135.000.000,00	-				
	Pembangunan Air Bersih Daerah Tertinggal		-	-	200.000.000,00				
	Desa Tanjung Kec. Terik		-	-	200.000.000,00				
	Desa Seran Selimbau Kec. Lumar		-	-	200.000.000,00				
	Desa Sida Kec. Ledo		-	-	200.000.000,00				
	Desa Sukasaji Kec. Suli Semarang		-	-	200.000.000,00				
	Desa Dadi Kec. Sanggau Ledo		-	-	200.000.000,00				
	Desa Kamuh Kec. Tuhuh Belas		-	-	200.000.000,00				
	Desa Benokawan Kec. Tuhuh Belas		-	-	200.000.000,00				
	Desa Sinar Baru Kec. Jepi Babang		-	-	200.000.000,00				
	Desa Tamang Kec. Siding		-	-	200.000.000,00				
	Desa Sakalaru Kec. Lambah Bawang		-	-	200.000.000,00				
	Pembuatan Damirage Daerah Tertinggal		-	-	200.000.000,00				
	Desa Benteng Kec. Terik		-	-	200.000.000,00				
	Desa Lamokla Kec. Lumar		-	-	200.000.000,00				
	Desa Sukajaya Kec. Ledo		-	-	200.000.000,00				
	Desa Tapan Kec. Suli Semarang		-	-	200.000.000,00				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIH	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KAB/KOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Desa Dhaki Mulya Kec. Bangkayang Desa Sango Kec. Sanggau Ledo Desa Melayu Kec. Sekeloa Desa Sebambak Kec. Capitale Pembangunan Air Bersih Daerah Tersempai Desa Sintang Baru Kec. Monteado Desa Sintang Keran Kec. Sintang Raya Kepulauan Desa Sandunang Kec. Capitale Desa Kaban Kec. Sekeloa Desa Tempayan Kec. Lembak Bawang Desa Semuning Jaya Kec. Jago Babang					200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - - 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000			
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			9.395.693.000,00	13.455.621.000,00	22.851.314.000,00	1.640.000.000,00			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.481.000.000,00	2.673.340.000,00	2.490.340.000,00	1.478.000.000,00			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.481.000.000,00	2.673.340.000,00	2.490.340.000,00	1.478.000.000,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkawinan		1.138.000.000,00	-	1.138.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		130.000.000,00	-	130.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		145.000.000,00	-	145.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa koberehan kantor		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan alat tulis kantor		90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan barang cekakan dan pengapungan		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan komponen rekayasa listrik/beberapa banjuran kantor		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan makanan dan minuman		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran		500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		265.000.000,00	-	265.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan komputer dan perifernya		70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	
	Rahibilitasi gedung / berat kendaraan Dinas Operasional		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala komputer		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Pakuan Dinas beserta perlengkapan pakaian Sipil Harian (PSH)		-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	-	-	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		7.060.000,00	-	7.060.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Renc. SKPD		7.745.000,00	-	7.745.000,00	-	-	-	
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD		7.762.000,00	-	7.762.000,00	-	-	-	
	Penyusunan LAKIP SKPD		10.433.000,00	-	10.433.000,00	-	-	-	
	Program Penyelenggaraan Informasi Pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Pameran pembangunan lingkup kabupaten		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		-	120.000.000,00	120.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	
	Sosialisasi Penduduk Rentan Admnduk		-	-	-	-	-	-	
	Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Input/validasi data penduduk		-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	
	Pendaftaran penduduk Non Permanen		-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	
	Pemertanian Operasional Sarana dan Prasarana Perikanan dan Pencatatan KTP-el Kabupaten/Kota		-	-	-	100.000.000,00	-	-	
	Pemertanian Pendokumentasian Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Bebas		-	-	-	50.000.000,00	-	-	
	Sosialisasi Pendokumentasian Kartu Identitas Anak (KIA) pada sekolah Taman Kanak-kanak dan PAUD di Kabupaten Bengkayang		-	-	-	100.000.000,00	-	-	
	Sosialisasi Peringatan Perolehan Data e-KTP bagi Penduduk Pemilih Pemula di Kab/Kota se-Kalimantan Barat, (Kabupaten Bengkayang)		-	-	-	250.000.000,00	-	-	
	Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)		-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	
	Mobile Enrollment (pelayanan langsung) penerapan e-KTP		-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (e-KTP)		-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	
	Program Penataan Pencatatan Sipil		-	110.000.000,00	110.000.000,00	370.000.000,00	-	-	
	Peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil		-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	
	Pendaftaran kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	
	Pelayanan langsung Akta Pencatatan Sipil		-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Peluasan Rostasi Pencatatan Sipil se-Kalimantan Barat		-	-	-	50.000.000,00	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 tahun		-	-	-	85.000.000,00	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil		-	-	-	85.000.000,00	-	-	
	Sosialisasi Perencanaan Pencatatan Kelahiran secara Online se-Kalbar		-	-	-	150.000.000,00	-	-	
	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DISKON/PENCAPIL		-	-	-	600.000.000,00	-	-	
	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi		-	-	-	400.000.000,00	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data		-	-	-	100.000.000,00	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		-	-	-	50.000.000,00	-	-	
	Pemanfaatan dan Penevelaian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		-	-	-	50.000.000,00	-	-	
	Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan		-	699.000.000,00	699.000.000,00	-	-	-	
	Penyusunan profil data penduduk		-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	
	Penataan arsip pencatatan sipil dan SIAK		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Update aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis database dan nomor induk kependudukan		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Peningkatan pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan		-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan data keamatan kerjasama antar lembaga		-	79.000.000,00	79.000.000,00	-	-	-	
	Kerjasama antar Lembaga Pemanfaatan Data melalui Wore House		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Data Agrispil Kependudukan Per-Kecamatan dalam rangka Pilpres dan Pilq tahun 2019		-	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	
	Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)		-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	
	Sosialisasi Pelaksanaan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)		-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Penerapan Kartu Identitas Anak		-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	
	Program Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat		-	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-	
	Rapat/Permusn Peninjauan Kualitas Pelayanan Administrasi		-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	
	Pencetakan Brosur, Leaflet, Booklet dan Spanduk		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Media Cetak dan atau Elektronik		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	
	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk		-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	
	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil		-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	
	Pembentukan Tim Linas Sektor dalam rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun		-	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	
	PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		-	430.000.000,00	430.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan ribbon/film Printer, Pembelian Printer (Cleaning Kit)		-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk		-	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil		-	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Kartu SAM (Secure Acces Modul)		-	-	-	-	-	-	
	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)		-	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Perangkat SIAK		-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Data Kependudukan		-	0,00	0,00	-	-	-	
	Penyusunan Data Penduduk per-Semester		-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Profil Kependudukan		-	-	-	-	-	-	
	Pemanfaatan Data Kependudukan		-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					KABKOTA	PROVINSI	APBN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			87.840.000,00	87.840.000,00			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Dukung Kegiatan serena Rakodal/Rakemas			50.000.000,00	50.000.000,00			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknik Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencabutan Sial ke Provinsi			12.840.000,00	12.840.000,00			
	Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke Provinsi/Pusat			25.000.000,00	25.000.000,00			
	PERHUBUNGAN		1.898.374.800,00	5.653.000.000,00	7.481.374.800,00			
	Dinas Perhubungan		7.898.374.800,00	5.653.000.000,00	7.481.374.800,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.110.588.000,00	-	1.110.588.000,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.000.000,00	-	8.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		88.900.000,00	-	88.900.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		10.900.000,00	-	10.900.000,00			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		148.188.000,00	-	148.188.000,00			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		9.900.000,00	-	9.900.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		80.000.000,00	-	80.000.000,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		75.000.000,00	-	75.000.000,00			
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000.000,00	-	8.000.000,00			
	Penyediaan Makanan dan Minuman		30.000.000,00	-	30.000.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		150.000.000,00	-	150.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran		404.400.000,00	-	404.400.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		100.000.000,00	-	100.000.000,00			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		426.250.000,00	-	426.250.000,00			
	Pembangunan Gedung Kantor		-	-	-			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		60.000.000,00	-	60.000.000,00			
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor		16.250.000,00	-	16.250.000,00			
	Pengadaan Mebelur		50.000.000,00	-	50.000.000,00			
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		50.000.000,00	-	50.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100.000.000,00	-	100.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		150.000.000,00	-	150.000.000,00			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.000.000,00	-	100.000.000,00			
	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Perengkapannya		100.000.000,00	-	100.000.000,00			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		75.000.000,00	-	75.000.000,00			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		75.000.000,00	-	75.000.000,00			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		97.136.000,00	-	97.136.000,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		10.000.000,00	-	10.000.000,00			
	Penyusunan Revisi Rencana		35.000.000,00	-	35.000.000,00			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		11.090.000,00	-	11.090.000,00			
	Penyusunan Rangkai SKPD		7.500.000,00	-	7.500.000,00			
	Penyusunan LAKIP		7.500.000,00	-	7.500.000,00			
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD		11.046.000,00	-	11.046.000,00			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)		-	-	-			
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		-	-	-			
	Penyusunan Analisa Jabatan		7.500.000,00	-	7.500.000,00			
	Rencana Umum Pengadaan		7.500.000,00	-	7.500.000,00			
	Program Penyerbuan Informasi Pembangunan		-	50.000.000,00	50.000.000,00			
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		-	50.000.000,00	50.000.000,00			
	Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		-	450.000.000,00	450.000.000,00			
	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan		-	100.000.000,00	100.000.000,00			
	Inventori Rambu-Rambu Laku Lintas se-Kab. Bengkulu		-	50.000.000,00	50.000.000,00			
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 dok	-	300.000.000,00	300.000.000,00			
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		-	370.000.000,00	370.000.000,00			
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan		-	75.000.000,00	75.000.000,00			
	Kegiatan Operasional Bus Sekolah		-	120.000.000,00	120.000.000,00			
	Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru mudi untuk Peningkatan Keselamatan		-	75.000.000,00	75.000.000,00			
	Sosialisasi/penyuluhan Keleriban Laku Lintas dan Angkutan		-	100.000.000,00	100.000.000,00			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan		-	4.433.000.000,00	4.433.000.000,00			
	Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)		-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
	Pembangunan Tambatan Perahu (DAK/DALU)		-	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Tambatan Perahu		-	200.000.000,00	200.000.000,00			
	Pengadaan Moda Transportasi (DAK)		-	400.000.000,00	400.000.000,00			
	Pembangunan Jalan Non Status (DAK)		-	933.000.000,00	933.000.000,00			
	Program Peningkatan dan Pengamanan Laku Lintas		-	350.000.000,00	350.000.000,00			
	Pengadaan Rambu-Rambu Laku Lintas	1 paket	-	75.000.000,00	75.000.000,00			
	Pengadaan Marka Jalan dan Median	1 paket	-	75.000.000,00	75.000.000,00			
	Pengadaan Halte	1 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00			
	Penerbitan Laku Lintas dan Patrol dalam Rangka Kegiatan Even-even di Kabupaten	1 tahun	-	100.000.000,00	100.000.000,00			
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		800.000.000,00	1.835.000.000,00	2.485.000.000,00			
	Dinas Komunikasi dan Informatika		800.000.000,00	1.835.000.000,00	2.485.000.000,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		641.700.000,00	-	641.700.000,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00	-	5.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		2.200.000,00	-	2.200.000,00			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		112.000.000,00	-	112.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		2.500.000,00	-	2.500.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		60.000.000,00	-	60.000.000,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		60.000.000,00	-	60.000.000,00			
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.500.000,00	-	2.500.000,00			
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan		-	-	-			
	Penyediaan Makanan dan Minuman		32.500.000,00	-	32.500.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		100.000.000,00	-	100.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran		180.000.000,00	-	180.000.000,00			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		85.000.000,00	-	85.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas		-	-	-			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		192.000.000,00	-	192.000.000,00			
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor		-	-	-			
	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor		20.000.000,00	-	20.000.000,00			
	Pengadaan Mebelur		20.000.000,00	-	20.000.000,00			
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		70.000.000,00	-	70.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		70.000.000,00	-	70.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		12.000.000,00	-	12.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Studio dan Alat-alat Komunikasi		-	-	-			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		25.000.000,00	-	25.000.000,00			
	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Perengkapannya		25.000.000,00	-	25.000.000,00			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.000.000,00	-	30.000.000,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		30.000.000,00	-	30.000.000,00			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		61.300.000,00	-	61.300.000,00			
	Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAM	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROPMISI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran								
	Penyusunan RPKA Renstra		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana SKPD		3.550.000,00	-	3.550.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		3.550.000,00	-	3.550.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD		7.100.000,00	-	7.100.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Analisis Jabatan		3.550.000,00	-	3.550.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		3.550.000,00	-	3.550.000,00	-	-	-	-
	Program Penyebarluasan Informasi Pembaheasan			175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Publikasi dan Pembinaan melalui Media Massa			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Media Massa			320.000.000,00	320.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Palpatan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Layanan Pengelolaan Informasi Daerah			60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah								
	Program Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi			710.000.000,00	710.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Bengkulu			85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP)			250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan Koordinasi Persandian Kominfo Bengkulu								
	Peningkatan Layanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Persandian			90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan Radio Publik Daerah Kabupaten Bengkulu			85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-
	Layanan Pengaduan Masyarakat								
	Bimbingan Teknis bagi Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP) di Lingkungan Pemerintah Daerah			60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan Layanan Data Elektronik								
	Penyusunan Data Statistik Lingkup Pemerintah Daerah			120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	-	-
	Layanan Pengaduan Masyarakat LAPORI-SPAN			60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media			330.000.000,00	330.000.000,00	-	-	-	-
	Penyebarluasan Informasi Pembaheasan Daerah			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Penyebarluasan Informasi Penyeleksi/Pencapaian Pemerintah Daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Penyebarluasan informasi yang berakibat Penyukahan Bagi Masyarakat			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
KOPERASI UKM			1.242.729.000,00	1.997.271.000,00	2.240.000.000,00				
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1.242.729.000,00	1.997.271.000,00	2.240.000.000,00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		913.250.000,00	-	913.250.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	62.000.000,00	-	62.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & pernihan kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	101.598.000,00	-	101.598.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6.460.000,00	-	6.460.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	70.332.000,00	-	70.332.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	12 Bulan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.560.000,00	-	5.560.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	12 Bulan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan minuman	12 Bulan	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Telesis Perkantoran	5 Orang	162.000.000,00	-	162.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1 Unit	100.800.000,00	-	100.800.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		134.304.000,00	-	134.304.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan Gerai								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
	Pengadaan Parkiran gedung Kantor								
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 Bulan	27.414.000,00	-	27.414.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala komputer dan periferalnya	6 Unit	80.890.000,00	-	80.890.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 Bulan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perabotan Gedung Kantor	12 Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan dan Pendidikan Formal	12 Bulan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		110.175.000,00	-	110.175.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		7.150.000,00	-	7.150.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rasio Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja		6.720.000,00	-	6.720.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		9.345.000,00	-	9.345.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD		23.990.000,00	-	23.990.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pencapaian Kinerja (TAPKIN)		7.160.000,00	-	7.160.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)								
	Program Penyebarluasan Informasi Pembaheasan		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten								
	Program Peningkatan Usaha bagi UKM			135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan P2WKSS	1 Bulan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Petaku UKM	1 Bulan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Promosi Produk UKM	1 Bulan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah			121.700.000,00	121.700.000,00	-	-	-	-
	Pertolongan Promosi Produk Koperasi dan Usaha Kecil			45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan Kewirausahaan dan UKM	17 Kecamatan	41.700.000,00	-	41.700.000,00	-	-	-	-
	Pendataan UKM	17 Kecamatan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Kelembagaan			168.016.000,00	168.016.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Perfindangan tenaga Kerja	Kab Bky	27.060.000,00	-	27.060.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Upah Minimum Kabupaten	Kab Bky	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas LKS Tingkat Daerah	Kab Bky	34.920.000,00	-	34.920.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Penyelidikan Prosedur Penyelidikan Persewaan Hubungan Industrial	Kab Bky	34.500.000,00	-	34.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Penyelidikan Prosedur Pembinaan Perfindangan Hukum, Jaminan Kesehatan dan	Kab Bky	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Pusat layanan TIK Terpadu	Kab Bky	16.536.000,00	-	16.536.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan wilayah Transmigrasi			170.320.000,00	170.320.000,00	-	-	-	-
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab Bky	52.700.000,00	-	52.700.000,00	-	-	-	-
	Identifikasi Unit Pemukiman transmigrasi	Kec Sekeloa	40.410.000,00	-	40.410.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Persewaan Transmigrasi Purno Bina	Kec Capilata	51.210.000,00	-	51.210.000,00	-	-	-	-
	Pemasaran Asat Ex Trans	Kec Capilata	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			114.995.000,00	114.995.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Data Tenaga Kerja Daerah			20.410.000,00	20.410.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan Bagi Penerima kerja			47.985.000,00	47.985.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pemasaran Tenaga Kerja di Pemasaran	10 Orang	31.700.000,00	-	31.700.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pemasaran tenaga Kerja Mandiri (TKM)	22 Perumahan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Penguatan Dokumentasi/Arsip Daerah			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pemasaran Arsip di Lingkungan OPD			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARJET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERUBAHAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Peningkatan Kecompakan Kerja Layanan Informasi Tenaga Kerja	Kab. Bengkulu		21.360.000,00	21.360.000,00				
	Program Peningkatan Kualitas Kelengkapan Koperasi Pembinaan Koperasi dan UKM se-Kabupaten Bengkulu Pengawasan dan Penilaian Koperasi se-Kabupaten Bengkulu Bina Koperasi Monitoring Baseline Usulan daerah Kab. Bengkulu & Jalinangor Sosialisasi Pengembangan Koperasi	17 Kec 2 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan		272.280.000,00	272.280.000,00				
PENANAMAN MODAL			1.990.000.000,00	530.000.000,00	2.250.000.000,00				
Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu			1.990.000.000,00	530.000.000,00	2.250.000.000,00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.032.500.000,00		1.032.500.000,00				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Surat	2.500.000,00		2.500.000,00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	133.000.000,00		133.000.000,00				
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12.000.000,00		12.000.000,00				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	130.000.000,00		130.000.000,00				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	60.000.000,00		60.000.000,00				
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	12 Bulan	50.000.000,00		50.000.000,00				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15.000.000,00		15.000.000,00				
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	15.000.000,00		15.000.000,00				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	20 kali	135.000.000,00		135.000.000,00				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	30 kali	80.000.000,00		80.000.000,00				
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	12 bulan	350.000.000,00		350.000.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		275.000.000,00		275.000.000,00				
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	6 Unit	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Pengadaan Meubelur	10 Unit	20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya	8 Unit	20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Unit	20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit	55.000.000,00		55.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	30 Unit	20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pengadaan pekerjaan Pagar Halaman kantor	1 Paket	50.000.000,00		50.000.000,00				
	Pengadaan nama Kantor	1 Paket	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		80.000.000,00		80.000.000,00				
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	50 Set	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	50 Set	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		110.000.000,00		110.000.000,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Orang	75.000.000,00		75.000.000,00				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	35.000.000,00		35.000.000,00				
	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan		127.500.000,00		127.500.000,00				
	Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi	1 laporan	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Sementara	1 laporan	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	15.000.000,00		15.000.000,00				
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1 laporan	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 laporan	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	1 laporan	15.000.000,00		15.000.000,00				
	Penyusunan Analisis Jabatan	1 laporan	7.500.000,00		7.500.000,00				
	Penyusunan Revisi Rencana OPD	1 laporan	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Penyusunan Rencana penanaman Modal	1 laporan	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Program Peningkatan Informasi Pembangunan		35.000.000,00		35.000.000,00				
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	2 Keg	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Publikasi dan pemberitaan melalui media massa	3 Keg	10.000.000,00		10.000.000,00				
	Promosi Pelayanan Perizinan Melalui Broad cast	1 Paket							
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			345.000.000,00	345.000.000,00				
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	12 Bulan	50.000.000,00		50.000.000,00				
	Monitoring, Evaluasi pembinaan dan pengawasan penanaman Modal	12 Bulan	45.000.000,00		45.000.000,00				
	Peningkatan Kegiatan Promosi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	12 Bulan	45.000.000,00		45.000.000,00				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Peningkatan Promosi Melalui Media Massa dan Website	12 Bulan	25.000.000,00		25.000.000,00				
	Bimbingan dan Sosialisasi Kelulusan Penanaman Modal	12 Bulan	40.000.000,00		40.000.000,00				
	Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN	12 Bulan	45.000.000,00		45.000.000,00				
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	12 Bulan	55.000.000,00		55.000.000,00				
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		245.000.000,00		245.000.000,00				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan	12 Bulan	35.000.000,00		35.000.000,00				
	Pemrosesan penyelesaian permasalahan di bidang perizinan	12 Bulan	45.000.000,00		45.000.000,00				
	Penyusunan Sosialisasi Saluran Tugas Perizinan Pelaksanaan Diem Berusaha	1 Kegiatan	35.000.000,00		35.000.000,00				
	Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP)	1 Laporan	7.500.000,00		7.500.000,00				
	Penerapan Pengadaan Masyarakat	12 Bulan	35.000.000,00		35.000.000,00				
	Facilitasi Penyelidikan Permasalahan Investasi	12 Bulan	42.500.000,00		42.500.000,00				
	Penataan Ruang Pelayanan	1 Paket	45.000.000,00		45.000.000,00				
KEPERBUAAN DAN OLAHRAGA			1.356.100.000,00	2.069.400.000,00	3.428.500.000,00	170.000.000,00			
Dinas Pemuda, Olahraga dan Partisipasi			1.356.100.000,00	2.069.400.000,00	3.428.500.000,00	170.000.000,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		987.680.000,00		987.680.000,00				
	Penyediaan jasa surat menyurat		3.300.000,00		3.300.000,00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		47.500.000,00		47.500.000,00				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		2.950.000,00		2.950.000,00				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		149.000.000,00		149.000.000,00				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		8.750.000,00		8.750.000,00				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		67.000.000,00		67.000.000,00				
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		52.000.000,00		52.000.000,00				
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.750.000,00		4.750.000,00				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.400.000,00		8.400.000,00				
	Penyediaan Perakitan rumah tangga		1.575.000,00		1.575.000,00				
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan		12.500.000,00		12.500.000,00				
	Penyediaan Makanan dan Minuman		19.900.000,00		19.900.000,00				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		127.000.000,00		127.000.000,00				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		94.075.000,00		94.075.000,00				
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/kantor		388.980.000,00		388.980.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		144.870.000,00		144.870.000,00				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		6.500.000,00		6.500.000,00				
	Pemeliharaan Meubelatur		27.500.000,00		27.500.000,00				
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		13.500.000,00		13.500.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		10.200.000,00		10.200.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		64.010.000,00		64.010.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		7.320.000,00		7.320.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5.340.000,00		5.340.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		10.500.000,00		10.500.000,00				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		31.000.000,00		31.000.000,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		31.000.000,00		31.000.000,00				
	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan		76.550.000,00		76.550.000,00				
	Capaian Kinerja dan Keuangan								

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BAYU (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		5.500.000,00		5.500.000,00				
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		5.500.000,00		5.500.000,00				
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		35.000.000,00		35.000.000,00				
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		6.500.000,00		6.500.000,00				
	Penyusunan LAKIP SKPD		5.750.000,00		5.750.000,00				
	Penyusunan RKAD/PARAKAP dan OPPA-SKPD		11.800.000,00		11.800.000,00				
	Penyusunan Anjab dan Esjab		6.500.000,00		6.500.000,00				
	Program Peningkatan Informasi Pembangunan		57.500.000,00		57.500.000,00				
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Publikasi dan Pemberitaan melalui Media Massa		12.500.000,00		12.500.000,00				
	Facilitas Pelaksanaan Kegiatan HKG-PKK Kabupaten Bengkuluang		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		61.500.000,00		61.500.000,00				
	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)		11.500.000,00		11.500.000,00				
	Peringatan Hari Olahraga Nasional		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Peringatan Hari Sumpah Pemuda		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata			105.400.000,00	105.400.000,00				
	Peningkatan Pemasaran teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata			5.400.000,00	5.400.000,00				
	Pengembangan Statistik Kepariwisata			75.000.000,00	75.000.000,00				
	Pengadaan sarana prasana dan bahan promosi pemasaran pariwisata			25.000.000,00	25.000.000,00				
	Program Peningkatan Destinasi Pariwisata			863.500.000,00	863.500.000,00				
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata								
	Rehab Peningkatan Perahu Arung Jeram dan Perlekapannya Riam Panjar			124.500.000,00	124.500.000,00				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata			215.000.000,00	215.000.000,00				
	- Tersedianya Monev Riam Panjar Desa Pekat								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata								
	- Pembuatan Tempat Sella di 2 Lokasi Bukit Jener			40.000.000,00	40.000.000,00				
	- Pengadaan perahu karet Arung Jeram Riam Panjar dan Perlekapannya			70.000.000,00	70.000.000,00				
	- Pengadaan Tabung Sumpit Tinggi dan Perlekapannya			20.000.000,00	20.000.000,00				
	- Pengadaan Rambu-rambu Pariwisata Bukit Jener dan Riam Panjar			25.000.000,00	25.000.000,00				
	- Pengadaan Tong Sampah Riam Panjar dan Bukit Jener			25.000.000,00	25.000.000,00				
	- Rehab Beton Batu Tambah Kec. Lumar			200.000.000,00	200.000.000,00				
	Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah			30.000.000,00	30.000.000,00				
	Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Retribusi Pariwisata			15.000.000,00	15.000.000,00				
	Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata			15.000.000,00	15.000.000,00				
	Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata			25.000.000,00	25.000.000,00				
	Pengembangan dan Pembinaan Desa Wisata			64.000.000,00	64.000.000,00				
	Program Peningkatan Kualitas			142.500.000,00	142.500.000,00				
	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata								
	- Pelatihan Kebersih Seder Wisata termasuk pendirian parselan dan perlengkapan			45.000.000,00	45.000.000,00				
	- Pembentukan dan Pelatihan Kebersih Seder Wisata Kec. Lumar dan Kampung Kreatif			37.500.000,00	37.500.000,00				
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan			60.000.000,00	60.000.000,00				
	Program Peningkatan Ekonomi Kreatif			385.000.000,00	385.000.000,00				
	Pengembangan Seni Pertunjukan			25.000.000,00	25.000.000,00				
	Festival Seni Sani di Kabupaten Bengkuluang			30.000.000,00	30.000.000,00				
	Festival Seni Bumi Sebalo			55.000.000,00	55.000.000,00				
	Pengembangan dan Pembinaan Kampung Kreatif			75.000.000,00	75.000.000,00				
	Pembangunan Gallery Karajinan Kampung Kreatif desa Sekida Jembering			200.000.000,00	200.000.000,00				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat			42.000.000,00	42.000.000,00				
	Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Uluwu Daerah Bidang Pendidikan			42.000.000,00	42.000.000,00				
	Program Peningkatan Peran Serta Komunitas			41.000.000,00	41.000.000,00	25.000.000,00			
	Selaku dan Dilat Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)			41.000.000,00	41.000.000,00				
	Perkutaran Pemuda Antar Negeri					25.000.000,00			
	Program Peningkatan Upaya Pemembudayaan Keolahragaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			52.000.000,00	52.000.000,00				
	Pelatihan Keolahragaan bagi Pemuda			52.000.000,00	52.000.000,00				
	Program Peningkatan Kualitas dan Manajemen Olahraga								
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan								
	- Terlaksananya rakor Bidang olahraga daerah								
	- Dilat wasit Juri Olahraga dalam rangka meningkatkan								
	Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi								
	Pengajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga								
	Penyusunan Peraturan Daerah Olahraga								
	Program Pembinaan dan Peningkatan Olah Raga			230.000.000,00	230.000.000,00				
	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam olahraga			75.000.000,00	75.000.000,00				
	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi tingkat Daerah								
	Peningkatan Kesepatan Jasmani dan Rekreasi			35.000.000,00	35.000.000,00				
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga								
	- Turnamen Bola Volly se Kab. Bengkuluang								
	- Lomba lari Bengkuluang 10 K dalam rangka Harmonis dan Kompetisi olahraga daerah wisata			85.000.000,00	85.000.000,00				
	- Turnamen Sepakbola wanita se Kab. Bengkuluang								
	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat			35.000.000,00	35.000.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			208.000.000,00	208.000.000,00	145.000.000,00			
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga								
	- Tersedianya Meja untuk cabulng olahraga Karate, taekwondo, dan Pencak Silat					85.000.000,00			
	- Tersedianya Meja untuk cabulng olahraga Atletik Lompat Tinggi dan Senam					60.000.000,00			
	- Pembangunan Lapangan Sepak bola								
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana olahraga	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00				
				8.000.000,00	8.000.000,00				
KEARSIPAN			813.890.000,00	671.110.000,00	1.485.000.000,00				
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah		813.890.000,00	671.110.000,00	1.485.000.000,00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		655.577.500,00		655.577.500,00				
	Pemediaan Jasa Surat Menyurat		825.000,00		825.000,00				
	Pemediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		55.000.000,00		55.000.000,00				
	Pemediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		2.530.000,00		2.530.000,00				
	Pemediaan Jasa Administrasi Keuangan		66.000.000,00		66.000.000,00				
	Pemediaan Jasa Kebersihan Kantor		5.940.000,00		5.940.000,00				
	Pemediaan Alat Tulis Kantor		25.300.000,00		25.300.000,00				
	Pemediaan Barang Cetak dan Pencetakan		25.568.400,00		25.568.400,00				
	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik		3.300.000,00		3.300.000,00				
	Pemediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan		2.976.600,00		2.976.600,00				
	Pemediaan Makanan dan Minuman		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		114.617.500,00		114.617.500,00				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		77.000.000,00		77.000.000,00				
	Pemediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor		251.520.000,00		251.520.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		125.000.000,00		125.000.000,00				
	Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		75.000.000,00		75.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor		15.000.000,00		15.000.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		10.000.000,00		10.000.000,00				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Pendidikan dan pelatihan formal		25.000.000,00		25.000.000,00				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		78.312.500,00		78.312.500,00				
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		8.662.500,00		8.662.500,00				

BIDANG URUSAN PENERIMTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KAB/KOTA	PROVINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		8.662.500,00		8.662.500,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD		8.662.500,00		8.662.500,00	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD		8.662.500,00		8.662.500,00	-	-	-
	Standard Operasional Prosedur (SOP)					-	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra OPD		35.000.000,00		35.000.000,00	-	-	-
	Analisis Jabatan		8.662.500,00		8.662.500,00	-	-	-
	Profil Dinas Perputakaan dan Kearsipan					-	-	-
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		25.000.000,00		25.000.000,00	-	-	-
	Publikasi dan Pemberitaan media massa		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah			62.290.000,00	62.290.000,00	-	-	-
	Akuisi, deskripsi dan preservasi arsip aktif di lingkungan SKPD			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-
	Penelitian/Survei arsip statis di lingkungan SKPD			22.290.000,00	22.290.000,00	-	-	-
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan			2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pencetakan dan Penyimpanan Arsip			2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Status Data Kearsipan			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	Pembuatan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Tata Kearsipan			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Pencetakan dan Penyimpanan Arsip			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip Substantif			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	Pemantauan Tenaga Kearsipan di Tingkat Kelurahan/Desa			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-
	Pemantauan Tenaga Kearsipan tingkat SKPD			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			236.000.000,00	236.000.000,00	-	-	-
	Pencabangan Minat dan Budaya Baca			70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan umum			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan					-	-	-
	penyediaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan umum daerah					-	-	-
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
	Stak Oumane Koleksi Perpustakaan			16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-
	Bimbel penitisan perpustakaan			36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-
	Lomba penitisan perpustakaan			26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-
	Pelatihan Perpustakaan di luar jam kerja (hari kerja)			20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
URUSAN PILIHAN			8.046.179.335,00	28.188.274.783,00	33.264.454.068,00	-	-	-
PERTANIAN			2.987.179.335,00	26.063.274.783,00	28.870.454.068,00	-	-	-
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			2.987.179.335,00	26.063.274.783,00	28.870.454.068,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.265.285.595,00		3.265.285.595,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90.000.000,00		90.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		32.531.400,00		32.531.400,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		346.830.000,00		346.830.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Beribadah Kantor		8.883.400,00		8.883.400,00	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		183.708.900,00		183.708.900,00	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		102.300.000,00		102.300.000,00	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25.591.895,00		25.591.895,00	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		125.000.000,00		125.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan		8.640.000,00		8.640.000,00	-	-	-
	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan daerah tentang Pertanian Berkelanjutan		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		123.000.000,00		123.000.000,00	-	-	-
	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		300.000.000,00		300.000.000,00	-	-	-
	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		150.000.000,00		150.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		1.620.000.000,00		1.620.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		213.975.240,00		213.975.240,00	-	-	-
	Bangunan Gedung Kantor					-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		34.632.000,00		34.632.000,00	-	-	-
	Pengadaan Meubeler		50.000.000,00		50.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan jaringan listrik dan telepon		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		23.419.240,00		23.419.240,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		31.000.000,00		31.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		29.364.000,00		29.364.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		25.560.000,00		25.560.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000,00		50.000.000,00	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		50.000.000,00		50.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		82.918.500,00		82.918.500,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester		3.861.000,00		3.861.000,00	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		25.861.000,00		25.861.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD)		7.763.250,00		7.763.250,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja (Rencana-SKPD)		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD		7.763.250,00		7.763.250,00	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Penyusunan Analisis Jabatan		5.445.000,00		5.445.000,00	-	-	-
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-
	Publikasi dan pemberitaan media cetak dan elektronik		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan internasional		145.000.000,00		145.000.000,00	-	-	-
	Peringkatan HUT RI		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	-
	Peringkatan HUT Pemerintah Kab. Bangkayang		25.000.000,00		25.000.000,00	-	-	-
	Peringkatan Hari Kuda Pertanian (Pekan Daerah)		100.000.000,00		100.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Masyarakat		80.000.000,00		80.000.000,00	-	-	-
	Pemberian beasiswa kpd mahasiswa/mahasiswi urusan daerah bidang pertanian		80.000.000,00		80.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian			236.165.935,00	236.165.935,00	-	-	-
	Pengembangan Perbenihan / bibit/bibit			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
	Temu Lapangan (Bekta)			31.165.935,00	31.165.935,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Statistik Pertanian			75.600.000,00	75.600.000,00	-	-	-
	Diversifikasi pangan pokok			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya					-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Pertanian			1.786.600.901,00	1.786.600.901,00	-	-	-
	Perubahan peningkatan produksi pertanian/perkebunan			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan sarana produksi pertanian			806.600.901,00	806.600.901,00	-	-	-
	Pengembangan Bibit unggul pertanian			850.000.000,00	850.000.000,00	-	-	-
	Sertifikasi bibit unggul pertanian			80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	-	-	-
	Peringkatan kemampuan lembaga petani			175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Sistem Intensif dan Diversifikasi bagi petani kelompok tani					-	-	-
	Pembangunan / Perawatan Perkebunan Karet rakyat					-	-	-
	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkebunan			13.875.000.000,00	13.875.000.000,00	-	-	-
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			1.072.970.000,00	1.072.970.000,00	-	-	-
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penilaian Penyuluhan UPT dan Kelompok Tani			58.970.000,00	58.970.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan Kesehatan Tenaga Prayuduah Pertanian (Perkebunan)			414.000.000,00	414.000.000,00	-	-	-	-
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan dan Peternakan			-	-	-	-	-	-
	Program Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Bidang Pertanian/ Perkebunan			185.000.000,00	185.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengendalian Investasi Perkebunan			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas dan pembinaan Ketenagakerjaan Perkebunan			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Penilaian Usaha perkebunan			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan Prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir dan pesisir			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	-	-
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul			500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-
	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya (pengadaan mesin pakan mini)			700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan Tangkap			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	-	DAK/DAU
	Program Optimalisasi Penebakahan dan pemasaran hasil Perikanan			300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-
	Lomba Masak serba ikan			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan			200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kinerja Balai Basah Ikan (BBI)			72.039.000,00	72.039.000,00	-	-	-	-
	Operasional UPTD / BBI Apung			72.039.000,00	72.039.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pasca Panen Pertanian			-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering			-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	-	DAK/DAU
	Program Peningkatan Kesehatan Petani			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan Petani dan Petaku Agraris			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas panen Pertanian			-	-	-	-	-	-
	Penerangan Pasca panen dan pengolahan Hasil pertanian			-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Produk, Produktifitas dan mutu produk pertanian			-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Promosi hasil produk pertanian unggulan daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Pertanian			44.892.315,00	44.892.315,00	-	-	-	-
	Monitoring Peredaran Pupuk dan pestisida			44.892.315,00	44.892.315,00	-	-	-	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			3.330.606.602,00	3.330.606.602,00	-	-	-	-
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	DAK/DAU
	Pembibitan dan perawatan ternak			2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	-	-	-
	Pendistribusian Bibit ternak kepada masyarakat			67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	-	-
	Penyuluhan pengolahan bibit ternak yang didistribusikan			48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-	-
	Pembelian dan Perawatan ternak dan pakan ternak			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan peralatan IB			50.885.206,00	50.885.206,00	-	-	-	-
	Pembangunan sarana dan prasarana peternakan/pertanian (integrated farming)			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak			64.721.402,00	64.721.402,00	-	-	-	-
PERDAGANGAN				1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	-	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			702.400.000,00	702.400.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan berdasarkan dinas/operasional			4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan			145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor			12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor			65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan barang okalan dan penggantian			45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan			7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman			12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/kelembagaan perkantoran			57.600.000,00	57.600.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			183.000.000,00	183.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan perlengkapannya			25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan mebel			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer			14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian Batik Keahli Daerah			-	-	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian Dinas harian			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian Olahraga			-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan formal			75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			80.600.000,00	80.600.000,00	-	-	-	-
	Kapabilitas Kinerja dan Keuangan			-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD			6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan/Program Realisasi Anggaran			-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan/keuangan akhira tahun			12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana kerja (Rencana) SKPD			8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD			8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Analisis Jabatan, analisis Beban Kerja dan Evaluasi jabatan			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Indikator Kerja Utama SKPD			5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah			-	-	-	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD			11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Penetapan Kinerja			5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Informasi Pembangunan			108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran APKASI			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Publikasi dan pemberitaan melalui media massa			18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Perencanaan			-	-	-	-	-	-
	Monitoring Harga sembako dan barang Strategis lainnya			650.000.000,00	650.000.000,00	-	-	-	-
				50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (%)			SUMBER LAIN
					KABKOTA	PROPSIS	APBN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Pasar murah</p> <p>Sosialisasi permendag No. 54 Tahun 2017 BOKAR SIR Spesifikasi Karet yang di perdagangan</p> <p>Facilitasi metrologi Legal</p> <p>Sosialisasi Perindungan Konsumen</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Pemasangan Dalam pasar</p> <p>Penataan bangunan Pasar di Kab. Bengkulu</p> <p>Facilitasi Puncutan retribusi Pasar</p> <p>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>Optimisasi bantuan Penataan dan mesin uk menungkat Bantuan peralatan dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Th. 2015</p> <p>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</p> <p>Penyusunan Profil Industri Kab. Bengkulu</p> <p>Gelar Potensi Kerajinan KM Unggulan Melak Partisipasi Kesukubertan dalam Pameran INACRAF dan Gelar Potensi Daerah Dalam Pameran</p> <p>Facilitas pembangunan Sentra Industri Kecil dan menengah (IKM) di Kec. Jega babang</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan menengah (IKM)</p> <p>Program Peningkatan Produk Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Facilitas pelatihan Industri Kerajinan berbasis Limbah banam Piang</p> <p>di Kec. Sungai Raya Kepulauan</p> <p>Facilitas Pelatihan Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal dalam rangka mendukung kegiatan P2WKSS</p> <p>Facilitas Penyuluhan Industri Rumah Tangga (PRT) di Kab. Bengkulu</p> <p>Facilitas Pelatihan Industri Pengolahan Pupuk Organik Berbasis Limbah Sawit</p> <p>Program Pengembangan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)</p> <p>Monitoring dan pengendalian Distribusi BBM dan Tata Kelola LPG Tabung 3 Kg di Kab. Bengkulu</p> <p>Facilitas Koordinasi dan Pemertiksaan Lapangan Tata Kelola Pendistribusian Migas dalam wilayah Kab. Bengkulu</p> <p>Penyusunan Peta Wilayah Tata Kelola Pendistribusian LPG Tertentu Tingkat Apem dan Pengalihan di Kab. Bengkulu</p> <p>Program Pengembangan dan Pemertihan Kegiatan Usaha Berpotensi Menusak Lingkungan</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Perkebunan</p>			300.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 545.000.000,00 500.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 325.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 240.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	300.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 545.000.000,00 500.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 325.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 240.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00			
URUSAN PEMERINTAHAN			37.898.997.775,00	54.829.416.144,00	92.486.822.919,00	11.576.422.909,00		
PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI			28.982.047.068,00	31.580.284.196,00	60.562.322.064,00			
Sekretariat Daerah			15.894.488.200,00	12.085.537.880,00	28.000.000.000,00			
	<p>Program Peltakaan Administrasi Perkantoran</p> <p>Persediaan jasa surat menyurat</p> <p>Persediaan alat tulis kantor</p> <p>Persediaan barang cetakan dan pencetakan</p> <p>Persediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor</p> <p>Persediaan jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah</p> <p>Persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Persediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Persediaan jasa jaminan barang milik daerah</p> <p>Persediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Persediaan jasa kabaret/kantor</p> <p>Persediaan komponen material/kehidupansarana bangunan kantor</p> <p>Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Persediaan peralatan rumah tangga</p> <p>Persediaan makanan dan minuman</p> <p>Persediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas</p> <p>Persediaan jasa sewa bangunan/gedung</p> <p>Persediaan bahan bacaan (majalah, koran, dll)</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Pembangunan gedung kantor</p> <p>Perbaikan atap dan dokumen kepegawaian</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Rehabilitasi/edang/berat rumah dinas</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala meubeler</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</p> <p>Rehabilitasi/edang/berat rumah jabatan</p> <p>Rehabilitasi/edang/berat gedung kantor</p> <p>Pelatihan halaman dan lingkungan kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi</p> <p>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</p> <p>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</p> <p>Pengadaan peralatan gedung kantor</p> <p>Pengadaan meubeler</p> <p>Pengadaan Komputer dan Perengkapannya</p> <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>Pengadaan Paksaun Khusus hari - hari tertentu</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Pendidikan Teknis Pelatihan Camat</p> <p>Study komparasi penguatan peran kecamatan di Kabupaten Bengkulu</p> <p>Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>Bimtek / Asistensi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi Pejabat/staf SKPD</p> <p>Bimtek / Asistensi Penyusunan Evaluasi Jabatan</p> <p>Bimtek / Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) di lingkungan</p> <p>Bimtek Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis</p> <p>Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi Pemerintah (SOP-AP) pada</p> <p>Sosialisasi dan bimbingan untuk Penyusunan Standar Pelayanan pada SKPD di lingkungan</p> <p>Bimbingan Teknis Sedar Hukum pada 17 Kecamatan</p> <p>Bimbingan Teknis Legal Drafting Pembuatan Produk Hukum Daerah di lingkungan</p> <p>Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhbar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD</p> <p>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD</p> <p>Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD</p> <p>Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD</p> <p>Facilitas Asistensi RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD</p> <p>Program Optimalisasi Peningkatan dan Peningkatan Berbasis IRIK Daerah</p> <p>Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan SKPD</p> <p>Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBUL) di lingkungan SKPD</p> <p>Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran di lingkungan SKPD</p> <p>Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun di lingkungan SKPD</p> <p>Monitoring dan Inventarisasi Aset di lingkungan SKPD</p> <p>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</p> <p>Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten</p> <p>Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan</p> <p>Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia</p> <p>Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>		11.626.397.625,00 42.000.000,00 840.000.000,00 630.000.000,00 4.110.000.000,00 500.000.000,00 1.330.427.625,00 250.000.000,00 1.900.000.000,00 110.250.000,00 250.000.000,00 45.000.000,00 550.000.000,00 91.000.000,00 49.000.000,00 209.475.000,00 560.000.000,00 18.375.000,00 210.000.000,00 30.870.000,00 2.823.965.500,00 771.750.000,00 14.700.000,00 588.000.000,00 16.208.750,00 14.700.000,00 91.875.000,00 11.025.000,00 48.620.250,00 121.550.625,00 763.337.925,00 385.875.000,00 29.400.000,00 224.175.000,00 91.875.000,00 147.000.000,00 91.875.000,00 110.250.000,00 73.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 789.480.300,00 115.762.500,00 56.000.000,00 280.000.000,00 34.912.500,00 34.912.500,00 44.100.000,00 40.425.000,00 40.425.000,00 34.912.500,00 67.605.300,00 40.425.000,00 171.750.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 36.750.000,00 15.750.000,00 30.000.000,00 47.775.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 11.025.000,00 11.025.000,00 11.025.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 1.131.580.025,00 650.475.000,00 58.105.025,00	11.626.397.625,00 42.000.000,00 840.000.000,00 630.000.000,00 4.110.000.000,00 500.000.000,00 1.330.427.625,00 250.000.000,00 1.900.000.000,00 110.250.000,00 250.000.000,00 45.000.000,00 550.000.000,00 91.000.000,00 49.000.000,00 209.475.000,00 560.000.000,00 18.375.000,00 210.000.000,00 30.870.000,00 2.823.965.500,00 771.750.000,00 14.700.000,00 588.000.000,00 16.208.750,00 14.700.000,00 91.875.000,00 11.025.000,00 48.620.250,00 121.550.625,00 763.337.925,00 385.875.000,00 29.400.000,00 224.175.000,00 91.875.000,00 147.000.000,00 91.875.000,00 110.250.000,00 73.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 789.480.300,00 115.762.500,00 56.000.000,00 280.000.000,00 34.912.500,00 34.912.500,00 44.100.000,00 40.425.000,00 40.425.000,00 34.912.500,00 67.605.300,00 40.425.000,00 171.750.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 36.750.000,00 15.750.000,00 30.000.000,00 47.775.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 11.025.000,00 11.025.000,00 11.025.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 1.131.580.025,00 650.475.000,00 58.105.025,00				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu		422.000.000,00		422.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kualitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			2.943.455.000,00	2.943.455.000,00	-	-	-	-
	Dialog/duel dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemra/sanggota organisasi sosial dan komasyarakat			58.800.000,00	58.800.000,00	-	-	-	-
	Perencanaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen, lembaga Pemerintah non/Departemen/lembaga negeri			80.850.000,00	80.850.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA			136.500.000,00	136.500.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah			46.305.000,00	46.305.000,00	-	-	-	-
	Kunjungan kerja/rapat kepala daerah/wakil kepala daerah			420.000.000,00	420.000.000,00	-	-	-	-
	Konferensi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman di rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah			945.000.000,00	945.000.000,00	-	-	-	-
	Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Luar Negeri			73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya			80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			130.879.000,00	130.879.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu			52.479.000,00	52.479.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah melalui APKASI			43.400.000,00	43.400.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan Koordinasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah			525.000.000,00	525.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Kegiatan Protokol KDH/WYDH			280.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaporan dan Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah			245.000.000,00	245.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penetapan Peraturan Perundang-undangan			1.191.760.000,00	1.191.760.000,00	-	-	-	-
	Advokasi Hukum			190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Pejabat Aparatur Negara dalam Pembahasan Penyelesaian Sengketa			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Desa Seder Hukum			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Diversifikasi HAM			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Koordinasi Panitia RAN-HAM			38.955.000,00	38.955.000,00	-	-	-	-
	Kajian Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih			45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Data Permasalahan Hukum dan Pembahasan Hukum			31.605.000,00	31.605.000,00	-	-	-	-
	Pembahasan Draft Raperda dan Perda			220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-	-
	Pembahasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati			100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Perwujudan Hukum Terpadu di Kabupaten Bengkulu			140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah			88.200.000,00	88.200.000,00	-	-	-	-
	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (SJDIH)			49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	-	-
	Pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah			49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	-	-
	Konferensi/Konultasi Kerjasama Pemmasalahan Peraturan Perundang-undangan			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Bantuan hukum kepada masyarakat miskin			73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Rentes Untuk Warga Binaan Lapas Kelas II			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			697.900.000,00	697.900.000,00	-	-	-	-
	Rapat Kerja Camat dan Perangkat Se- Kabupaten Bengkulu			43.400.000,00	43.400.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pemerintah Kabupaten Bengkulu			46.900.000,00	46.900.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Administrasi Pejabat Negeri			65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pembakuan Rupa Bumi			35.700.000,00	35.700.000,00	-	-	-	-
	Serah Terima Jabatan Camat Se- Kabupaten Bengkulu			70.700.000,00	70.700.000,00	-	-	-	-
	Asistensi Penyusunan LPPM/KPJ/ANJ/ Tahun Anggaran			51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	-	-
	Monev/audit Penyelenggaraan Terpadu Kecamatan (PATK)			84.700.000,00	84.700.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pemerintahan, hukum dan politik			32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakelan Dinas Camat dan Lurah Beserta Abuknya			29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-	-
	Bantuan teknis pemantapan dan peningkatan kinerja aparatur kecamatan			42.700.000,00	42.700.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi percepatan penyerahan PSD dari daerah induk ke daerah pemekaran			21.700.000,00	21.700.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru			24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			1.462.107.500,00	1.462.107.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkulu			51.800.000,00	51.800.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten			71.400.000,00	71.400.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten			19.600.000,00	19.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LPPD Kabupaten Bengkulu			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Bezzeling Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu			23.100.000,00	23.100.000,00	-	-	-	-
	Memfasilitasi Kegiatan Bidang Organisasi dalam Penyusunan Standar Operasional Procedure			700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bengkulu			88.200.000,00	88.200.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu			26.827.500,00	26.827.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)			49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan dan Validasi Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu			29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standarisasi Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis di Lingkungan			16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Fakta Integrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu			22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten			37.800.000,00	37.800.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu			36.400.000,00	36.400.000,00	-	-	-	-
	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit pelayanan publik di lingkungan			35.700.000,00	35.700.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu			35.280.000,00	35.280.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten			24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu			42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat kerja teknis bidang organisasi			44.100.000,00	44.100.000,00	-	-	-	-
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah			43.400.000,00	43.400.000,00	-	-	-	-
	Evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah			36.400.000,00	36.400.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Pembangunan dan Perekonomian			1.093.000.000,00	1.093.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi penanganan dampak usaha/bidang sumber daya alam			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi dan Inovasi/kegiatan Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu			38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)			31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/lembaga			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pendanaan investasi			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di Kabupaten Bengkulu			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif PDAM Kabupaten Bengkulu			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Promosi Daerah			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi			31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Pengembangan Infra Daerah			42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-
	Peresmian kegiatan hasil pembangunan di daerah			52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)			95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Urat Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bengkulu			585.000.000,00	585.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan			42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pambudayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial			1.344.300.000,00	1.344.300.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi kebijakan peningkatan kesehatan lanjut usia			31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWR) Kabupaten Bengkulu			25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi kegiatan Musabiqah Tilawatil Quran (MTQ)			39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Indonesia (PESPARAWI)			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Indonesia (PESPARANI) bagi Umat			42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi kebijakan peningkatan kesehatan penyandang disabilitas			32.900.000,00	32.900.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi bagi organisasi, lembaga dan individu penerima hibah dan bantuan			28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan dan pengawasan bagi organisasi sosial dan kemasyarakatan			31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN)			35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan safari ramadhan Bupati dan Musipda di Kabupaten Bengkulu (17 Kecamatan)			134.000.000,00	134.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan halal bihalal dalam rangka hari raya Idul Fitri di Kabupaten Bengkulu			63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan perayaan pelepas bersama di Kabupaten Bengkulu			78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan hari imlek bersama di Kabupaten Bengkulu			78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan hari Raya Nyepi (Hindu) bersama di Kabupaten Bengkulu			20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan hari Raya Waskita (Budha) bersama di Kabupaten Bengkulu			40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Kegiatan perayaan natal okumene di Kabupaten Bengkulu (4 Kecamatan dan 1 Abad)			230.000.000,00	230.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pengiriman peserta ziarah rohani Umat Kristiani ke Yerusalem			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pengiriman peserta ziarah rohani Umat Islam (Umroh)			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pengiriman peserta ziarah rohani Umat Hindu (Tirta Yatra)			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pengiriman peserta ziarah rohani Umat Budha (Dharma Yatra)			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan pengiriman peserta ziarah rohani Umat Konghucu			30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Marsik calon jemaah haji Kabupaten Bengkulu			50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji Kabupaten Bengkulu			150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan event-event dibidang kemasyarakatan			45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			705.600.000,00	705.600.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KABKOTA	PROPINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Fasilitas, monitoring dan pembinaan pengelolaan keuangan desa Fasilitas, monitoring dan pembinaan APBD Desa Pelatihan administrator dan operator aplikasi Sistem Keuangan Desa (SaKeuDes) Fasilitas pelatihan pemerintahan desa Fasilitas dan Penetapan Batas Desa di Kecamatan Capata Kaj terap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa			105.000.000,00 103.800.000,00 113.400.000,00 98.000.000,00 145.600.000,00 42.000.000,00 98.000.000,00	105.000.000,00 103.800.000,00 113.400.000,00 98.000.000,00 145.600.000,00 42.000.000,00 98.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Desa Fasilitas Kegiatan TMMD							
	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Fasilitas Penangan Permasalahan di Kawasan Perbatasan			130.900.000,00 130.900.000,00	130.900.000,00 130.900.000,00			
	Program Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Negara Fasilitas program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Potensi Perbatasan Penyusunan Database Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Pemerintahan, Sosial Ekonomi Desa Kawasan Perbatasan Kerjasama Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota Tahun 2018			175.000.000,00 175.000.000,00	175.000.000,00 175.000.000,00			
	Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Fasilitas program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara			134.400.000,00 108.500.000,00 25.900.000,00	134.400.000,00 108.500.000,00 25.900.000,00			
Sekretariat DPRD			3.787.237.500,00	10.224.144.550,00	14.021.302.050,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Perakitan rumah tinggal Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		2.218.180.000,00 4.950.000,00 175.000.000,00 26.150.000,00 143.920.000,00 67.100.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 716.460.000,00 100.000.000,00	2.218.180.000,00 4.950.000,00 175.000.000,00 26.150.000,00 143.920.000,00 67.100.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 716.460.000,00 100.000.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan mebelur Pengadaan komputer dan perlengkapannya pengadaan alat-alat studio Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kondensasi dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala komputer pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat-alat komunikasi Rehabilitasi sedang/berkala rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berkala gedung kantor		1.140.378.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 35.780.000,00 30.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 26.473.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 47.125.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00	1.140.378.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 35.780.000,00 30.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 26.473.000,00 30.000.000,00 400.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 47.125.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakelan Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakelan Khusus Hari Hari berkeku		468.000.000,00 268.000.000,00 290.000.000,00	468.000.000,00 268.000.000,00 290.000.000,00				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal		150.000.000,00 150.000.000,00	150.000.000,00 150.000.000,00				
	Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencan SKPD Penyusunan RKA dan DPA-SKPD Penyusunan LAKIP Penyusunan Anjab		144.179.500,00 15.439.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 13.925.000,00 35.000.000,00 19.815.000,00 20.000.000,00	144.179.500,00 15.439.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 13.925.000,00 35.000.000,00 19.815.000,00 20.000.000,00				
	Program Peningkatan Aksesibilitas Informasi Pembangunan Penerapan Pembangunan tingkat kabupaten Publikasi dan pemberitaan melalui media massa Publikasi dan pemberitaan melalui media website		144.500.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 19.500.000,00	144.500.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 19.500.000,00				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan PERDA Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan agama Fasilitas Alat-Alat Kelengkapan Dewan Rapel-rapel persipurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyusunan Tallid DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD Penyusunan Profil Eksekutif DPRD Kab. Bengkulu Periode 2019-2023 Penyusunan Masalah Parlemen/ke DPRD Kab. Bengkulu Periode 2019-2023 Pelantikan PAW anggota DPRD Pembahasan APBD (KUA - RPAS) Penyusunan dan pembahasan laporan praksi DPRD Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah anggota DPRD Sosialisasi Produk Hukum Kab. Bengkulu Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2019-2024 Kab. Bengkulu		10.224.144.550,00 1.925.369.750,00 51.000.000,00 94.327.000,00 218.700.000,00 1.790.970.000,00 608.990.000,00 1.500.000.000,00 29.020.000,00 12.325.000,00 48.300.000,00 79.500.000,00 30.000.000,00 1.023.094.000,00 1.081.204.000,00 1.000.000.000,00 60.000.000,00 661.344.800,00	10.224.144.550,00 1.925.369.750,00 51.000.000,00 94.327.000,00 218.700.000,00 1.790.970.000,00 608.990.000,00 1.500.000.000,00 29.020.000,00 12.325.000,00 48.300.000,00 79.500.000,00 30.000.000,00 1.023.094.000,00 1.081.204.000,00 1.000.000.000,00 60.000.000,00 661.344.800,00				
	Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan Penerapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)							
	Berita Peningkatan Beraca Desa		822.500.000,00	6.878.500.000,00	7.788.000.000,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan dinas/Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapel-rapel Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		745.640.000,00 3.400.000,00 24.800.000,00 5.800.000,00 118.000.000,00 9.610.000,00 42.000.000,00 16.590.000,00 7.000.000,00 7.100.000,00 16.540.000,00 120.000.000,00 298.000.000,00	745.640.000,00 3.400.000,00 24.800.000,00 5.800.000,00 118.000.000,00 9.610.000,00 42.000.000,00 16.590.000,00 7.000.000,00 7.100.000,00 16.540.000,00 120.000.000,00 298.000.000,00				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERUBAHAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		70.510.000,00	-	70.510.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		43.210.000,00	-	43.210.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin / berkala komputer		8.600.000,00	-	8.600.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		66.350.000,00	-	66.350.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.550.000,00	-	6.550.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renc - SKPD		5.650.000,00	-	5.650.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKP		4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD		10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Analisis Jabatan/Anjab		3.850.000,00	-	3.850.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Informasi Pembangunan		28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten HUT PEMDA		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Publikasi dan Pemberitaan Melalui Media Massa		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		-	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan SKPD		-	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Diri dan Pengembangan Daerah		-	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-	-
	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor		-	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemasangan Daerah Bencana		-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan dan Penyediaan Barang Pasokan/ Logistik		-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Facilities dan Pemeliharaan Tim Reaksi Cepat (TRC)		-	75.350.000,00	75.350.000,00	-	-	-	-
	Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS-PB)		-	83.650.000,00	83.650.000,00	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana		-	6.394.000.000,00	6.394.000.000,00	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sederang/Berat Jembatan Pasca Bencana	1 Unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan Jembatan/ Box Culvert/ Gorong-Gorong	4 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sederang/Berat Drainase Pasca Bencana	2 Paket	-	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sederang/Berat Turap Pasca Bencana	11 Paket	-	2.044.000.000,00	2.044.000.000,00	-	-	-	-
	Normalisasi Sungai	14 Paket	-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-	-	-	-
	Kecamatan Semburan		493.272.000,00	196.787.000,00	690.059.000,00	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		368.270.500,00	-	368.270.500,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.706.000,00	-	2.706.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		15.510.000,00	-	15.510.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Pemisahan Kendaraan Dinas/Operasional		1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		46.464.000,00	-	46.464.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor		3.168.000,00	-	3.168.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Perakunan Perundang Undangan		2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		8.030.000,00	-	8.030.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran		159.720.000,00	-	159.720.000,00	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		56.672.500,00	-	56.672.500,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		89.500.000,00	-	89.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan komputer dan perlengkapan		-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/kantor		2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Perlangkapan gedung kantor		-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Meubelatur		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan komputer dan perlengkapan		18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		37.400.000,00	-	37.400.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5.390.000,00	-	5.390.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1.347.500,00	-	1.347.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja		1.347.500,00	-	1.347.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA-SKPD		1.347.500,00	-	1.347.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKP		1.347.500,00	-	1.347.500,00	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Informasi Pembangunan		15.400.000,00	-	15.400.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	-	-
	Publikasi dan Pemberitaan Melalui Media Massa		2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-	-	-
	Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		14.652.000,00	-	14.652.000,00	-	-	-	-
	Peringatan hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		14.652.000,00	-	14.652.000,00	-	-	-	-
	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		-	6.083.000,00	6.083.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa		-	6.083.000,00	6.083.000,00	-	-	-	-
	Program Meningkatkan Peningkatan Pengaduan Masyarakat		-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-
	Perancangan Kasus-Kasus Sengketa dalam Masyarakat		-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalinan Kecamatan		-	42.970.000,00	42.970.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	3.184.500,00	3.184.500,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan kebersihan Kota Kecamatan (Kejatan Baldi Sosial)		-	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
	Monevring Tingkat Kecamatan		-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
	Monevring Pembangunan di Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial		-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-
	Facilities Kegiatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Facilities kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan KIP Elektronik (E-KIP)		-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Peningkatan KIP Elektronik (KIP-EI)		-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		-	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan SKPD		-	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Misi Berdaya		-	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BAYU (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABUPATEN	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-
Kecamatan Bangsayung			664.686.000,00	141.052.000,00	745.198.000,00	-	-	-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		470.295.000,00	-	470.295.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32.000.000,00	-	32.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Operasional	3 Rekening	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2 Unit	52.880.000,00	-	52.880.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7 OB	17.265.000,00	-	17.265.000,00	-	-	-	
	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	48 Item	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48 Item	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	12 Bulan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan bahan bacaan dan perakitan perundang-undangan	360 eksemplar	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-	
	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	-	-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	4 OK	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	68 OK	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/konsep kantor	36 OB	246.600.000,00	-	246.600.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		59.500.000,00	-	59.500.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	2 Unit	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	2 Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	8 Unit	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	
	Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	2 Unit	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu	20 pegawai	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Daerah		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Pengelolaan dan pembenaran arsip di lingkungan SKPD	20 pegawai	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22.400.000,00	-	22.400.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Dokumen	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	-	-	
	Penyusunan RENCANA SKPD	1 Dokumen	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Laporan	4 Dokumen	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	4 Dokumen	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-	-	-	
	Penyusunan laporan kinerja tahunan SKPD	1 Tahun	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	
	Penyusunan Anjab SKPD	1 Tahun	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Informasi dan Pembangunan		39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	-	-	
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	
	Pelaksanaan HKG-PKK tingkat Kabupaten		19.900.000,00	-	19.900.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	
	Program peringatan hari-hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT-RI)		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	
	Program Pengembangan Nilai Budaya		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1 Kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Perdagangan		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Monitoring dan Penyerahan Pasar	4 Kali	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Penanaman Wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	6 Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	
	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pembangunan Keuangan Desa		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Fasilitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1 Tahun	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelestarian dan Ketertarikan		-	-	-	-	-	-	
	Pendaftaran tempat usaha dan rumah sewa (kost)	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pembangunan Daerah		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	kegiatan	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	
	Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Penanganan Kasus-Kasus Sengketa dalam Masyarakat	1 Tahun	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	
	Program Penilaian Daerah Ekonomi Baru		-	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	-	
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	1.000 Pelayanan	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	
	Monitoring Penyuluhan, sosialisasi dan monitoring kecamatan	6 Desa/Kelurahan	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan		-	-	-	-	-	-	
	Program Pemecanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Tahun	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Kebersihan dan Jalan Kecamatan		-	9.555.000,00	9.555.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan kebersihan Kota Kecamatan (Kegiatan Bakti Sosial)	1 Tahun	-	9.555.000,00	9.555.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Bencana		-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	
	Apel Siaga Bencana	1 Paket	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	
Kecamatan Ledo			487.800.000,00	72.200.000,00	570.000.000,00	-	-	-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		362.700.000,00	-	362.700.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	-	
	Penyediaan pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Operasional		1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		49.200.000,00	-	49.200.000,00	-	-	-	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor		1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor		3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	-	-	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		170.100.000,00	-	170.100.000,00	-	-	-	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		68.000.000,00	-	68.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional		-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/kinas		-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Perawatan Gedung Kantor		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		19.000.000,00	-	19.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Meubelur		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	
	Pengadaan Komputer dan kelengkapannya		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		-	-	-	-	-	-	
			11.588.000,00	-	11.588.000,00	-	-	-	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renja		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA		1.900.000,00		1.900.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renstra								
	Penyusunan Analisis Jabatan		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Ewaluasi Jabatan		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Operating Procedure		1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Efisiensi Pembangunan		24.000.000,00		24.000.000,00				
	Pemeran pembangunan tingkat kabupaten		13.000.000,00		13.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeran HKG Tingkat Kabupaten		11.000.000,00		11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional								
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (1-HUT RI)		31.600.000,00		31.600.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Uang Tahun Pemda Bengkulu		23.100.000,00		23.100.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Uang Tahun Pemda Bengkulu		8.500.000,00		8.500.000,00	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa			2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang ADD Desa			1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan SKPD			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-
	Program meningkatkan pelayanan kepada masyarakat			13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan kasus-kasus dalam masyarakat			13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
	Program Pemetaan Daerah Otomatis Baru			17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah antar Desa					-	-	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Posyandu, sosialisasi dan monografi kecamatan			11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan								
	Pemeliharaan / penebasan jalan di lingkungan Kecamatan					-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi pembangunan tingkat kecamatan					-	-	-	-
	Mutualisasi Tingkat Kecamatan			7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan			4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial			12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat					-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)			8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan			2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Perayaan Natal okumense					-	-	-	-
	Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)								
	Implementasi Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan					-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya			11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Pelebaran dan aktualisasi adat budaya daerah			11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa								
	Program Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan								
	Kecamatan Sempur Lado		596.408.000,00	74.582.000,00	596.000.000,00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		348.398.000,00		348.398.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyrus		3.000.000,00		3.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10.508.000,00		10.508.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		3.400.000,00		3.400.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		60.800.000,00		60.800.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		14.000.000,00		14.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		30.498.000,00		30.498.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		25.500.000,00		25.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.500.000,00		7.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.860.000,00		10.860.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan					-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		17.000.000,00		17.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		73.840.000,00		73.840.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Takris Perkantoran		70.000.000,00		70.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		21.500.000,00		21.500.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		98.950.000,00		98.950.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya		30.000.000,00		30.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	55.000.000,00		55.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	7 Meccan	6.950.000,00		6.950.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Dibabin Aparatur		7.000.000,00		7.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakelan Khusus Hari-Hari Tertentu		7.000.000,00		7.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan Formal					-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		7.000.000,00		7.000.000,00	-	-	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan					-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD		1.900.000,00		1.900.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renja		1.650.000,00		1.650.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		1.730.000,00		1.730.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA		1.780.000,00		1.780.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Efisiensi Pembangunan		26.000.000,00		26.000.000,00				
	Pemeran pembangunan tingkat kabupaten		15.000.000,00		15.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan HKG-PKK Kabupaten Bengkulu		11.000.000,00		11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (1-HUT RI)		20.000.000,00		20.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penerapan KTP Elektronik								
	Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik					-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa			1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
	Program meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat			1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan kasus-kasus sengketa dalam masyarakat			1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
	Program Pemetaan Daerah Otomatis Baru			29.300.000,00	29.300.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah antar Desa			3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan					-	-	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Pembinaan Posyandu, Translasi dan Monografi Kecamatan			1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan			6.012.000,00	6.012.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan					-	-	-	-
	Pemeliharaan / penebasan jalan di lingkungan Kecamatan			6.012.000,00	6.012.000,00	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KABKOTA	PROPINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Musrenbang Tingkat Kecamatan			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	<u>Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u>			1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan bagi organisasi sosial masyarakat			1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	-
	Facilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			-	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Nilai Budaya</u>			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	<u>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah</u>			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-
	Penelitian dan Penataan Arsip di Lingkungan SKPD			3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-
	Kecamatan Seluas			450.435.000,00	128.883.000,00	880.000.000,00	-	-
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>			355.615.000,00	-	355.615.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			56.964.000,00	-	56.964.000,00	-	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			9.212.000,00	-	9.212.000,00	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			16.164.000,00	-	16.164.000,00	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.680.000,00	-	12.680.000,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			8.670.000,00	-	8.670.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam Daerah			50.025.000,00	-	50.025.000,00	-	-
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/kantor			161.400.000,00	-	161.400.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>			43.220.000,00	-	43.220.000,00	-	-
	Pengadaan Perangkat dan Perengkapannya			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			30.800.000,00	-	30.800.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan</u>			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	Penyusunan RENCANA SKPD			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan SKPD			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-	-
	Penyusunan Anjab SKPD			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra SKPD			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-
	<u>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan</u>			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
	Pelaksanaan HKG-PKK tingkat Kabupaten			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional</u>			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Penggiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	<u>Program Pembinaan dan Fasilitas Penyelamatan Keuangan Desa</u>			9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa			9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-
	<u>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</u>			13.175.000,00	-	13.175.000,00	-	-
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan			13.175.000,00	-	13.175.000,00	-	-
	Monitoring hasil kegiatan pembangunan daerah			7.650.000,00	-	7.650.000,00	-	-
	<u>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</u>			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-
	Penelitian dan Penataan Arsip di lingkungan SKPD			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-
	<u>Program sosialisasi/pengabdian pelayanan masyarakat</u>			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Penanganan Kasus-Kasus Sengketa dalam Masyarakat			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	<u>Program Penelitian Daerah Otonomi Baru</u>			23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-
	Monitoring dan Pembinaan Penyelidik, Transkribasi dan monografi Kecamatan			9.150.000,00	-	9.150.000,00	-	-
	<u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u>			7.540.000,00	-	7.540.000,00	-	-
	Facilitas dan Koordinasi kegiatan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan			7.540.000,00	-	7.540.000,00	-	-
	<u>Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u>			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-
	Facilitas Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Facilitas Kegiatan Musabagh Tilawatil Qur'an (MTQ)			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan</u>			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	<u>Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</u>			7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	-
	Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-EI)			7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Nilai Budaya</u>			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
	Kecamatan Sungai Raya			401.800.000,00	180.000.000,00	580.000.000,00	-	-
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>			230.180.000,00	-	230.180.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.475.000,00	-	7.475.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			3.080.000,00	-	3.080.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			31.620.000,00	-	31.620.000,00	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			23.382.500,00	-	23.382.500,00	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.372.500,00	-	18.372.500,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			21.750.000,00	-	21.750.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			15.300.000,00	-	15.300.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>			90.820.000,00	-	90.820.000,00	-	-
	Pengadaan Perangkat dan Perengkapannya			12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			73.820.000,00	-	73.820.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan</u>			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra OPD			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan LAKIP			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	<u>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan</u>			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kecamatan			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	<u>Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional</u>			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Penggiatan hari Kemerdekaan RI (HUT RI)			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	<u>Program Pembinaan dan Fasilitas Penyelamatan Keuangan Desa</u>			-	-	-	-	-
				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LABA	
					APBD				
					KABKOTA	PROVINSI	APBN		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengadaan Perabot Gedung Kantor		-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		13.600.000,00	-	13.600.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Aparatur		13.600.000,00	-	13.600.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		25.400.000,00	-	25.400.000,00	-	-	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		4.850.000,00	-	4.850.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renja		4.850.000,00	-	4.850.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DFA		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rensi Renstra OPD		4.850.000,00	-	4.850.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKP		-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan RKU SKPD		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan		39.580.000,00	-	39.580.000,00	-	-	-	-
	Pemeran Pembangunan Tingkat Kabupaten		19.580.000,00	-	19.580.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan HKO-PKK Tingkat Kabupaten		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan internasional		12.920.000,00	-	12.920.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		12.920.000,00	-	12.920.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Fasilitas Peningkatan Keuangan Desa		-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa		-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
	Program Mengintegrasikan Pemangangan Pengabdian Masyarakat		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Perencanaan kasus-kasus sergokta dalam masyarakat		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Daerah Otonomi Baru		-	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-
	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		-	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Belas Wilayah		-	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Kamtibmas, Pemutakhiran data dan pelayanan masyarakat		-	8.860.000,00	8.860.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan / perbaikan jalan di lingkungan Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pembangunan Daerah		-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
	Mutakhir Tingkat Kecamatan		-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan pengendalian Pembangunan Daerah		-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah		-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan KIP Elektronik (E-KIP)		-	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penerapan KIP Elektronik (KIP-EI)		-	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Misi Budaya		-	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		-	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-	-
	Kecamatan Muntarado		462.800.000,00	187.500.000,00	650.300.000,00	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		222.000.000,00	-	222.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Jasa Surat Menyurat		4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Pemeliharaan dan Perjalinan Kendaraan Dinas/Operasional		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Jasa Kebersihan Kantor		6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Alat Tulis Kantor		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Barang Cetak dan Pengandaian		11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Perawatan Rumah Tangga		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Makanan dan Minuman		26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Persediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		84.500.000,00	-	84.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Perabot Gedung Kantor		4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Meubelair		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabot Gedung Kantor		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		41.000.000,00	-	41.000.000,00	-	-	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renja		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rensi Renstra OPD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DFA SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKP		-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Informasi Pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeran Pembangunan Tingkat Kabupaten		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan internasional		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Informasi Statistik daerah		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik kecamatan/daerah		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Fasilitas Peningkatan Keuangan Desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Mengintegrasikan pemangangan pengabdian masyarakat		-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Perencanaan kasus-kasus dalam masyarakat dan pembinaan pemerintahan Desa		-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Daerah Otonomi Baru		-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Kamtibmas, Pemutakhiran data dan pelayanan masyarakat		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		-	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-

BIDANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAH	
					APBD		APBN		
					KAB/KOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Perbaikan Kebersihan Kota Kecamatan Perbaikan / penebasan jalan di lingkungan Kecamatan			6.500.000,00 5.000.000,00	6.500.000,00 5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Puncakmas dan Peningkatan Pembangunan Daerah</u> Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan Muarabang Tingkat Kecamatan			35.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00	35.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u> Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00	13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</u> Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-E)			10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dolmen/Arup Daerah</u> Pengelolaan dan Penataan Arup di Lingkungan OPD			5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pengembangan Nilai Budaya</u> Pelataran dan aktualisasi adat budaya daerah			20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	-	-	-	-
	Kecamatan Sali Semarang			463.470.000,00	463.470.000,00	678.000.000,00	-	-	-
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u> Pelayanan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Alat Tulis Kantor Pelayanan Barang Cetak dan Penggandaan Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan Perakitan Rumsah Tangga Pelayanan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Pelayanan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			307.075.000,00 2.130.000,00 2.400.000,00 1.313.000,00 56.454.000,00 1.574.000,00 10.672.000,00 12.000.000,00 1.920.000,00 2.400.000,00 31.210.000,00 25.000.000,00 76.000.000,00 83.602.000,00	307.075.000,00 2.130.000,00 2.400.000,00 1.313.000,00 56.454.000,00 1.574.000,00 10.672.000,00 12.000.000,00 1.920.000,00 2.400.000,00 31.210.000,00 25.000.000,00 76.000.000,00 83.602.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u> Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Ruin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Ruin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Ruin/Berkala Perakitan Gedung Kantor Pemeliharaan Ruin/Berkala Meubelair Pemeliharaan Ruin/Berkala Komputer			49.540.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 37.780.000,00 1.500.000,00 4.260.000,00	49.540.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 37.780.000,00 1.500.000,00 4.260.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u> Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			-	-	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan</u> Kapabilitas Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan LAKP			19.010.000,00 3.270.000,00 3.370.000,00 4.910.000,00 4.090.000,00 3.370.000,00	19.010.000,00 3.270.000,00 3.370.000,00 4.910.000,00 4.090.000,00 3.370.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pemberdayaan Informasi Pembangunan</u> Pemeran Pembangunan Tingkat pembangunan Fasilitas Kegiatan HKG PKK			49.170.000,00 16.500.000,00 32.670.000,00	49.170.000,00 16.500.000,00 32.670.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan</u> Peningkatan Hari Kemerdekaan RI (1-HUT RI) Peningkatan HUT Pemda Kab. Banjarnegara			28.875.000,00 21.475.000,00 7.200.000,00	28.875.000,00 21.475.000,00 7.200.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pembiayaan dan Fasilitas Pembiayaan Keuangan Desa</u> Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa			19.200.000,00 19.200.000,00	19.200.000,00 19.200.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</u> Perencanaan kasus-kasus dalam masyarakat dan pembinaan pemerintahan Desa			13.840.000,00 13.840.000,00	13.840.000,00 13.840.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penataan Daerah Otomotif baru</u> Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Pembinaan Kamtibmas, Pemeliharaan dan pelayanan penyuluhan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Belas Wilayah Administratif antar Desa			25.050.000,00 20.100.000,00 4.950.000,00	25.050.000,00 20.100.000,00 4.950.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan</u> Perbaikan Kebersihan Kota Kecamatan Perbaikan / penebasan jalan di lingkungan Kecamatan			-	-	-	-	-	-
	<u>Program Puncakmas dan Peningkatan Pembangunan Daerah</u> Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan Muarabang Tingkat Kecamatan			15.840.000,00 15.840.000,00	15.840.000,00 15.840.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u> Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00 5.800.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</u> Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-E)			-	-	-	-	-	-
	<u>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dolmen/Arup Daerah</u> Pengelolaan dan Penataan Dolmen Arup Daerah			3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.600.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pengembangan Nilai Budaya</u> Pelataran dan aktualisasi adat budaya daerah			40.000.000,00 40.000.000,00	40.000.000,00 40.000.000,00	-	-	-	-
	Kecamatan Cepahi			394.000.000,00	394.000.000,00	578.000.000,00	-	-	-
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u> Pelayanan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan jasa administrasi keuangan Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Alat Tulis Kantor Pelayanan Barang Cetak dan Penggandaan Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan Belanja Bahan dan Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Pelayanan Jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			227.300.000,00 5.000.000,00 13.500.000,00 1.200.000,00 40.000.000,00 7.600.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00	227.300.000,00 5.000.000,00 13.500.000,00 1.200.000,00 40.000.000,00 7.600.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u> Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Ruin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Ruin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Ruin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Ruin/Berkala Komputer			70.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00	70.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>			10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELAJAR RUTIN	BELAJAR PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LABA	
					APBD		APBN		
					KAB/KOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>		31.700.000,00	-	31.700.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		8.700.000,00	-	8.700.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renc		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renc Renstra OPD		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</u>		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan internasional</u>		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan dan Informasi Statistik daerah</u>		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	penyusunan dan pengumpulan data dan statistik kecamatan/daerah		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan dan Fasilitas Pembangunan Kawasan Desa</u>		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengalihan kejuruan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program meningkatkan penguasaan pengalihan masyarakat</u>		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pengangan kasus-kasus dalam masyarakat dan pembinaan pemerintahan Desa		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pemetaan Daerah Otonomi Baru</u>		-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Betas Wilayah antar Desa		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Kamtibmas, Pemuktahiran data dan pelayanan penyendu		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan</u>		-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan / perbaikan jalan di lingkungan Kecamatan		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Perencanaan dan Peningkatan Pembangunan Daerah</u>		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Muarabing Tingkat Kecamatan		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u>		-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penyediaan dan Penataan Dokumen/Arsip daerah</u>		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)</u>		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-E)		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Nilai Budaya</u>		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
Kecamatan Bidang			487.798.888,00	172.348.888,00	660.147.776,00	-	-	-	-
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perawatan</u>		238.700.000,00	-	238.700.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Sural Memuat		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21.800.000,00	-	21.800.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional		1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan		1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perawatan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>		82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan komputer dan perengkapannya		18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional		40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>		33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renc		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Renc Renstra OPD		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</u>		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan internasional</u>		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan dan Informasi Statistik daerah</u>		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	penyusunan dan pengumpulan data dan statistik kecamatan/daerah		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan dan Fasilitas Pembangunan Kawasan Desa</u>		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengalihan kejuruan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program meningkatkan penguasaan pengalihan masyarakat</u>		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pengangan kasus-kasus dalam masyarakat dan pembinaan pemerintahan Desa		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Pemetaan Daerah Otonomi Baru</u>		-	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Betas Wilayah antar Desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Kamtibmas, Pemuktahiran data dan pelayanan penyendu		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan</u>		-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan / perbaikan jalan di lingkungan Kecamatan		-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan dan Penataan Dokumen/Arsip daerah</u>		-	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah		-	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Perencanaan dan Peningkatan Pembangunan Daerah</u>		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Muarabing Tingkat Kecamatan		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	<u>Program Peningkatan Lembaga dan Kegiatan Sosial</u>		-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KABKOTA	PROPINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-EI) Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan dan akuisisi aset budaya daerah			8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Kecamatan Sungai Botang		484.437.000,00	96.069.000,00	580.600.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dines/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengemasan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Perakitan dan Perleengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Penyediaan jasa tenaga Administrasi Teknik kantor		324.114.500,00	-	324.114.500,00	-	-	-
				6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-
				10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
				2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	-
				40.250.000,00	40.250.000,00	-	-	-
				10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
				12.033.000,00	12.033.000,00	-	-	-
				5.197.500,00	5.197.500,00	-	-	-
				8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
				25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
				15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
				35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
				135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor Pengadaan komputer dan perleengkapannya Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dines/operasional Pemeliharaan rutin/berkala komputer		61.858.500,00	-	61.858.500,00	-	-	-
				7.780.000,00	7.780.000,00	-	-	-
				5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-
				10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
				3.801.000,00	3.801.000,00	-	-	-
				30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-
				4.777.500,00	4.777.500,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD Penyusunan RKA/DPA/RKAP Dan DPPA SKPD Penyusunan Review Rencana OPD Penyusunan Analisa Jabatan		33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Partisipasi Masyarakat Pameran Pembangunan Tingkat pembangunan Pelaksanaan HKG-PKK Tingkat Kecamatan Pelaksanaan HUT Pemda Kab. Bengkulu		45.458.000,00	-	45.458.000,00	-	-	-
				17.458.000,00	17.458.000,00	-	-	-
				18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-
				10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan internasional Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
				15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data dan statistik kecamatan/daerah		-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-
				-	9.000.000,00	-	-	-
	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengembangan Kawasan Desa Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
				-	10.000.000,00	-	-	-
	Program mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat Penanganan kasus-kasus sengketa dalam masyarakat		-	9.020.000,00	9.020.000,00	-	-	-
				-	9.020.000,00	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kualitas Sosial Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	-	-	-	-	-
	Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-EI)		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
				-	5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Daerah Otopori Baru Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Monitoring Penyelenggaraan dan Monografi Kecamatan		-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-
				-	30.000.000,00	-	-	-
				-	5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Penguatan Pembangunan Daerah Monev/audit Tingkat Kecamatan Monitoring hasil kegiatan pembangunan daerah		-	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-
				-	6.150.000,00	-	-	-
				-	7.350.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan dan akuisisi aset budaya daerah		-	14.046.000,00	14.046.000,00	-	-	-
				-	14.046.000,00	-	-	-
	Kecamatan Lumar		443.442.000,00	128.358.000,00	570.000.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dines/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Perakitan Rumah Tangga Penyediaan Perakitan dan Perleengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		308.888.000,00	-	308.888.000,00	-	-	-
				1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	-
				7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	-
				2.805.000,00	2.805.000,00	-	-	-
				57.600.000,00	57.600.000,00	-	-	-
				2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	-
				16.332.000,00	16.332.000,00	-	-	-
				5.185.000,00	5.185.000,00	-	-	-
				2.753.000,00	2.753.000,00	-	-	-
				7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-
				19.225.000,00	19.225.000,00	-	-	-
				15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-
				144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	-
				25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perakitan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan komputer dan perleengkapannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas/Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perakitan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan Perakitan Rumah Jabatan Dinas Penataan Halaman dan Gedung Kantor		61.232.000,00	-	61.232.000,00	-	-	-
				7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-
				10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
				3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	-
				3.550.000,00	3.550.000,00	-	-	-
				25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
				3.152.000,00	3.152.000,00	-	-	-
				5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	-
				-	-	-	-	-
				3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Paksiat Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan pakaian Olahraga		5.750.000,00	-	5.750.000,00	-	-	-
				5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
				2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renas Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan LAKIP		10.900.000,00	-	10.900.000,00	-	-	-
				2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
				2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-
				2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-
				2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BAYU (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KAB/KOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyusunan Analisis Jabatan		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Evaluasi Jabatan		-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Standard Operating Procedure		-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Informasi Pembangunan dan Pemeliharaan		29.400.000,00	-	29.400.000,00	-	-	-	-
	Pemeran Pembangunan Tingkat pembangunan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan HKG-PKK Tingkat Kabupaten		14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Museobegh Tlewall Quran (MTQ)		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan		26.300.000,00	-	26.300.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Ulang Tahun Pemda Kabupaten Bengkulu		-	-	-	-	-	-	-
	Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik		-	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-	-	-
	Implementasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kecamatan		-	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Fasilitas Penyelidikan Kesehatan Desa		-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keugan desa		-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
	Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan masyarakat		-	25.102.000,00	25.102.000,00	-	-	-	-
	Penanganan kasus-kasus dalam masyarakat dan pembinaan pemerintahan Desa	7 Kasus	-	25.102.000,00	25.102.000,00	-	-	-	-
	Program Pemeliharaan Daerah Otorasi Baru		-	40.445.000,00	40.445.000,00	-	-	-	-
	Monitoring pembangunan di kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85 %	-	23.370.000,00	23.370.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Posyandu, Transilmas dan Monografi Kecamatan	40 Ok	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Antar Desa	5 Desa	-	9.575.000,00	9.575.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan / pembebasan jalan di lingkungan Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-
	Musrenbang Tingkat Kecamatan		-	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-
	Monitoring hasil kegiatan Pembangunan Daerah		-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya		-	20.236.000,00	20.236.000,00	-	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		-	20.236.000,00	20.236.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumentasi daerah		-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelesaian dan penataan arsip di lingkungan SKPD		-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial		-	9.975.000,00	9.975.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	9.975.000,00	9.975.000,00	-	-	-	-
	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan		422.000.000,00	168.000.000,00	590.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		257.500.000,00	-	257.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Sural Masyrakat		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		1.150.000,00	-	1.150.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.850.000,00	-	25.850.000,00	-	-	-	-
	Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85.500.000,00	-	85.500.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Perangkat Gedung Kantor		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Gedung Kantor		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi Penulisan Perundang-undangan		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		29.000.000,00	-	29.000.000,00	-	-	-	-
	Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rerje		3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rerje Rendah OPD		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAKIP		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Informasi Pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeran Pembangunan Tingkat pembangunan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Fasilitas Penyelidikan Kesehatan Desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keugan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat		-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Penanganan kasus - kasus sengketa dalam masyarakat		-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemeliharaan Daerah Otorasi Baru		-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Pembangunan di Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring Posyandu, Transilmas dan monografi Kecamatan		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumentasi daerah		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelesaian dan penataan arsip di lingkungan SKPD		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		-	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Kebersihan Kota Kecamatan		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan/pembebasan jalan di lingkungan kecamatan		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Musrenbang Kecamatan		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial		-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-E)		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KAB/KOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Pengembangan Nilai Budaya				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Kecamatan Tuhuh Bahus				476.798.758,00	54.201.258,00	578.000.000,00	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				332.673.250,00	-	332.673.250,00	-	-
	Persediaan Jasa Surat Menyurat				2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.773.700,00	-	12.773.700,00	-	-
	Persediaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional				2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Administrasi Keuangan				56.441.700,00	-	56.441.700,00	-	-
	Persediaan Jasa Kebersihan Kantor				16.238.250,00	-	16.238.250,00	-	-
	Persediaan Alat Tulis Kantor				15.120.000,00	-	15.120.000,00	-	-
	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.079.800,00	-	11.079.800,00	-	-
	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
	Persediaan Perabotan Rumah Tangga				-	-	-	-	-
	Persediaan Makanan dan Minuman				25.200.000,00	-	25.200.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				84.600.000,00	-	84.600.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah				92.730.000,00	-	92.730.000,00	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				54.682.500,00	-	54.682.500,00	-	-
	Pengadaan Perabotan Gedung Kantor				7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-
	Pengadaan Meubelatur				-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor				3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer				6.982.500,00	-	6.982.500,00	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				18.059.000,00	-	18.059.000,00	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				1.975.000,00	-	1.975.000,00	-	-
	Penyusunan RENCANA				3.528.000,00	-	3.528.000,00	-	-
	Penyusunan RKA dan DPA				5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	-
	Penyusunan LAKP				3.528.000,00	-	3.528.000,00	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra				3.528.000,00	-	3.528.000,00	-	-
	Program Pemberdayaan Informatika/Pengembangan				23.784.000,00	-	23.784.000,00	-	-
	Perencanaan/Pembangunan Tingkat pembangunan				20.184.000,00	-	20.184.000,00	-	-
	Monitoring Hasil kegiatan pembangunan Daerah				3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari Besar dan Nasional				46.600.000,00	-	46.600.000,00	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)				33.100.000,00	-	33.100.000,00	-	-
	HUT Pemuda				4.750.000,00	-	4.750.000,00	-	-
	Sumpah Pemuda				4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-
	HUT KORPRI				4.750.000,00	-	4.750.000,00	-	-
	Program Pembiayaan dan Fasilitas/ Peningkatan Kelembagaan Desa				-	3.360.000,00	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa				-	3.360.000,00	-	-	-
	Program Meningkatkan Peningkatan Pengabdian Masyarakat				-	5.591.250,00	-	-	-
	Peningkatan kasus - kasus sengketa dalam masyarakat				-	5.591.250,00	-	-	-
	Program Peningkatan Daerah Otonomi Baru				-	15.375.000,00	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah antar Desa				-	7.375.000,00	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				-	8.000.000,00	-	-	-
	Monitoring poyandu, insinerasi dan monitoring kecamatan				-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Keberhasilan Kota dan Jalan Kecamatan				-	6.730.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Keberhasilan Kota Kecamatan				-	3.780.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Perbaikan jalan lingkungan				-	2.950.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Peningkatan Pembangunan Daerah				-	18.750.000,00	-	-	-
	Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan				-	-	-	-	-
	Muaraberg Kecamatan				-	18.750.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan KIP Elektronik (E-KIP)				-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penerapan KIP Elektronik (KIP-E)				-	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Peningkatan Dokumen Arsip Daerah				-	2.400.000,00	-	-	-
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Warip Daerah				-	2.400.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya				-	24.625.000,00	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				-	24.625.000,00	-	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial				-	17.370.000,00	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat				-	2.400.000,00	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga (PRK)				-	11.970.000,00	-	-	-
	Fasilitas Kegiatan MTO				-	3.000.000,00	-	-	-
	Kecamatan Lembah Bawang				476.198.000,00	198.300.000,00	578.000.000,00	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				270.100.000,00	-	270.100.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.110.000,00	-	35.110.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional				2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Administrasi Keuangan				34.600.000,00	-	34.600.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Kebersihan Kantor				20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-
	Persediaan Alat Tulis Kantor				30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-
	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.150.000,00	-	15.150.000,00	-	-
	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.800.000,00	-	5.800.000,00	-	-
	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan				1.140.000,00	-	1.140.000,00	-	-
	Persediaan Makanan dan Minuman				25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah				20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-
	Persediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran				28.800.000,00	-	28.800.000,00	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah				50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-
	Pengadaan Perengkapan Rumah Dinas/Jabatan				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Pengadaan Perabotan Gedung Kantor				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya				6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor				3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer				3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				29.000.000,00	-	29.000.000,00	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan RENCANA				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra DPO				5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RIKAP dan DPPA SKPD				8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-
	Penyusunan LAKP				6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERUBAHAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KAB/KOTA	PROVINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengembangan Keuangan Desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
	Program fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa		-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
	Program Pemeliharaan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah		-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-
	Pandataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah		-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat		-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-
	Penanganan kasus-kasus sengketa dalam masyarakat		-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-
	Program Pemetaan Daerah Otomatis Baru		-	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	-
	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Sates Wilayah administrasi antar desa		-	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-
	Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Monitoring Penyuluhan Translasi dan Monografi Kecamatan		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan / pembebasan jalan di lingkungan Kecamatan		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan dan Penguatan Pembiayaan Daerah		-	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	-
	Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan		-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-
	Musrenbang Tingkat Kecamatan		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Polaksanaan Penerapan KTP Elektronik (KTP-E)		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial		-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
Kekurangan Sabah			242.000.000,00	106.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		167.800.000,00	-	167.800.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		840.000,00	-	840.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		41.000.000,00	-	41.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		23.000.000,00	-	23.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerutan Perundang-undangan		2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		38.140.000,00	-	38.140.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor		9.140.000,00	-	9.140.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan Perifernya		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra PD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan LAKIP SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP, Dan DPPA-SKPD		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Internasional		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
	Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Penanganan kasus-kasus sengketa dalam masyarakat		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kelurahan		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Monitoring pemeliharaan Kebersihan Kota		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Kegiatan Sosial		-	73.000.000,00	73.000.000,00	-	-	-
	Peningkatan Peran Serta RT Dalam menciptakan kebersihan dan keamanan lingkungan		-	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-
	Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
Kekurangan Bumi Emas			256.200.000,00	104.000.000,00	360.000.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		158.200.000,00	-	158.200.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerutan Perundang-undangan		1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Komputer dan Perifernya		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Revisi Renstra OPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan LAKIP SKPD		5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP, Dan DPPA-SKPD		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan internasional		16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	-	-
	Peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI)		16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	-	-
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Penanganan kasus-kasus sengketa dalam masyarakat		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kelurahan		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
	Monitoring pemeliharaan Kebersihan Kota		-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN
					APBD		APBN	
					KABKOTA	PROPINSI		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan sosial Peningkatan Peran Serta RT Dalam mencapai ketertiban dan keamanan Lingkungan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			74.800.000,00 64.800.000,00 10.000.000,00	74.800.000,00 64.800.000,00 10.000.000,00	-	-	-
PEMERINTAHAN FUNGSI PENJUALAN PENGABASAN			2.037.000.000,00	3.264.500.000,00	6.291.500.000,00	-	-	-
Inspektoral			2.037.000.000,00	3.264.500.000,00	6.291.500.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dioperasikan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa keberanian kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Perawatan dan Pengkapanan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan penyediaan makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		909.750.000,00 8.825.000,00 52.500.000,00 15.750.000,00 99.750.000,00 8.825.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 12.600.000,00 26.250.000,00 52.500.000,00 250.000.000,00 91.350.000,00 75.000.000,00 12.600.000,00		909.750.000,00 8.825.000,00 52.500.000,00 15.750.000,00 99.750.000,00 8.825.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 12.600.000,00 26.250.000,00 52.500.000,00 250.000.000,00 91.350.000,00 75.000.000,00 12.600.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Komputer dan Perengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan rutin/berkala komputer pemeliharaan rutin/berkala peralatan alat-alat studio dan komunikasi Pengadaan/Perawatan Halaman Lingkungan Kantor		791.000.000,00 36.000.000,00 21.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 21.000.000,00 125.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 21.000.000,00 52.500.000,00 400.000.000,00		791.000.000,00 36.000.000,00 21.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 21.000.000,00 125.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 21.000.000,00 52.500.000,00 400.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakain Dinas		42.000.000,00 42.000.000,00		42.000.000,00 42.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal		75.000.000,00 75.000.000,00		75.000.000,00 75.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Rincian Rencana Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD Penyusunan LAKP Penyusunan RKA, DPA, RKAP, Dan OPPA- SKPD Penyusunan laporan penetapan kinerja/perjanjian kinerja		162.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 36.750.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 26.250.000,00 15.750.000,00		162.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 36.750.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 26.250.000,00 15.750.000,00	-	-	-
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Peralatan Barang Milik Daerah Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran di Lingkungan SKPD Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun di Lingkungan SKPD		31.500.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00		31.500.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Aksesibilitas Peningkatan Aksesibilitas Pemeran Tingkat Kabupaten		25.000.000,00 25.000.000,00		25.000.000,00 25.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penyelidikan Pelaksanaan Kebijakan KDH			1.609.000.000,00	1.609.000.000,00	-	-	-
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PIKPT) Peningkatan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan Pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Pemeriksaan khusus fekt proyek Pemeriksaan serentak di bidang pendapatan Fasilitasi Kegiatan TP4D Kabupaten Bengkulu Pemeriksaan Serah terima jabatan di lingkungan Pemkab Bengkulu		450.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 84.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00		450.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 84.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00	-	-	-
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemantau dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemantau dan aparat pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja PKS (Praktek Kantor Sendiri)		325.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00		325.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00	-	-	-
	Program Pemastian dan Penyelenggaraan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD se-Kab Bengkulu Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD se-Kab. Bengkulu Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Penyusunan Laporan Pajak-pajak pribadi/ LP2P Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten Review RKA-SKPD dan RKA-PPKD LHKPN dan LHKASN Penyusunan Peraturan Bupati tentang Turutan Perbendaharaan/Turutan Ganti Rugi (TPTRGR) Review RPJMD Review RENSTRA Review RKPD Peningkatan Kapabilitas APP Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Review penyusunan anggaran dan pengadaan barang dan jasa Review rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMAD) Penyusunan Rencana Aksi dan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB)		1.278.500.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 52.500.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 52.500.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00		1.278.500.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 52.500.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 52.500.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00	-	-	-
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik Penyusunan SPTL		42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00		42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00	-	-	-
PEMERINTAHAN FUNGSI PENJUALAN PERENCANAAN			1.700.000.000,00	7.064.000.000,00	8.764.000.000,00	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			1.700.000.000,00	7.064.000.000,00	8.764.000.000,00	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dioperasikan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa keberanian kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cakakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1.225.400.000,00 1.050.000,00 94.500.000,00 10.500.000,00 277.830.000,00 19.679.625,00 78.750.000,00 84.000.000,00 5.512.500,00 15.750.000,00 42.000.000,00 282.500.000,00		1.225.400.000,00 1.050.000,00 94.500.000,00 10.500.000,00 277.830.000,00 19.679.625,00 78.750.000,00 84.000.000,00 5.512.500,00 15.750.000,00 42.000.000,00 282.500.000,00	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROPINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan jasa tenaga administrasi Aktris perkantoran		254.677.500,00		254.677.500,00				
	Rapel-rapel koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		78.750.000,00		78.750.000,00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		261.590.000,00		261.590.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		105.000.000,00		105.000.000,00				
	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya		10.800.000,00		10.800.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		36.750.000,00		36.750.000,00				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perawatan Gedung Kantor		5.040.000,00		5.040.000,00				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		84.000.000,00		84.000.000,00				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		56.070.000,00		56.070.000,00				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		24.570.000,00		24.570.000,00				
	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		31.500.000,00		31.500.000,00				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		63.000.000,00		63.000.000,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		63.000.000,00		63.000.000,00				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		68.250.000,00		68.250.000,00				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		7.875.000		7.875.000,00				
	Penyusunan pelaporan keuangan semester		7.875.000		7.875.000,00				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		7.875.000		7.875.000,00				
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD		10.500.000		10.500.000,00				
	Penyusunan LAKP		7.875.000		7.875.000,00				
	Penyusunan Reraj SKPD		7.875.000		7.875.000,00				
	Penyusunan Revisi Rencana		10.500.000		10.500.000,00				
	Penyusunan TAPKIN		7.875.000		7.875.000,00				
	Program Penyederhanaan Informasi Pembiayaan		34.650.000,00		34.650.000,00				
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten (HUT Pemda, Perhai Kencana, HUT RI)		26.250.000,00		26.250.000,00				
	Publikasi & Pemberitaan Media Massa		8.400.000,00		8.400.000,00				
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			530.250.000,00	530.250.000,00				
	Penyusunan data pokok Kabupaten Bengkulu Tahun 2016			21.000.000,00	21.000.000,00				
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			157.500.000,00	157.500.000,00				
	Fasilitas kelengkapan dan tata kelola data			73.500.000,00	73.500.000,00				
	Pengembangan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis Geospasial Kabupaten Bengkulu			278.250.000,00	278.250.000,00				
	Program Kerjasama Pembiayaan			35.007.000,00	35.007.000,00				
	Fasilitas Kerjasama Antar Daerah			35.007.000,00	35.007.000,00				
	Program Perencanaan Tata Ruang			850.017.000,00	850.017.000,00				
	Revisi Rencana Tata Ruang			300.006.000	300.006.000,00				
	Fasilitas & Koordinasi Perencanaan Ruang			250.005.000	250.005.000,00				
	Kajian & Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkulu			300.006.000	300.006.000,00				
	Program Peningkatan Kualitas Kelengkapan Koperasi			100.002.000,00	100.002.000,00				
	Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Koperasi UKM dan Perindag			100.002.000	100.002.000,00				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.446.083.500,00	1.446.083.500,00				
	Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016			631.333.500	631.333.500,00				
	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang			84.000.000	84.000.000,00				
	Fasilitas Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan			126.000.000	126.000.000,00				
	Revisi RPJMD Tahun 2016-2021			250.000.000,00	250.000.000,00				
	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkulu			126.000.000	126.000.000,00				
	Rapel Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat & Daerah			78.750.000	78.750.000,00				
	Fasilitas Pengembangan Aplikasi Simulasi Perencanaan			150.000.000	150.000.000,00				
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			600.012.000,00	600.012.000,00				
	Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi			100.002.000	100.002.000,00				
	Pemetaan Potensi & Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Bengkulu			250.005.000	250.005.000,00				
	Pemetaan Anus Barang / Distribusi Barang di Kabupaten Bengkulu			250.005.000	250.005.000,00				
	Program Perencanaan Sosial Budaya			1.455.193.530,00	1.455.193.530,00				
	Bembardayaan Masyarakat, Rakor Peninggalan Kemandirian & Penyusunan LP2KD			300.000.015	300.000.015,00				
	Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya			150.045.000	150.045.000,00				
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sumber Daya Manusia			285.001.500	285.001.500,00				
	Penyusunan RPKP & Fasilitas Pengembangan Kawasan Perdesaan			250.005.000	250.005.000,00				
	Fasilitas Bidang Pemerintahan, RANHAM dan RAD PPK			100.002.000	100.002.000,00				
	Penyusunan PERDA tentang Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkulu			300.000.015	300.000.015,00				
	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Data Objek Prioritas			70.140.000	70.140.000,00				
	Program Perencanaan Prasarana Miliyasi dan Sumber Daya Air			1.575.044.310,00	1.575.044.310,00				
	Pemeliharaan Database Jalan & Jembatan Kabupaten Bengkulu			500.010.000	500.010.000,00				
	Penyusunan Database Perhubungan (7 Data Utama)			200.004.000	200.004.000,00				
	Penyusunan DED Jalan Lingkar Kota Bengkulu			350.007.210	350.007.210,00				
	Penyusunan FS Terminal Tipe C Kota Bengkulu			150.003.000	150.003.000,00				
	Fasilitas Kebumahaan, Pengawasan & Perhubungan			175.016.100	175.016.100,00				
	Fasilitas Program Kegiatan Cipta Karya, Lingkungan Hidup & Energi			200.004.000	200.004.000,00				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			150.000.000,00	150.000.000,00				
	Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Koperasi UKM dan Perindag			150.000.000,00	150.000.000,00				
	Program Penelitian dan Pengembangan			315.000.000,00	315.000.000,00				
	Kajian Kebutuhan ASN Tenaga Fungsional Kesehatan & Pendidikan Kab. Bengkulu			157.500.000	157.500.000,00				
	Kajian Pembinaan Pendidikan Gratis untuk Pendidikan Dasar Bermula di Kab. Bengkulu			157.500.000	157.500.000,00				
	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN			3.884.217.280,00	7.882.286.700,00	11.578.422.880,00	11.578.422.880,00		
	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah			3.884.217.280,00	7.882.286.700,00	11.578.422.880,00	11.578.422.880,00		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.723.238.000,00		2.723.238.000,00			
	Penyediaan jasa surat menyurat			9.102.000,00		9.102.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91.920.000,00		91.920.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			6.200.000,00		6.200.000,00			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			400.000.000,00		400.000.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			350.000.000,00		350.000.000,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan			300.000.000,00		300.000.000,00			
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan			15.000.000,00		15.000.000,00			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			250.000.000,00		250.000.000,00			
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			300.000.000,00		300.000.000,00			
	Rapel-Rapel Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			200.000.000,00		200.000.000,00			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran			700.000.000,00		700.000.000,00			
	Penyediaan jasa sewa sarana mobilitas			101.016.000,00		101.016.000,00			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			252.579.200,00		252.579.200,00			
	Pengadaan peralatan gedung kantor			20.700.000,00		20.700.000,00			
	Pengadaan Meubelir			20.000.000,00		20.000.000,00			
	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya			25.000.000,00		25.000.000,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			93.420.000,00		93.420.000,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			35.870.000,00		35.870.000,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer			40.089.200,00		40.089.200,00			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			17.500.000,00		17.500.000,00			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERORANGAN BIAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABIKOTA	PROPRINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Peningkatan Kualitas Aparatur		45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Terentu		45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan formal		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penyeimbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		518.400.000,00	-	518.400.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan keuangan semesteran pemerintah daerah kabupaten berkayang		68.150.000,00	-	68.150.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan prognostik realisasi anggaran pemerintah daerah kab. berkayang		18.250.000,00	-	18.250.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pemerintah daerah kabupaten berkayang		162.000.000,00	-	162.000.000,00	-	-	-	-
	Review Anjab		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Review SOP		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Pemetaan Anjab SKPD		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Revisi Rencana PD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Optimalisasi Pemasokan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan barang semesteran di lingkungan SKPD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan barang akhir tahun di lingkungan SKPD		10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten		35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan dan pengelolaan PAD		-	1.990.995.000,00	1.990.995.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu		-	148.260.000,00	148.260.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Pendapatan		-	122.605.000,00	122.605.000,00	-	-	-	-
	Penerbitan dan Pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)		-	105.185.000,00	105.185.000,00	-	-	-	-
	Peningkatan Pajak Daerah		-	123.000.000,00	123.000.000,00	-	-	-	-
	Pendaftaran Penyerahan SPT PBB-P2 secara massal		-	156.785.000,00	156.785.000,00	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pengolahan Data PBB-P2 dan BPHB serta Teknologi Informasi		-	401.200.000,00	401.200.000,00	-	-	-	-
	Integrasi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah		-	66.832.000,00	66.832.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah		-	67.148.000,00	67.148.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Pemeliharaan Objek Pajak PBB-P2		-	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Pendapatan dalam Rangka Peningkatan PAD		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Pemutakhiran dan verifikasi data Pungut PBB-P2		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	2.316.845.700,00	2.316.845.700,00	-	-	-	-
	Penyusunan Analisis Standar Belanja		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		-	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan Perubahan APBD		-	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		-	215.655.700,00	215.655.700,00	-	-	-	-
	Facilitasi penempatan SIMDA Keuangan Daerah		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan data dasar DAU		-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD		-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan ketentuan standar biaya perjalanan dinas		-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Evaluasi RAPERDA tentang APBD dan RAPERBUB tentang perubahan APBD		-	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	-	-
	Evaluasi RAPERDA tentang APBD dan RAPERBUB tentang Pertanggungjawaban APBD		-	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan standar biaya umum		-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Rekonsiliasi data dasar penyusunan laporan keuangan dengan SKPD		-	102.920.000,00	102.920.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi BOS dan ADD		-	32.350.000,00	32.350.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Penempatan Sistem Informasi Gaj PNS		-	134.330.000,00	134.330.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan dana perimbangan		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan KUA PPAS APBD		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		-	154.240.000,00	154.240.000,00	-	-	-	-
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		-	45.700.000,00	45.700.000,00	-	-	-	-
	Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD		-	56.010.000,00	56.010.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatahan Keuangan Daerah		-	52.530.000,00	52.530.000,00	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Facilitasi Pengelolaan Keuangan Saluran Kerja Perangkat Daerah		-	900.125.000,00	900.125.000,00	-	-	-	-
	Asistensi dan evaluasi RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD		-	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)		-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Penelitian SPM dan Dokumen pendukung lainnya dalam rangka penewbitan SP2D bagi		-	35.125.000,00	35.125.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pemutakhiran data gaji pegawai		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah SKPD		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi dan konsultasi ke propinsi, KPPN dan kantor pajak, serta dalam rangka pengurusan dan pengajuan dana APBD		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBM)		-	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan harga satuan barang dan jasa pemerintah kabupaten berkayang		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengurusan dan Pemeliharaan BMD		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Inventaris barang milik daerah		-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi penatausahaan dan pengelolaan aset		-	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan bagi penyempit dan pengurus barang		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Penghapusan barang milik daerah		-	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-
	pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah		-	345.000.000,00	345.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan barang milik daerah kab. berkayang		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan barang semesteran pemerintah daerah kabupaten berkayang		-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan barang akhir tahun pemerintah kab. berkayang		-	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	-	-
	Pengamanan barang milik daerah		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pelaporan Aset		-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Alokasi Pengelolaan BMD untuk mencapai Opsi WTP		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Pelatihan, Penilaian, Penghapusan, Penyusutan dan Tata Cara Penghapusan BMD		-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-
	Rektor dan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Aset		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN			1.143.182.000,00	5.136.677.000,00	6.279.859.000,00	-	-	-	-
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM			1.143.182.000,00	5.136.677.000,00	6.279.859.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran		721.800.000,00	-	721.800.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan jasa surat menyurat		1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		128.000.000,00	-	128.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan barang, cakupan dan pengadaan		80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan bahan bacaan dan penulisan surat-surat		1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman		8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kar daerah		180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		96.000.000,00	-	96.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Program Fasilitas Pindah/Pindah Tugas PNS		70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-
	Pembiayaan Pegawai yang pindah dalam melaksanakan tugas		40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	PERKIRAAN BAYA (Rp)			SUMBER LAIN	
					APBD		APBN		
					KABKOTA	PROVINSI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Facilitasi pelepasan PNS purna tugas	100 %	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	10 Org	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan LAMP SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA SKPD	4 Dokumen	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan laporan penetapan kinerja	1 Dokumen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan IKU SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-
	Program Optimalisasi Pemenuhan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		8.303.000,00	-	8.303.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan barang akhir tahun di lingkungan SKPD	1 Laporan	8.303.000,00	-	8.303.000,00	-	-	-	-
	Program Penyederhanaan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan		52.000.000,00	-	52.000.000,00	-	-	-	-
	Pameran Pembangunan tingkat kabupaten	2 Kegiatan	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-
	Publikasi dan Pemberitaan melalui media massa	7 Kali	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-
	Program Penyederhanaan dan Pelastarian Dokumen/Arsip Daerah		-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Penataan Arsip di Lingkungan OPD	2 Kegiatan	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		-	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan analisis jabatan	1 Dokumen	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan evaluasi jabatan	1 Dokumen	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	-
	Facilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	100 %	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pendidikan Kedisiplinan		-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan teknis	15 org	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda		-	1.842.817.000,00	1.842.817.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat II bagi PNS Daerah	4 Orang	-	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat II bagi PNS Daerah	5 Orang	-	202.817.000,00	202.817.000,00	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat IV bagi PNS Daerah	40 Orang	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	-	-	-
	Jambore Inovasi Proyek Perubahan ss-Kalimantan	1 Kegiatan	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		-	3.063.000.000,00	3.063.000.000,00	-	-	-	-
	Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Keg	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah	1 Sistem	-	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	-	-
	Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar	2 Orang	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (Tanda Kehormatan Satyalancana)	100 %	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	-	-
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100 %	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	100 %	-	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	-	-
	Proses pemberhentian PNS dengan hak pensiun dan Kenaikan pangkat pengabdian	100 %	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Proses pengangkatan dalam jabatan/pelantikan	5 Kali	-	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	-	-
	Proses kenaikan pangkat PNS Daerah	2 Periode	-	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	-	-
	Proses mutasi/pindah tugas PNS Daerah	100 %	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pertimbangan teknis peninjauan masa kerja PNS	100 %	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Pertimbangan teknis perubahan status CPNS ke PNS	100 %	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-
	Pembuatan Kartu Pegawai (Karpog)	100 %	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pembuatan KARS dan KARSU untuk PNS Daerah	100 %	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pembuatan Kartu TASPEN	100 %	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pemberian Bantuan Penelitian dan Studi bagi PNS tugas Belajar/In Belear	100 %	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pengurusan Taperum	100 %	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi kedisiplinan PNS Daerah	3 Kali	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Pembuatan buku DUK dan Berzetting PNS Daerah	2 Buku	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Rapat koordinasi teknis bidang pendidikan	100 %	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-
	Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian iazah	100 %	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
	Konversi nomor induk pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	100 %	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan data mutasi jabatan struktural	1 Buku	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-
	Uji Kompetensi PNS yang menduduki jabatan Struktural	40 Orang	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-
	Orientasi dan pembekalan Tugas bagi CPNS Daerah	100 %	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Penerimaan CPNSD dari tenaga eks honorer	100 %	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
	Pembangunan/pengembangan sistem aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK)	100 %	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Regulasi tambahan penghasilan PNS	1 SK	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	Proses pelaksanaan sumpah/janji PNS	1 Kali	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pembinaan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bengkayang	600 Orang	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	-	-
	Permutakhiran data bidang pendidikan	100 %	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
	Rakor bidang mutasi dan kepegawaian	100 %	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
	Proses lelang jabatan secara terbuka	100 %	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-	-
	Penataan Dokumen Kepegawaian Kabupaten	100 %	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
	TOTAL		86.758.249.360,00	375.201.363.726,00	461.959.613.086,00	23.166.422.960,00			

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT